

**FUNGSI EKONOMI KOTA KECAMATAN DALAM
PEMBANGUNAN WILAYAH**
(Studi Kasus Kabupaten DT. II Cilacap, Propinsi DT I Jawa Tengah)

Oleh:
SUMEDI
A.29 1408



**JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

1997

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Alex
1997
0257

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya Yang tidak nampak oleh mereka, mereka memperoleh

ampunan dan pahala yang besar.

(2.S. Al Mulik : 12)

Dan Al Zur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat

(2.S. Al Zalam : 52)

**Karya kecil ini saya persembahkan kepada:
Bapak, Ibu, Agung, Anggi dan Irma**

RINGKASAN

SUMEDI. Fungsi Ekonomi Kota Kecamatan dalam Pembangunan Wilayah (Studi Kasus Kabupaten DT II Cilacap, Propinsi DT I Jawa Tengah) Di bawah bimbingan **T. HANAFIAH.**

Kota kecamatan menempati posisi yang strategis dalam pembangunan wilayah pedesaan, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan kecil dan mengimbaskan pertumbuhan wilayah yang lebih maju. Hal ini berkaitan dengan kebijaksanaan pembangunan wilayah yang sedang dilaksanakan. Jumlah kota kecamatan di seluruh Indonesia adalah 3.839 buah kota, yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan kecil pedesaan berperan penting dalam pembangunan pedesaan.

Perencanaan pembangunan wilayah didasarkan pada konsep Kutub Pertumbuhan dan Pusat Pertumbuhan; untuk meningkatkan pertumbuhan pada wilayah yang kurang berkembang harus dikaitkan dengan pembangunan wilayah yang lebih maju, diharapkan terjadi perembesan pertumbuhan dari wilayah yang maju ke wilayah yang kurang maju. Besarnya pengaruh perembesan dipengaruhi oleh tingkat hirarkhi pusat pertumbuhan dan aktifitas ekonomi pada pusat pertumbuhan. Kota kecamatan sesuai dengan hirarkhinya ditetapkan sebagai Pusat Pertumbuhan Kecil Pedesaan yang akan mendorong pembangunan di wilayah layanannya, yaitu desa-desa sekitarnya.

Penelitian ini menelaah fungsi ekonomi kota kecamatan dalam pembangunan wilayah. Tujuan penelitian ini ialah: (1) Menganalisis fungsi ekonomi kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan kecil pedesaan, (2) Menganalisis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

hubungan antara ketersediaan fasilitas sosial ekonomi, aksesibilitas wilayah dengan perekonomian wilayah, (3) Menganalisis pasar dan sistem pasar dalam pembangunan wilayah.

Penelitian dilakukan di Kabupaten DT II Cilacap, Propinsi DT I Jawa Tengah dengan mengambil tiga kecamatan sebagai contoh yang mewakili kecamatan maju, kecamatan sedang dan kecamatan yang kurang berkembang. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari banyak metode sesuai dengan tujuan analisis, antara lain skor skalogram, skor potensi sumberdaya wilayah, skor fasilitas sosial ekonomi, analisis limpitan sejajar, tabulasi dan deskriptif yang dilengkapi dengan uji statistik korelasi Spearman.

Pemilihan kecamatan contoh dilakukan berdasar analisis skor skalogram, skor sumberdaya wilayah, skor fasilitas sosial ekonomi dan limpitan sejajar maka dihasilkan Kecamatan Kroya, Kecamatan Adipala dan Kecamatan Sampang, masing-masing mewakili kecamatan maju, sedang dan kurang berkembang.

Kota kecamatan berfungsi sebagai pusat aglomerasi kegiatan ekonomi, konsentrasi penyediaan fasilitas sosial ekonomi dan konsentrasi pemukiman penduduk. Dengan demikian aktifitas perekonomian di kota kecamatan yang tinggi akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi wilayah belakangnya melalui hubungan saling ketergantungan antar wilayah.

Besarnya efek perembesan pertumbuhan kota kecamatan terhadap wilayah belakangnya dipengaruhi oleh (1) aksesibilitas wilayah belakang terhadap kota, (2) ketersediaan fasilitas sosial ekonomi di kota kecamatan dan (3) kepadatan penduduk. Dari tiga faktor tersebut, yang mempunyai pengaruh paling besar adalah



aksesibilitas wilayah belakang terhadap kota. Kemudian ketersediaan fasilitas sosial ekonomi dan kepadatan penduduk. Hal ini ditunjukkan dengan uji statistik yang menunjukkan tingkat korelasi yang paling tinggi antara aksesibilitas dengan kondisi perekonomian wilayah.

Dari hasil penelitian ini dapat direkomendasikan bahwa pertumbuhan wilayah sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas wilayah terhadap kota karena itu penyediaan fasilitas transportasi akan mendorong perekonomian wilayah melalui peningkatan arus barang masuk dan keluar sehingga akan meningkatkan produksi wilayah dan peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam baik kapasitasnya maupun efisiensinya karena terjadi penurunan biaya transportasi.

Pasar merupakan fasilitas ekonomi yang sangat menentukan arus pertukaran barang dan jasa. Dilihat dari aktifitasnya terdapat dua jenis pasar yaitu pasar tetap dan pasar periodik. Besarnya aktifitas pasar dipengaruhi oleh aktifitas perekonomian masyarakat wilayah layanannya dan jumlah penduduk yang dilayani. Kecamatan Kroya merupakan kecamatan yang paling maju dan didukung oleh aktifitas pasar yang paling tinggi sebaliknya untuk wilayah yang aktifitas ekonominya lebih rendah, yaitu Kecamatan Adipala dan Sampang. Adanya hubungan timbal-balik ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah memerlukan penyediaan fasilitas ekonomi, terutama pasar.



@Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

**FUNGSI EKONOMI KOTA KECAMATAN DALAM
PEMBANGUNAN WILAYAH
(Studi Kasus Kabupaten DT II Cilacap, Propinsi DT I Jawa Tengah)**

**Oleh:
SUMEDI
A. 29 1408**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pertanian
pada**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTANIAN DAN SUMBERDAYA
JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

1997

JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Penelitian Lapang yang ditulis oleh:

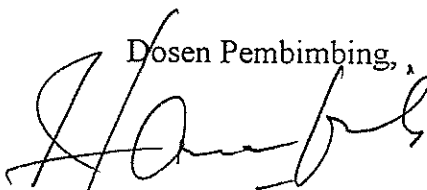
Nama : S U M E D I

Nrp. : A.29 1408

Program Studi : EKONOMI PERTANIAN DAN SUMBERDAYA

Dapat diterima sebagai syarat kelulusan Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian,
Institut Pertanian Bogor.

Dosen Pembimbing,

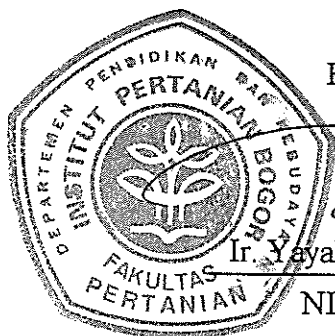


Ir. T. Hanafiah

NIP. 130 321 039

Mengetahui

Ketua Jurusan



Ir. Yayah K. Wagiono, MEc.

NIP. 130 350 044


Tanggal Kelulusan : 28 Februari 1997



PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA KARYA ILMIAH INI BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN

Bogor, Februari 1997



SUMEDY

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



RIWAYAT HIDUP

Sumedi, penulis dilahirkan di Kebumen pada tanggal 3 Februari 1973, merupakan anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Sugito Noto Rahardjo dan Ibu Sutirah.

Penulis menyelesaikan sekolah dasar pada tahun 1986 di SD N Adiluhur. Pada tahun yang sama melanjutkan ke SMP N I Karanganyar. Pada tahun 1989 penulis melanjutkan ke SMA N Gombong dan tamat pada tahun 1992. Pada tahun yang sama diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur UMPTN. Tahun 1993 diterima di Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya.

Selama kuliah penulis aktif menjadi Asisten Dosen pada mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi, Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Ekonomi Umum, Ekonomi Dasar I dan Ekonomi Dasar II

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Laporan Penelitian Lapang ini.

Penulis tertarik menelaah fungsi ekonomi kota kecamatan dalam pembangunan wilayah didasari adanya usaha keras pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, yang salah satunya melalui pendekatan pembangunan wilayah. Penulis berharap tulisan ini memberi manfaat kepada para pembacanya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak dan Ibu yang telah mengasuh, membesarkan penulis, mendidik dan selalu mencurahkan doa dan kasih sayang untuk keberhasilan serta kesuksesan penulis.
2. Bapak T. Hanafiah sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan terhadap penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan laporan ini.
3. Bapak Sutara Hendrakusumaatmadja, Bapak Iman Firmansyah yang telah menguji laporan penelitian ini dan memberikan masukan untuk kesempurnaan penulisannya.
4. Bapak Endriatmo Soetarto yang bersedia sebagai moderator dalam seminar hasil penelitian.





5. Mas Suyanto, Mbak Yati, Mas Suhartono, Mas Sugeng Priyadi, Mbak Srirejeki atas doa, dorongan semangat, bimbingan dan bantuan yang diberikan untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi.
6. Mas Suyono dan keluarga atas bantuannya selama penulis melaksanakan penelitian lapang.
7. Pejabat dan Pegawai Pemerintah DT II Cilacap atas bantuannya untuk kelancaran penelitian ini
8. Frederica Indrawati, Sriwiyati Suci Handayani, Katrin Inggarsari, Cisilia Zulfiantini, Ida Dewi Yuliawati, Maya Elvirawati, Aida Ratna, Neneng Kulsum, Nadliroh Indah K., Yana atas kerjasamanya dan dorongan yang diberikannya.
9. Made Marina, Yasminiari, Fauziah atas masukan dan diskusinya.
10. Ubaidillah, Dudhi Irawadhi, Catur Wicaksono, Suhandoko atas kerjasama dan bantuannya.
11. Rekan-rekan EPS angkatan 9 atas persahabatannya dan kerjasamanya selama perkuliahan.
12. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan laporan penelitian lapang ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada penulisan laporan ini. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penulisan yang akan datang.

Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah..... | 4 |
| 1.3. Tujuan dan Kegunaan..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Teori Dasar Perwilayahan..... | 8 |
| 2.1.1. Teori Lokasi..... | 8 |
| 2.1.2. Teori Kutub Pertumbuhan dan Pusat Pertumbuhan..... | 12 |
| 2.2. Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Kecil | 17 |
| 2.3. Pengembangan Kota-Kota Kecamatan dalam Pembangunan Wilayah..... | 21 |
| 2.4. Pembangunan Wilayah Pedesaan dan Pengembangan Kota Kecamatan..... | 23 |
| 2.5. Definisi dan Fungsi Kota..... | 28 |
| 2.6. Sistem Pasar dalam Pengembangan Wilayah | 31 |
| BAB III KERANGKA PEMIKIRAN | |
| 3.1. Kerangka Pemikiran | 42 |
| 3.2. Hipotesis | 47 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Daerah dan Waktu Penelitian 53

4.2 Batasan Penelitian..... 53

4.3. Metode Penelitian 54

4.4. Metode Pengumpulan Data dan Penarikan Contoh..... 57

4.5. Definisi Operasional 60

BAB V KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

5.1. Kondisi Geografis..... 62

5.2. Kondisi Demografis..... 64

5.3. Struktur Perekonomian Wilayah..... 68

 5.3.1. Sektor Pertanian 69

 5.3.2. Sektor Industri..... 71

 5.3.3. Sektor Perdagangan dan Jasa..... 72

 5.3.4. Sektor Pariwisata 72

5.4. Pola Dasar Pembangunan Kabupaten DT II Cilacap..... 73

 5.4.1. Pembangunan jangka Panjang II..... 73

 5.4.2. Kebijakan Tata Ruang Daerah..... 76

 5.4.3. Pengembangan Satuan Wilayah Sungai (SWS)..... 78

BAB VI POTENSI SUMBERDAYA DAN STRUKTUR TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DT II CILACAP

6.1. Hirarkhi Potensi Sumberdaya Wilayah..... 80

 6.1.1. Wilayah Kaya 81

 6.1.2. Wilayah Sedang 83

 6.1.3. Wilayah Miskin 84

| | |
|---|-----|
| 6.2. Hirarkhi Fasilitas Sosial Ekonomi..... | 86 |
| 6.3. Gambaran Umum Kecamatan Contoh | 90 |
| 6.3.1. Kecamatan Kroya | 90 |
| 6.3.2. Kecamatan Adipala | 93 |
| 6.3.3. Kecamatan Sampang | 96 |
| BAB VII KEDUDUKAN KOTA KECAMATAN DALAM STRUKTUR TATA RUANG WILAYAH | |
| 7.1 Fungsi Kota Kroya dalam Struktur Tata Ruang | 99 |
| 7.1.1. Fungsi Kota Kroya dalam Tata Ruang Wilayah Kabupaten DT II Cilacap | 99 |
| 7.1.2. Hubungan Kota Kroya dengan Wilayah Layanannya..... | 102 |
| 7.2. Fungsi Kota Adipala dalam Struktur Tata Ruang | 105 |
| 7.2.1. Fungsi Kota Adipala dalam Tata Ruang Wilayah Kabupaten DT II Cilacap | 105 |
| 7.2.2. Hubungan Kota Adipala dengan Wilayah Layanannya.. | 107 |
| 7.3. Fungsi Kota Sampang dalam Struktur Tata Ruang | 109 |
| 7.3.1. Fungsi Kota Sampang dalam Tata Ruang Wilayah Kabupaten DT II Cilacap | 109 |
| 7.3.2. Hubungan Kota Sampang dengan Wilayah Layanannya..... | 111 |
| 7.4. Pasar dan Sistem Pasar dalam Tata Ruang Wilayah..... | 112 |

| | |
|--|------------|
| BAB VIII FUNGSI EKONOMI KOTA KECAMATAN DALAM PEMBANGUNAN | |
| 8.1. Kepadatan Penduduk, Fasilitas Sosial Ekonomi dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat..... | 116 |
| 8.2. Pengaruh Aksesibilitas Kota Kecamatan Terhadap Fungsi Ekonomi Kota Kecamatan..... | 121 |
| BAB IX PASAR DAN SISTEM PASAR DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH | |
| 9.1. Sistem Pasar Kecamatan Kroya..... | 125 |
| 9.2. Sistem Pasar Kecamatan Adipala..... | 129 |
| 9.3. Sistem Pasar Kecamatan Sampang..... | 133 |
| 9.4. Aktifitas Pasar dan Fungsi Kota Kecamatan..... | 134 |
| 9.5. Arus Barang dan Karakteristik Perdagangan..... | 137 |
| BAB X PEMBAHASAN..... | 139 |
| BAB XI KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 11.1. Kesimpulan..... | 147 |
| 11.2. Saran..... | 148 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 149 |
| LAMPIRAN..... | 154 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR TABEL

| No. | <u>teks</u> | Halaman |
|-----------|---|---------|
| Tabel 1. | Jumlah dan Penyebaran Kecamatan di Indonesia, 1994..... | 3 |
| Tabel 2. | Jumlah penduduk dan Pertumbuhannya di Kabupaten DT II Cilacap, Tahun 1984 - 1994..... | 65 |
| Tabel 3. | Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Penyebarannya menurut Kecamatan di Kabupaten DT II Cilacap Tahun 1995..... | 66 |
| Tabel 4. | Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten DT II Cilacap Tahun 1993 - 1994 tanpa minyak..... | 68 |
| Tabel 5. | Analisis Potensi Sumberdaya Kabupaten DT II Cilacap, Tahun 1996..... | 85 |
| Tabel 6. | Analisis Ketersediaan dan Penyebaran Fasilitas Sosial Ekonomi Kabupaten DT II Cilacap, Tahun 1996 | 88 |
| Tabel 7. | Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Kroya, Tahun 1994 | 91 |
| Tabel 8. | Produk Domestik Regional Bruto menurut Sektor di Kecamatan Kroya atas Dasar Harga Konstan tahun 1993, Tahun 1993 - 1994 | 92 |
| Tabel 9. | Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Adipala, Tahun 1994 | 94 |
| Tabel 10. | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Sektor di Kecamatan Adipala, atas dasar Harga Konstan tahun 1993, Tahun 1993 -1994..... | 95 |
| Tabel 11. | Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Sampang Tahun 1994..... | 96 |
| Tabel 12. | Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Sampang atas Dasar Harga Konstan tahun 1993, Tahun 1993 - 1994..... | 98 |

| | |
|---|-----|
| Tabel 13. Peringkat Kepadatan Penduduk, Skalogram Aktifitas Ekonomi di Tiga Ibu Kota Kecamatan Contoh, 1996 | 117 |
| Tabel 14. Koefisien Korelasi Spearman Pada Kecamatan Contoh, 1996..... | 118 |
| Tabel 15. Nilai Koefisien Korelasi Spearman, Hubungan antara Aksesibilitas dengan Kepadatan Penduduk dan Aktifitas Ekonomi Wilayah Kecamatan Contoh, 1996 | 120 |
| Tabel 16. Analisis Aksesibilitas Kecamatan Contoh, 1996..... | 122 |
| Tabel 17. Hubungan Aksesibilitas Kecamatan Contoh dengan Perekonomian dan Penyebaran Fasilitas Sosial Ekonomi, 1996 | 123 |
| Tabel 18. Penyebaran Pasar dan Aktifitas Pasar di Kecamatan Kroya, 1996 | 126 |
| Tabel 19. Luas Areal Pasar, Jumlah Pedagang, Jumlah Kios dan Los Serta Pendapatan Pasar per Hari Pasaran Pada Kecamatan Kroya, 1996... .. | 128 |
| Tabel 20. Jumlah Toko, Fasilitas Pendukung Aktifitas Perekonomian di Sekitar Pasar di Kecamatan Kroya, 1996 | 129 |
| Tabel 21. Penyebaran Pasar dan hari-Hari Pasaran di Kecamatan Adipala, 1996 | 130 |
| Tabel 22. Luas Areal Pasar, Jumlah Pedagang, Jumlah Kios dan Los Serta Pendapatan Pasar per Hari Pasaran Pada Kecamatan Adipala, 1996..... | 132 |
| Tabel 23. Banyaknya Toko, Fasilitas Pendukung Aktifitas Perekonomian di Sekitar Pasar di Kecamatan Adipala, 1996 | 133 |
| Tabel 24. Perbandingan Aktifitas Pasar Kecamatan pada Kecamatan Contoh Tahun 1996..... | 135 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1. Perkembangan Hirarkhi Tempat Sentral..... | 35 |
| Gambar 2. Komponen Utama Pasar Denritik..... | 36 |
| Gambar 3. Perkembangan Sistem Pasar Intermeshed | 37 |
| Gambar 4. Model Pergerakan Pasar Periodik..... | 40 |
| Gambar 5. Kerangka Pemikiran Anilisis Fungsi Ekonomi Kota Kecamatan dalam Pembangunan Willayah | 46 |
| Gambar 6. Penyebaran dan Pergerakan Pasar pada Kecamatan Kroya | 127 |
| Gambar 7. Penyebaran dan Pergerakan Pasar pada Kecamatan Adipala | 131 |

Lampiran

| | |
|--|-----|
| Gambar Lampiran 6. Peta Geografis dan Pembagian SWP Kabupaten DT II Cilacap, 1996..... | 158 |
| Gambar Lampiran 7. Peta Geografis Kecamatan Kroya, 1996 | 159 |
| Gambar Lampiran 8. Peta Geografis Kecamatan Adipala, 1996..... | 160 |
| Gambar Lampiran 9. Peta Geografis Kecamatan Sampang, 1996 | 161 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR LAMPIRAN

| <u>Teks</u> | Halaman |
|---|---------|
| Tabel Lampiran 1. Jarak antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten DT II Cilacap..... | 153 |
| Tabel Lampiran 2. Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten DT II Cilacap, 1994 dan 1995 atas dasar harga berlaku tanpa minyak, dalam juta rupiah | 154 |
| Tabel Lampiran 3. Tata Guna Lahan Kabupaten DT II Cilacap, 1994 | 155 |
| Tabel Lampiran 4. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Kepadatan dan Penyebarannya di kabupaten DT II Cilacap, 1994 | 156 |
| Tabel Lampiran 5. Perbandingan Kondisi Kecamatan Contoh | 157 |
| Tabel Lampiran 9. Analisis Limpitan Sejajar Kabupaten DT II Cilacap, Tahun 1996..... | 162 |
| Tabel Lampiran 10. Skalogram Kabupaten DT II Cilacap, Tahun 1996..... | 163 |
| Tabel Lampiran 11. Skalogram Kecamatan Kroya, Tahun 1996 | 164 |
| Tabel Lampiran 12. Skalogram Kecamatan Adipala, Tahun 1996..... | 165 |
| Tabel Lampiran 13. Skalogram Kecamatan Sampang, Tahun 1996 | 166 |
| Tabel Lampiran 14. Analisis Korelasi Spearman Kecamatan Kroya, 1996 | 167 |
| Tabel Lampiran 15. Analisis Korelasi Spearman Kecamatan Adipala, 1996..... | 168 |
| Tabel Lampiran 16. Analisis Korelasi Spearman Kecamatan Sampang, 1996 ... | 169 |
| Tabel Lampiran 17. Identifikasi Pasar Contoh, 1996 | 170 |
| Tabel Lampiran 18. Karakteristik Pasar Contoh, 1996 | 171 |
| Tabel Lampiran 19. Karakteristik Responden, 1996..... | 172 |
| Tabel Lampiran 20. Jumlah dan Jenis Pedagang pada Pasar Contoh, 1996..... | 173 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan baik yang bersifat perencanaan sektoral maupun regional mempunyai keterkaitan antar sektor maupun antar tingkat administrasi, yaitu antara perencanaan pusat, regional dan lokal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dusseldorp (1971), bahwa perencanaan pembangunan seharusnya mempertimbangkan: (a) hubungan saling menguntungkan antara pembangunan di berbagai tingkat administrasi, nasional, regional maupun lokal, (b) hubungan antara pembangunan di berbagai sektor dan (c) keterkaitan antar aspek sosial, ekonomi dan fisik dalam proses pembangunan.

Pendekatan pusat-belakang (*centre-pheripery*), mempertimbangkan hubungan ekonomi antar kota sebagai pusat dan wilayah sekitarnya sebagai wilayah belakang (*pheripery*). Hubungan antara pusat dan wilayah belakangnya ini dapat berbentuk arus barang, jasa, arus orang (migrasi), arus kapital dan arus informasi dari wilayah belakang ke pusat atau sebaliknya. Intensitas hubungan antara pusat dan *pheripery* tergantung pada berbagai faktor antara lain jarak. Jarak dalam hal ini dapat dinyatakan dalam satuan panjang (km), waktu tempuh, biaya untuk mencapainya atau kemudahan untuk mencapainya.

Di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, sebagian besar daerah yang tidak berkembang berada di daerah pedesaan dengan ciri perekonomian pertanian. Dengan demikian pembangunan sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan wilayah ini. Pembangunan sektor pertanian menyangkut berbagai sektor yang lain, seperti perdagangan, industri dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

jasa. Pembangunan pertanian memerlukan penyediaan faktor-faktor produksi sebagai masukan dalam proses produksi, dan memerlukan kegiatan pasca panen yang berupa pemasaran hasil-hasil pertanian.

Penyediaan fasilitas ekonomi dan fasilitas sosial sangat menentukan dalam pembangunan pertanian dan wilayah pedesaan. Efektifitas fungsi fasilitas sosial ekonomi ini menurut Dusseldorp (1971), dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas fasilitas pelayanan serta penyebarannya secara geografis. Fasilitas pelayanan ini akan berfungsi secara optimal apabila terdapat jumlah penduduk tertentu yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Jumlah penduduk minimum yang diperlukan untuk mendukung keberadaan suatu fasilitas (*threshold*) disebut ambang batas. Setiap jenis fasilitas sosial ekonomi mempunyai angka ambang batas yang berbeda.

Kota kecamatan sebagai pusat (*centre*) memiliki tiga fungsi yaitu: (1) fungsi pelayanan dengan menyediakan fasilitas kebutuhan dasar bagi masyarakat wilayah belakangnya, (2) fungsi permukiman, sebagai konsentrasi permukiman penduduk, karena terdapat kecenderungan penduduk untuk memilih tempat bermukim yang optimum dari pusat fasilitas sosial ekonomi, (3) fungsi ekonomi, yaitu sebagai pusat aktifitas ekonomi meliputi pemasaran hasil pertanian, aktifitas industri pengolahan terutama industri skala kecil.

Untuk meningkatkan pemerataan pembangunan perlu pendekatan pembangunan wilayah, dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola pembangunan di wilayahnya. Dalam rangka menerapkan kebijaksanaan pembangunan wilayah dan penerapan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan azas pembantuan, wilayah Indonesia dibagi kedalam 27 Propinsi, 297

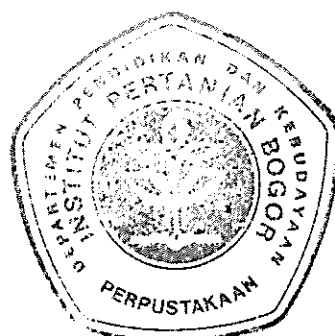


Kabupaten/Kotamadya, 3.839 Kecamatan dan 64.097 Desa/Kelurahan. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Jumlah dan Penyebaran Kecamatan di Indonesia, Tahun 1994.

| No | Propinsi | Luas Wilayah (km ²) | Jumlah Penduduk | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
|-----|--------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1. | Aceh | 55.392 | 3.703.780 | 142 | 5.463 |
| 2. | Sumatera Utara | 70.787 | 10.847.195 | 243 | 5.292 |
| 3. | Sumatera Barat | 49.778 | 4.213.202 | 103 | 2.539 |
| 4. | Riau | 94.561 | 3.686.631 | 78 | 1.204 |
| 5. | Jambi | 44.800 | 2.248.468 | 54 | 1.074 |
| 6. | Sumatera Selatan | 103.688 | 6.905.586 | 101 | 2.606 |
| 7. | Bengkulu | 21.168 | 1.329.567 | 31 | 1.083 |
| 8. | Lampung | 33.307 | 6.448.251 | 77 | 1.866 |
| 9. | D.K.I. Jakarta | 661 | 8.824.117 | 43 | 265 |
| 10. | Jawa Barat | 46.229 | 37.918.186 | 526 | 7.104 |
| 11. | Jawa Tengah | 34.206 | 29.313.421 | 532 | 8.496 |
| 12. | D.I. Jogjakarta | 3.169 | 2.919.304 | 73 | 438 |
| 13. | Jawa Timur | 47.921 | 33.423.234 | 609 | 8.389 |
| 14. | Kalimantan Barat | 146.760 | 3.504.095 | 108 | 1.362 |
| 15. | Kalimantan Tengah | 152.600 | 1.547.134 | 82 | 1.162 |
| 16. | Kalimantan Timur | 202.440 | 2.159.094 | 78 | 1.104 |
| 17. | Kalimantan Selatan | 37.660 | 2.793.694 | 109 | 2.169 |
| 18. | Bali | 5.561 | 2.861.785 | 51 | 637 |
| 19. | NTB | 20.177 | 3.556.076 | 59 | 573 |
| 20. | NTT | 47.874 | 3.473.283 | 98 | 1.723 |
| 21. | Timor Timur | 14.874 | 814.171 | 62 | 442 |
| 22. | Sulawesi Selatan | 72.781 | 7.372.684 | 185 | 1.886 |
| 23. | Sulawesi Tengah | 69.726 | 1.861.723 | 62 | 1.302 |
| 24. | Sulawesi Utara | 19.023 | 2.592.788 | 85 | 1.392 |
| 25. | Sulawesi Tenggara | 27.686 | 1.504.004 | 64 | 809 |
| 26. | Maluku | 74.505 | 2.013.109 | 56 | 1.517 |
| 27. | Irian Jaya | 421.981 | 1.840.488 | 117 | 2.195 |
| | Total | 1.919.317 | 189.675.070 | 3.839 | 64.195 |

Sumber : BPS, 1994.



Pada tabel 1 dapat ditelaah bahwa penyebaran kota kecamatan cukup merata. Jumlah kota kecamatan di masing-masing propinsi tergantung pada luas wilayah dan jumlah penduduknya. Suatu pusat pelayanan atau pusat pertumbuhan memerlukan jumlah penduduk dan wilayah layanan tertentu agar pusat pelayanan atau pusat pertumbuhan tersebut efisien. Hal ini dapat diamati untuk Propinsi Irian Jaya dengan luas wilayah 421.981 kilometer persegi dan jumlah penduduk 1.840.488 jiwa mempunyai kota kecamatan sebanyak 117 buah sedangkan DKI Jakarta dengan luas hanya 661 km² dengan jumlah penduduk 8.824.117 jiwa mempunyai 43 buah kota kecamatan. Demikian juga untuk Propinsi Jawa Timur yang memiliki kota kecamatan terbanyak, memiliki luas wilayah 47.921 km² dan jumlah penduduk 33.423.234 jiwa, dengan jumlah kota kecamatan sebanyak 609 buah.

Kota kecamatan berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi yang melayani desa-desa sekitarnya. Menurut Karjoredjo (1989), fungsi kota kecamatan dapat ditelaah dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan kota kecamatan mengkonsumsi produk pertanian dan pengguna tenaga kerja pedesaan. Dari sisi penawaran, menyediakan sarana produksi dan kebutuhan masyarakat desa terhadap barang-barang yang tidak dihasilkan di wilayah sendiri. Disamping itu juga menyediakan sarana pelayanan sosial lainnya seperti sekolah, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi dan lain-lain.

Peranan kota kecamatan tergantung pada letak dan posisinya terhadap desa-desa sekitarnya. Pada taraf pertama, kota kecamatan mendorong perkembangan desa atau desa-desa melalui permintaan akan pangan dan



penawaran akan fasilitas yang dimilikinya. Arus yang terjadi lebih banyak pada gerak *sentripental* dimana penduduk desa pergi ke kota untuk melakukan transaksinya. Pada tahap selanjutnya kota kecamatan akan mendorong perkembangan desa-desa sekitarnya yaitu dengan menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, misalnya pengolahan hasil pertanian, yang akan meningkatkan pendapatan desa sekitarnya. Gerak balik ini bersifat *sentrifugal* dan merupakan perembesan ke wilayah pinggiran. Kota kecamatan juga berfungsi menghantarkan perkembangan kota yang lebih besar dan lebih tinggi hirarkhinya ke daerah-daerah sekitarnya.

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten DT II Cilacap dalam pembangunan menyangkut pembangunan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya alam. Permasalahan yang mendesak dan perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh adalah: **Pertama** masalah kependudukan, yang meliputi pertumbuhan penduduk yang tinggi, bertambahnya penduduk usia sekolah sehingga perlu antisipasi penyediaan fasilitas pendidikan.

Kedua masalah kelestarian sumberdaya alam. Karena kegiatan pembangunan baik pembangunan ekonomi maupun fisik dilaksanakan dengan memanfaatkan sumberdaya alam. Eksploitasi sumberdaya alam akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem alamiah yang apabila tidak direncanakan secara hati-hati akan membawa kerusakan yang merugikan pembangunan itu sendiri dan aktifitas pembangunan di masa yang akan datang.



Ketiga adalah masalah pemerataan pembangunan dan pertumbuhan wilayah yang tidak merata. Ketidakmerataan penyebaran sumberdaya alam dan ketidakmerataan pembangunan fasilitas sosial ekonomi menyebabkan pertumbuhan wilayah tidak merata. Upaya pemerataan pembangunan terus mendapatkan perhatian yang serius dalam setiap kebijaksanaan pembangunan di Kabupaten DT II Cilacap. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui kebijaksanaan pembangunan wilayah. Kebijaksanaan pembangunan wilayah dilaksanakan melalui penyusunan sub wilayah pembangunan (SWP) yang didasarkan pada hubungan fungsional antar wilayah. Disamping itu dijadikannya kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan kecil di tingkat kecamatan, diharapkan mampu mendorong aktifitas perekonomian desa-desa sekitarnya. Kedudukan kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan kecil pedesaan dan pusat pelayanan sosial ekonomi bagi masyarakat pedesaan akan menyediakan keperluan masyarakat akan sarana produksi dan pemasaran bagi produk yang dihasilkan. Tersedianya fasilitas yang cukup lengkap di kota kecamatan, akan menjadikan kota kecamatan sebagai pusat aktifitas perekonomian wilayah pedesaan. Dengan demikian kota kecamatan menduduki posisi yang strategis dalam upaya pembangunan pedesaan dan upaya pemerataan pembangunan

Kecamatan sebagai unit administrasi terendah yang mempunyai aparat pemerintahan yang lengkap dan didukung adanya aparat instansi vertikal yang lengkap serta memiliki akses ke bawah yang besar sangat sesuai untuk dikembangkan sebagai pusat pelayanan dan pusat pengembangan wilayah



pedesaan. Dengan demikian perkembangan dan pertumbuhan ekonomi wilayah dipengaruhi oleh fungsi kota kecamatan tersebut.

Dari uraian diatas, dapat dirumuskan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten DT II Cilacap antara lain:

1. Apa dan bagaimana fungsi kota kecamatan dalam pembangunan ekonomi wilayah pedesaan?
2. Bagaimana hubungan antara fungsi ekonomi kota kecamatan dengan ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi pada tingkat kecamatan?
3. Bagaimana sistem dan peranan pasar dalam pembangunan wilayah kecamatan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis fungsi ekonomi kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan kecil pedesaan.
2. Menganalisis hubungan antara ketersediaan fasilitas sosial ekonomi dengan fungsi ekonomi kota kecamatan.
3. Menganalisis sistem dan peranan pasar dalam pembangunan wilayah kecamatan.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Cilacap, sebagai masukan dalam menyusun rencana pembangunan di wilayahnya, dan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Perwilayahan

Perkembangan teori wilayah dalam rangka memahami struktur tata ruang wilayah telah lama dikembangkan. Para ahli perwilayahan seperti Weber (1909), Christaller (1933), Losch (1954), dan lain-lain mencoba memformulasikan konsep wilayah untuk keperluan penelaahan perwilayahan dan memberikan panduan dalam menentukan kebijaksanaan pembangunan wilayah, terutama menyangkut tata ruang dan hubungan antar wilayah.

2.1.1. Teori Lokasi

Penelaahan secara komprehensif tentang lokasi dilaksanakan pertama kali oleh Weber (1909). Telaah yang dilaksanakan oleh Weber, dan disempurnakan oleh Losch terutama menyangkut asumsi yang digunakan. Telaah Weber ini didasarkan pada asumsi:

1. Unit telaah adalah suatu wilayah yang terisolasi, mempunyai iklim yang homogen, konsumen terkonsentrasi pada beberapa pusat dan kondisi pasar adalah persaingan sempurna.
2. Beberapa sumberdaya seperti tanah liat, pasir dan air tersedia di mana-mana dalam jumlah yang memadai (*ubiquitous*).
3. Bahan-bahan lainnya seperti bahan mineral, bahan tambang tersedia secara *sporadis* pada tempat-tempat yang terbatas.
4. Tenaga kerja tidak tersedia secara luas, tetapi terbatas pada beberapa lokasi dengan mobilitas yang tetap.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut maka faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi menurut Weber adalah:

1. **Biaya transportasi dan biaya tenaga kerja;** kedua faktor ini merupakan faktor-faktor umum yang fundamental dalam menentukan lokasi kegiatan ekonomi. Dalam model Weber, diasumsikan bahwa biaya transportasi berbanding lurus dengan jarak tempuh dan berat yang diangkut. Di sisi lain tersedianya tenaga kerja dengan upah yang rendah di lokasi tertentu akan mempengaruhi keputusan lokasi industri. Lokasi industri akan bergeser ke lokasi tenaga kerja murah selama penghematan biaya karena lebih dekat dengan lokasi tenaga kerja lebih besar dari tambahan biaya transportasi.
2. **Kekuatan-kekuatan aglomerasi dan deglomerasi (*agglomerative and deglomerative force*),** yaitu faktor-faktor lokal yang menentukan konsentrasi dan penyebaran berbagai kegiatan dalam tata ruang. Sampai tingkat tertentu kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi pada lokasi tertentu. Bila hal ini berlangsung terus maka akan timbul kejenuhan ekonomi yang ditandai oleh *diseconomic of scale*, yaitu dengan naiknya harga tanah, transportasi dan energi sehingga kegiatan ekonomi akan mulai menyebar ke wilayah sekitarnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan faktor tersebut, maka lokasi industri akan memilih lokasi dengan biaya yang minimum.

Salah satu kelemahan yang fundamental dari konsep Weber adalah hanya menekankan pada biaya input, dan kurang memperhatikan aspek permintaan. Pasar adalah suatu variabel dalam penentuan lokasi industri. Pembeli tersebar di daerah yang luas dengan intensitas permintaan yang berbeda-beda. Dengan demikian



pasar merupakan faktor penentu lokasi yang sangat penting, bahkan mungkin lebih penting dari faktor biaya. Dengan demikian lokasi optimum adalah lokasi dimana diperoleh laba maksimum. Hal ini yang dikemukakan oleh Losch (1954). Dalam konsep lokasinya, Losch mendasarkan pada asumsi:

1. Tidak ada perbedaan-perbedaan spesial dalam distribusi input, bahan baku, tenaga kerja dan modal pada wilayah yang homogen;
2. Kepadatan penduduk yang seragam dan selera yang konstan;
3. Tidak ada interpedensi antara perusahaan - perusahaan.

Teori Losch ini sebenarnya merupakan sisi lain dari teori Weber, karena teori Losch terlalu menekankan pada aspek pasar dan kurang memperhatikan aspek bahan baku dan lokasi. Perkembangan dari teori ini lebih lanjut disempurnakan oleh Isard yang mengembangkan konsep aglomerasi sebagai berikut:

1. **Faktor skala usaha yang ekonomis;** yaitu suatu besaran skala usaha yang ekonomis dari suatu perusahaan tertentu, sebagai konsekuensi dari perluasan perusahaan di suatu lokasi.
2. **Faktor lokalisasi yang ekonomis;** yaitu lokasi yang ekonomis bagi sekelompok perusahaan industri yang sejenis, sebagai konsekuensi dari peningkatan produksi total pada suatu lokasi.

Faktor urbanisasi yang ekonomis; yaitu suatu lokasi yang ekonomis bagi semua perusahaan dari berbagai jenis industri, sebagai konsekuensi kegiatan ekonomi secara keseluruhan di suatu tempat berdasarkan jumlah penduduk, tingkat pendapatan, produksi dan tingkat kesejahteraan setempat.



Konsep tempat sentral yang dikembangkan oleh Christaller pada tahun 1933, membahas pembentukan hirarkhi pusat-pusat pelayanan yang dinyatakan dalam tempat sentral. Konsep dasar dari teori tempat sentral ini adalah:

- a. Wilayah yang dilayani oleh Tempat Sentral merupakan wilayah komplemen bagi Tempat sentral.
- b. Tempat Sentral mempunyai kegiatan sentral, yaitu yang melayani wilayah yang terluas disebut tempat sentral orde tertinggi sedangkan tempat sentral yang melayani orde terkecil disebut Tempat Sentral orde rendah.
- c. Batas pelayanan dari tiap kegiatan sentral digambarkan sabagai batas jangkauan dari komoditi tersebut.
- d. Permintaan terhadap komoditi sentral tersebut tergantung secara timbal balik pada distribusi dan variasi kondisi sosial ekonomi penduduk serta konsentrasi penduduk di tiap tempat sentral.
- e. Permintaan terhadap kegiatan sentral tergantung pada jarak dan kemudahan usaha konsumen untuk memperoleh komoditi tersebut. Diasumsikan permintaan terhadap komoditi tersebut akan semakin berkurang hingga titik nol yaitu berdasarkan penambahan jarak dari tempat sentral.

Kegiatan-kegiatan pelayanan tempat sentral yang terdiri dari berbagai komoditi, bervariasi dalam skala, hirarki, batas ambang dan jangkauan. Setiap kegiatan pelayanan tersebut mempunyai batas ambang penduduk (*Threshold Population*) dan Jangkauan pasar (*market range*) yang berbeda.

1. **Batas Ambang Penduduk;** merupakan jumlah penduduk minimum yang menunjang atau membutuhkan adanya suatu kegiatan pelayanan.



2. **Jangkauan Pasar;** merupakan suatu jarak yang ditempuh dan diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh suatu pelayanan atau komoditi. Di luar batas itu konsumen akan mencari tempat sentral yang lain.

Dari studinya, Christaller mengidentifikasi tujuh tempat sentral mulai dari dukuh atau kampung sampai kota metropolitan. Jarak tujuh kilo meter merupakan jarak diantara pusat terkecil berdasarkan asumsi bahwa jarak sekitar empat kilo meter merupakan jarak tempuh seseorang yang berjalan dalam satu jam.

Untuk keperluan praktis, hirarki tempat sentral dapat ditelaah berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Prinsip pemasaran atau penawaran;** yaitu berdasarkan prinsip bahwa setiap tempat sentral hanya dapat melayani secara maksimum sepertiga dari enam sub tempat sentral ditambah dengan tempat sentral itu sendiri.
2. **Prinsip transportasi;** yaitu berdasarkan prinsip jarak minimum antara tempat sentral utama dan sub tempat sentral yang dilayani dan terletak pada jalur-jalur lalu lintas di antara tempat sentral utama.
3. **Prinsip administrasi;** yaitu berdasarkan prinsip kontrol atau pengelolaan dan pemerintahan, dalam pengertian bahwa fungsi tiap tempat sentral mengontrol keenam sub tempat sentral yang mengelilinginya.

2.1.2. Teori Kutub Pertumbuhan dan Pusat Pertumbuhan

Teori kutub pertumbuhan ini muncul sebagai jawaban atas masalah yang tidak dapat dijelaskan oleh teori tempat sentral sebagai suatu model struktur tata ruang regional. Konsep ini dimaksudkan untuk melepaskan diri dari kekangan



dimensi geografis yang digunakan pada teori-teori sebelumnya (teori lokasi dan tempat sentral). Teori kutub pertumbuhan menekankan pada perkembangan kutub pertumbuhan dalam ruang ekonomi (*economic space*)(Glasson, 1977).

Perreoux, dalam Hanafiah (1988), mengartikan kutub sebagai suatu vektor dalam ruang ekonomi, yakni: sebagai medan kekuatan, ruang ekonomi mengandung pusat-pusat dan kutub-kutub yang mempunyai kekuatan *sentrifugal*, yang memancar ke sekeliling dan kekuatan *sentripental* yang menarik sekitarnya ke pusat-pusat tersebut. Tiap pusat merupakan pusat penarik dan penolak serta mempunyai medan sendiri dalam suatu gugus medan pusat-pusat yang lain.

Lebih jauh lagi, Boudeville dalam Hanafiah (1988), memperluas pengertian Kutub Pertumbuhan dan Pusat Pertumbuhan dalam dimensi geografi sebagai berikut:

...adalah lebih baik menggambarkan kutub sebagai aglomerasi kegiatan-kegiatan secara geografis dari suatu kompleks sistem dari pada berbagai sektor yang berbeda dari matrik nasional.

Glasson (1977), mengatakan bahwa konsep dasar dari kutub pertumbuhan terdiri dari konsep *Leading Industries* konsep *Polarisasi* dan konsep *Spread effects*

- a. Konsep *Leading Industries (Industrie motoric)*; dan perusahaan-perusahaan *propulsive* menyatakan, pada pusat kutub pertumbuhan terdapat perusahaan - perusahaan *propulsive* yang besar yang termasuk dalam *leading industries* yang mendominasi unit - unit ekonomi yang lainnya. Ada kemungkinan bahwa suatu kompleks industri hanya terdiri dari



satu perusahaan *propulsive* yang dominan. Lokasi geografi asli dari industri-industri seperti itu pada titik-titik fokal tertentu dalam suatu daerah mungkin adalah disebabkan oleh beberapa faktor, lokasi sumberdaya atau lokasi kemanfaatan-kemanfaatan buatan manusia (komunikasi atau tempat-tempat sentral yang berdasarkan kegiatan jasa yang sudah ada, dimana terdapat keuntungan-keuntungan karena prasarana dan penawaran tenaga kerja), atau barang kali hanya karena bersifat kebetulan saja.

- b. **Konsep Polarisasi;** menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dari *leading industries (propulsive growth)* mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya ke dalam kutub pertumbuhan. Pada akhirnya hasil dari proses polarisasi adalah berbagai macam keuntungan aglomerasi. Menurut Hanafiah (1988), adanya *aglomerasi* ekonomi akan menimbulkan (1) *economic internal to firm*; yang dicirikan oleh biaya produksi rata-rata yang rendah, yang ditimbulkan oleh produksi dalam skala besar, spesialisasi dan efisiensi; (2) *economic external to the firm but internal to industry*, yang ditandai dengan penurunan biaya tiap unit produksi karena lokasi tertentu dari industri tersebut, misalnya dekat dengan sumber bahan baku dan tenaga kerja terampil; dan (3) *economic external to the industry but internal to urban area*, yang dicirikan oleh adanya perubahan penurunan biaya produksi rata-rata tiap perusahaan karena banyaknya industri yang tumbuh pada suatu tempat atau kota.
- c. **Konsep Spread effects;** menyatakan bahwa pada waktunya, kualitas propulsif dinamik dari kutub pertumbuhan akan memancar ke luar dan memasuki ruang sekitarnya. Hirschman, dalam Glasson, (1977) menyatakan bahwa *spread*

effects atau *tricking down effects* dari kutub-kutub pertumbuhan sebagai lawan dari *backwash effects* atau *polarisation effects*.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat berbagai hal yang menarik tentang konsep kutub pertumbuhan, yaitu:

1. Adanya keuntungan aglomerasi, konsep ini akan menjadi suatu cara yang efisien untuk menimbulkan perkembangan yang lebih cepat di daerah tersebut.
2. Dari segi anggaran belanja, pemusatan investasi pada titik-titik pertumbuhan tertentu adalah lebih murah dari pada pemberian bantuan besar-besaran kepada daerah-daerah yang banyak.
3. *Spread effects* yang ditimbulkan oleh titik-titik pertumbuhan akan membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dialami oleh daerah-daerah yang tertinggal.
4. Penerapan konsep pusat pertumbuhan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini karena mekanisme *Spread effects* tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Menurut Stohr dan Totling (1976) dalam Hanafiah (1988), *spread effects* dari kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan biasanya lebih kecil dari pada yang diharapkan atau lebih kecil dari pada *back wash effects* dan memberikan hasil akhir yang negatif bagi *hinterlandnya*. *Spread effects* secara geografis amat terbatas dan sempit, biasanya terbatas pada *commuting area* dan berfungsi sesuai dengan ukuran-ukuran pusat-pusat bersangkutan; peningkatan pendapatan di pusat-pusat yang hirarkinya lebih rendah atau wilayah pedesaan akan menyebabkan atau menimbulkan penggandaan pendapatan yang kuat di pusat-pusat yang jenjang



hirarkinya lebih tinggi, dan tidak sebaliknya. Teori Kutub Pertumbuhan lebih berorientasi ke atas daripada ke bawah dalam sistem jenjang hirarki kota-kota.

Dalam rangka pembangunan yang lebih luas khususnya pembangunan tata ruang, agak sulit menerapkan kebijaksanaan kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan bagi daerah-daerah terbelakang karena kurangnya *spread effects* dari kota-kota ke daerah *hinterland* yang lebih luas, (Nichols, 1969; Moseley, 1973; Hansen, 1975; dalam Hanafiah 1988).

Perkembangan selanjutnya dari konsep kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan, menurut Hanafiah (1988), fungsi kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan adalah:

1. Harus berfungsi sebagai pusat pelayanan secara umum maupun secara khusus seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain.
2. Harus berfungsi sebagai pusat inovasi dan promosi sehingga pusat pertumbuhan dan kutub pertumbuhan harus mempunyai kegiatan pemrosesan dan pengolahan dasar dan mendasar guna memenuhi kebutuhan wilayah dan nasional dan juga harus menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang terdorong keluar dari sektor pertanian akibat revolusi hijau.
3. Harus berfungsi sebagai pusat interaksi sosial, sebagai pusat difusi inovasi dan informasi, dan juga harus berfungsi sebagai tempat pelayanan penyuluhan, pendidikan serta tempat pertemuan berbagai kelompok masyarakat.



2.2. Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Kecil

Penerapan kebijaksanaan pembangunan wilayah dilaksanakan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan kecil pedesaan. Pengembangan pusat pertumbuhan dan pelayanan kecil diharapkan mampu mendorong perkembangan pembangunan desa-desa.

Menurut telaah para ahli di India dalam Hanafiah (1988), pusat-pusat pertumbuhan dapat dibedakan atas: (1) pusat pelayanan pada tingkat lokal, (2) titik pertumbuhan pada tingkat sub wilayah, (3) pusat pertumbuhan pada tingkat wilayah, (4) kutub pertumbuhan pada tingkat nasional.

1. Pusat Pelayanan;

Pusat pelayanan merupakan tingkat terendah yang melayani sejumlah 5.000 sampai 10.000 penduduk yang terpusat pada satu desa atau terpecah di beberapa kampung atau pedukuhan. Pusat pelayanan mempunyai warung, toko-toko kecil, sekolah dasar, sekolah menengah, kantor pos pembantu, pusat koperasi, pusat pertemuan dan kegiatan masyarakat dan lain-lain kebutuhan dasar pedesaan. Pusat pelayanan bukan merupakan pusat pertumbuhan tetapi hanya berfungsi sebagai pusat interaksi sosial, pertukaran ide dan informasi mengenai pembangunan yang akan menyebar ke desa-desa dan kampung-kampung. Dalam jangka panjang, Pusat Pelayanan akan merupakan saluran bagi perembesan pengaruh kota ke daerah belakangnya (pedesaan). Pemilihan pusat pelayanan akan ditentukan pada proses interaksi sosial dan integrasi masyarakat dalam suatu teritorial daripada berdasarkan kelompok atau lapisan masyarakat.



2. Titik Pertumbuhan;

Titik pertumbuhan ini mencakup sepuluh sampai dua puluh pusat pelayanan dan melayani 50.000 sampai 100.000 jiwa. Ukuran luas titik pertumbuhan itu sendiri adalah sekitar 10.000 sampai 50.000 penduduk. Perencanaan titik pertumbuhan harus dihubungkan dengan pertumbuhan yang cepat dalam sistem transportasi dan komunikasi, teknologi dan tingkah laku mobilitas penduduk.. Peranan titik pertumbuhan yang paling penting adalah aktifitas produksi, pengolahan hasil pertanian dan peternakan. Fungsi-fungsi yang diperlukan oleh titik-titik pertumbuhan seharusnya berfungsi sosial, ekonomi dan integrasi dari sub wilayah yang dilayani oleh titik pertumbuhan tersebut. Titik pertumbuhan mempunyai kantor polisi, pusat pengumpulan produksi, bank, pasar tetap, gudang, akademi, fasilitas pengadaan sarana pertanian. Titik pertumbuhan direncanakan sebagai pusat kecil perkotaan yang mempunyai dasar-dasar atau karakteristik sosial sendiri dan mempunyai kemampuan untuk mengabsorpsi atau menyerap pedesaan sekitarnya.

3. Pusat Pertumbuhan;

Pusat pertumbuhan ini berpenduduk antara 50.000 sampai 500.000 jiwa dan tergantung pada tingkat ekonomi wilayah tersebut. Jumlah penduduk yang dilayani berkisar antara 1.000.000 sampai 2.000.000, yang menyebar dalam wilayah yang besar. Pusat pertumbuhan ini akan meliputi 5 sampai 10 titik pertumbuhan. Pusat pertumbuhan akan berfungsi sebagai pusat inovasi dan pendorong. Fungsi pusat pertumbuhan yang terutama adalah industri dan selanjutnya tergantung pada wilayah belakangnya dalam hal bahan baku dan



tenaga kerja. Pusat pertumbuhan juga berfungsi sebagai penyangga migrasi yaitu akan menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi tenaga yang tidak terserap oleh titik-titik pertumbuhan. Pusat-pusat pertumbuhan menghasilkan faktor produksi pertanian, seperti pupuk, pestisida, mesin-mesin, dan alat-alat pertanian.

4. Kutub Pertumbuhan;

Kutub Pertumbuhan akan mempunyai penduduk antara 500.000 sampai 2.500.000 jiwa. Fungsi kutub pertumbuhan lebih menonjol di sektor tersier. Kutub pertumbuhan merupakan jantung bagi wilayah makro yang mengirim denyutan-denyutan pembangunan, seperti pembiayaan, teknologi, hasil penelitian, industri dan lain-lain ke berbagai pusat pertumbuhan. Dalam pembangunan pedesaan penciptaan dan pengembangan pusat pelayanan kecil dan titik pertumbuhan menjadi sangat strategis. Unit wilayah yang baik untuk pengembangan pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan kecil adalah kecamatan. Usaha pembangunan yang terkonsentrasi pada pusat dan titik tersebut akan menimbulkan manfaat antara lain: (1) timbulnya kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, (2) penciptaan skala ekonomi, (3) mendorong inovasi, (4) menciptakan akumulasi modal, (5) menciptakan siklus pertumbuhan dan perluasan, (6) terkonsentrasinya kegiatan ekonomi dan (7) akan menimbulkan pengaruh komplemen berganda yang menciptakan pasar baru, dan eksternalitas ekonomi.

Dalam pengembangan kota kecamatan, hal yang perlu mendapat perhatian menurut Hanafiah (1988), adalah:

1. **Pembangunan lokal;** bila pengembangan kota kecamatan merupakan strategi bagi pembangunan wilayah kecamatan, maka strategi ini dapat dikatakan sebagai strategi pembangunan lokal dalam arti pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan melalui peran serta masyarakat
2. **Desentralisasi dan Dekonsentrasi;** kemampuan perencanaan pembangunan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan dan meningkatkan fungsi Camat sesuai INMENDAGRI No 4 Tahun 1981.
3. **Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan kecil di pedesaan;** dalam rangka menciptakan suatu struktur internal pedesaan yang dinamis, melalui pengembangan sektor informal pedesaan.
4. **Menciptakan pusat-pusat pelayanan di pedesaan;** dalam rangka menyediakan fasilitas kebutuhan dasar manusia.

Keberhasilan pengembangan kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan kecil dan pusat pelayanan akan sangat tergantung dan sangat ditentukan oleh: (1) kemampuan dan kapasitas kepala daerah/kepala wilayah sebagai administrator pemerintahan dan pembangunan dan administrator kemasyarakatan, (2) kemampuan dan kapasitas Camat sebagai administrator pembangunan di tingkat kecamatan, khususnya dalam penerapan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan.

Dengan demikian wilayah kecamatan dijadikan unit terkecil dalam pembangunan wilayah. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan UDKP, yang ditetapkan wilayah kecamatan sebagai satu unit manajemen pembangunan terpadu. Pengembangan kota kecamatan sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan kecil



diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah belakang (*hinterlandnya*) melalui mekanisme *spread effects* dan *aglomerasi* kegiatan-kegiatan ekonomi.

2.3. Pengembangan Kota-Kota Kecamatan dalam Pembangunan Wilayah

Dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan di Indonesia kota kecamatan memegang posisi yang strategis untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan kecil pedesaan. Posisi strategis kota kecamatan menurut Ditjen PMD (1993), dilihat dari sisi pemerintahan adalah karena:

1. Pemerintahan kecamatan dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia merupakan perangkat terbawah dari pelaksanaan azas dekonsentrasi. Dengan demikian pemerintah kecamatan merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah.
2. Kecamatan merupakan unit pemerintahan dan unit pembangunan di tingkat paling bawah yang memiliki organisasi pemerintahan dan unsur aparatur yang relatif lengkap, dengan aparat dari berbagai instansi vertikal dan otonom.
3. Camat sebagai kepala wilayah memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi vertikal dan instansi otonom di tingkat kecamatan, sesuai dengan UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Perkembangan suatu wilayah memerlukan persyaratan adanya kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan wilayah, yaitu kegiatan yang mempunyai skala ekonomis yang mampu menimbulkan *multiplier* (pengganda) yang tinggi



bagi perekonomian wilayah. Pertumbuhan yang cepat dari suatu wilayah akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan. Sebagai akibat tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan, akan mempengaruhi perkembangan wilayah bersangkutan dan wilayah sekitarnya.

Untuk menumbuhkan perkembangan wilayah pedesaan dan kecamatan, kota kecamatan perlu dikembangkan sebagai titik pertumbuhan dan pelayanan kecil pedesaan, yang akan mengirimkan denyutan pembangunan ke wilayah sekitarnya. Selanjutnya pusat-pusat pertumbuhan tersebut dapat ditumbuhkan menjadi pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Terpadu Antar Desa (PPTAD), yaitu kota kecamatan dan desa-desa lainnya dalam wilayah kecamatan sesuai dengan potensi dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan pada potensi, sarana dan prasarana yang dimiliki desa maka dalam pengembangan desa diperlukan adanya kaitan yang saling mendukung antara desa satu dengan yang lainnya. Sektor informal merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan pada pusat pertumbuhan kecil pedesaan. Kegiatan di sektor informal ini merupakan peluang berusaha dan kesempatan kerja yang lain di luar sektor pertanian. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian, akan mengurangi pengangguran di pedesaan, meningkatkan pendapatan dan akhirnya akan mempercepat pertumbuhan wilayah.

Bentuk kegiatan dari sektor informal pedesaan antara lain kegiatan agroindustri skala kecil, jasa dan perdagangan. Karakteristik secara umum dari sektor ini menurut *International Labour Organisation (ILO)*, dalam Hanafiah (1988) adalah: (1) relatif mudah dimasuki, (2) berdasarkan pengembangan



sumberdaya lokal, (3) merupakan usaha keluarga, (4) berskala kecil, (5) padat karya dan mampu beradaptasi terhadap teknologi, (6) keterampilan biasanya diperoleh di luar pendidikan formal, (7) merupakan pasar yang tidak tetap dan bersaing.

Dengan demikian pengembangan kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan sosial pedesaan secara ekonomis akan menciptakan hubungan saling ketergantungan antara kota kecamatan dan desa-desa, melalui pengembangan sektor informal pedesaan.

2.4. Pembangunan Wilayah Pedesaan dan Pengembangan Kota Kecamatan

Pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nasional pada akhirnya akan meningkatkan kesenjangan antar wilayah (kota dan desa). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah perkotaan tidak mengimbas ke wilayah pedesaan dengan baik, bahkan menimbulkan aglomerasi kapital, alokasi sumberdaya dan migrasi dari desa ke kota yang akan menimbulkan efek yang negatif bagi pertumbuhan wilayah pedesaan. Hal ini disebabkan karena mekanisme *Spread effects* lebih kecil dari *back wash effect*.

Untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang kurang berkembang, yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan, perlu kiranya dikembangkan pusat pertumbuhan yang mampu mendorong perkembangan ekonomi wilayah, dengan menumbuhkan kegiatan ekonomi baru dan peningkatan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia. Ciri-ciri pedesaan di Indonesia, menurut Sumodiningrat (1987), meliputi ketergantungan ekonomi pada sektor pertanian, kepemilikan aset yang

kecil terutama lahan, sumber penghidupan lain selain pertanian adalah sektor informal pedesaan yang tidak pasti. Dengan demikian pengembangan sektor informal pedesaan sebagai salah satu sektor yang mampu menunjang perekonomian pedesaan, sangat diperlukan selain sektor pertanian. Untuk tujuan tersebut diperlukan pusat pertumbuhan dan pelayanan yang menyediakan fasilitas kebutuhan dasar dan fasilitas pendukung pertumbuhan ekonomi seperti fasilitas transportasi, pemasaran, komunikasi dan lain-lain.

Kebijaksanaan pembangunan wilayah yang ditempuh Indonesia adalah kebijaksanaan pembangunan wilayah pedesaan yang dilaksanakan secara terpadu. Menurut Ditjen PMD (1993), yang dimaksud terpadu adalah bahwa dalam kegiatan pembangunan ada: **(1) keterkaitan wilayah**, yaitu kegiatan pembangunan yang ada di desa satu atau kecamatan satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan utuh dalam rangka pembangunan daerah dan pembangunan nasional, **(2) keterkaitan fungsi**, yaitu ada keserasian kegiatan pembangunan antara satu sektor dengan sektor yang lain yang harus saling mendukung dan tidak berdiri sendiri-sendiri, **(3) keharmonisan**, artinya ada kesesuaian antara kebijaksanaan pemerintah dengan aspirasi masyarakat sehingga kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdasarkan potensi wilayah, **(4) keterpaduan waktu**, artinya urutan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan harus mengacu dan saling mendukung antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya, **(5) keterpaduan sasaran**, artinya semua kegiatan pembangunan mengacu pada kesamaan tujuan, yaitu tercapainya desa swasembada.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Berkaitan dengan pembangunan wilayah pedesaan, kota kecamatan memegang peranan yang sangat strategis untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan kecil pedesaan. Pengembangan kota kecamatan diharapkan mampu menggali potensi wilayah lokal dan menumbuhkan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi baru, menumbuhkan kegiatan agroindustri dan perdagangan di wilayah kecamatan.

Pengembangan kota kecamatan ini telah dirancang sedemikian rupa sehingga pelaksanaan program pembangunan di pedesaan benar-benar sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat, melalui sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Sistem UDKP adalah suatu sistem manajemen pembangunan pedesaan terpadu. Sistem ini memadukan program-program pembangunan dari berbagai sektor, instansi vertikal dan instansi otonom lainnya. Dengan demikian kota kecamatan menduduki fungsi sebagai pusat perencanaan pembangunan pedesaan dan pusat aglomerasi kegiatan sosial ekonomi di tingkat kecamatan.

Peranan kota kecamatan dalam pembangunan wilayah pedesaan berdasarkan letak dan posisinya terhadap desa-desa sekitarnya (Karjoredjo, 1989). Efektifitas fungsi kota kecamatan dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas jalan dan sarana transportasi antara desa dengan kota kecamatan dan dengan pusat-pusat lainnya.

Kelancaran transportasi antara dua daerah ini (kota dan desa) akan memperlancar arus barang dan jasa, baik dalam bentuk pemasaran hasil pertanian maupun dalam bentuk arus barang dari luar wilayah kecamatan. Menurut

Karjoredjo (1989), ada dua belas arah dan dampak arus barang dari kota ke desa dan sebaliknya, yaitu:

1. Keunggulan komparatif kota sangat kuat, sehingga terjadi aglomerasi ekonomi ke kota. Pengembangan kutub akan lebih menguntungkan kota.
2. Barang yang beredar di kota mempunyai kaitan ke belakang (*backward linkage*) di desa dan fasilitas di kota tidak hanya menguntungkan kota. Pengembangan kota akan lebih tepat sebagai pusat pelayanan.
3. Apabila perputaran barang di kota (pusat) menguntungkan ke dua belah pihak, maka pengembangan kutub akan merembes ke desa tanpa diikuti arus barang dari desa ke kota.
4. Arus dari desa ke kota hanya menguntungkan kota (pusat), sifat hubungan ini adalah ekstraktif. Pengembangan kota dapat dijadikan sebagai transit dari daerah pedesaan ke daerah yang lebih tinggi.
5. Desa telah memenuhi kebutuhan dengan barang sendiri dan sisanya dialirkan ke kota. Desa ini dapat dikembangkan sebagai pusat pelayanan daerah sendiri.
6. Arus dari desa ke kota menguntungkan daerah pedesaan dan proses pengembangan berlangsung dari bawah.
7. Surplus kota ke desa lebih menguntungkan kota (*Spread effect* kota lebih kecil dari *back wash effect*). Kedudukan kota lebih bersifat menghisap terhadap desa.
8. Bila surplus kota ke desa lebih menguntungkan desa kedudukan kota (pusat) lebih bersifat membagi terhadap desa.
9. Surplus kota untuk memenuhi kebutuhan desa dengan fasilitas perkotaan dan fasilitas pedesaan yang baik menyebabkan pengembangan dari atas ke bawah.



10. Perputaran barang atau transaksi terjadi di desa mempunyai kaitan ke muka di kota.
11. Perputaran barang atau transaksi terjadi di desa dan menguntungkan desa. Hal ini merupakan tanda efektifnya pengembangan agropolitan.
12. Perputaran barang di desa menguntungkan daerah pedesaan. Strategi pengembangan daerah ini sebaiknya adalah pengembangan wilayah pedesaan terpadu.

Dari segi bentuknya kutub pertumbuhan itu berupa titik (*growth point*), satuan desa atau *growth zone* atau daerah memanjang atau *growth axe*. Apabila kutub pertumbuhan berupa titik (*growth point*) maka tidak berpengaruh pada daerah sekitarnya. Bentuk *growth zone* akan berpengaruh pada daerah sekitarnya dan bentuk *growth axe* akan mempunyai pengaruh bertingkat. Menurut skalanya kutub pertumbuhan dinyatakan dalam jumlah penduduk yang tinggal di kota yang bersangkutan (Berri (1961) dalam Karjoredjo (1989). Menurut Klassen (1969) dalam Karjoredjo (1989), besarnya kutub mempunyai batas minimal dan batas maksimal agar berfungsi secara optimal, mengingat adanya biaya sosial (eksternalitas negatif) dari kota besar.

Dengan demikian pengembangan kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan harus memperhatikan hubungan dengan desa-desa sekitarnya agar mempunyai dampak positif terhadap perkembangan wilayah pedesaan. Selain itu ukuran skala minimum dan skala maksimum juga harus dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas fungsi kutub (pusat) pertumbuhan.



2.5. Definisi dan Fungsi Kota

Pendefinisian kota yang banyak dilaksanakan didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain (1) berdasarkan ukuran jumlah penduduk pada daerahnya, (2) memiliki kepadatan minimum tertentu, (3) memiliki pola dasar dan struktur yang padat, yang nampak dari tersedianya fasilitas transportasi dan adanya ruang kota, (4) memiliki ruang tempat tinggal dan tempat kerja, dimana orang dapat tinggal dan bekerja, (5) memiliki sejumlah fasilitas sosial ekonomi minimum tertentu seperti pasar, pusat keagamaan, pusat politik dan lain-lain, (6) adanya heterogenitas masyarakat, (7) adanya pusat ekonomi yang menghubungkan hinterland pertanian dan kegiatan mengolah bahan mentah, (8) merupakan pusat pelayanan bagi daerah sekitarnya.

Menurut buku Repelita VI kota adalah suatu wilayah geografis, tempat bermukim sejumlah penduduk dengan tingkat kepadatan yang relatif tinggi yang memiliki kegiatan utama di luar sektor pertanian. Pendefinisian "desa kota" menurut Biro Pusat Statistik (BPS), yaitu suatu desa yang memiliki kepadatan penduduk minimal 5.000 jiwa per km², memiliki persentase rumahtangga tani sama atau lebih kecil dari 25 persen dan memiliki sedikitnya delapan dari fasilitas berikut: SD, SLTP, SLTA, gedung bioskop, rumah sakit, puskesmas/klinik/balai pengobatan, jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor, jaringan telepon/kantor pos/kantor pos pembantu, pasar dengan bangunan, kelompok pertokoan, bank, pabrik, rumah makan, listrik PLN.

Penentuan fungsi kota didasarkan pada penentuan fungsi kota yang dikeluarkan oleh NUDS (*National Urban Development Strategy*) dalam Agustina (1996), meliputi:



a. Pusat pelayanan wilayah belakang (*Hinterland Service*)

Kota melayani wilayah belakang melalui penyediaan fasilitas sosial ekonomi dan penyediaan prasarana pembangunan. Fungsi pelayanan kota tidak hanya tergantung pada kemampuan kota tetapi dipengaruhi juga oleh kemampuan wilayah belakang dalam memproduksi barang-barang yang akan dikonsumsi, yang meliputi hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan yang akan diangkut ke kota yang menyediakan fasilitas pemasaran dan sarana produksi pertanian.

b. Penghubung antar daerah (*Interregional Communication*)

Sebagai penghubung antar daerah, kota merupakan tempat transit dari arus barang yang diproduksi oleh wilayah belakang dan yang akan masuk ke wilayah tersebut. Kota yang mempunyai fungsi seperti ini pada umumnya memiliki pelabuhan dan memiliki fasilitas pemasaran, transportasi dan komunikasi yang baik. Kota seperti ini mendapat dukungan yang kuat dari wilayah belakang.

c. Memproduksi barang-barang (*Goods Processing atau Manufacturing*)

Kota dengan fungsi ini dicirikan dengan tersedianya fasilitas produksi seperti pabrik, kawasan industri, serta didukung fasilitas transportasi, komunikasi dan fasilitas kredit.

d. Daerah Pinggiran (*Residential Subcenters*)

Kota yang mempunyai fungsi sebagai daerah pinggiran merupakan kota penyangga dari kota lain yang lebih besar. Karena perkembangan kota yang lebih besar maka, masyarakat akan memilih lokasi tempat tinggal pada kota-kota disekitarnya yang lebih kecil, dan bekerja pada pusat kota. Munculnya kota pinggiran biasanya disebabkan karena efek deglomerasi dari pertumbuhan kota metropolitan.

Penentuan fungsi kota juga dapat dilaksanakan dengan mendasarkan pada aktifitas yang dominan yang terjadi di suatu kota, misalnya kota perdagangan, kota pelajar, kota industri, kota pariwisata dan lain-lain. Pada kenyataannya suatu kota memiliki fungsi yang sangat banyak, yang berjalan bersama-sama. Karena itu sulit untuk menentukan fungsi kota secara spesifik.

Untuk keperluan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan perkotaan, fungsi kota dapat dibedakan menjadi empat, berdasarkan luas dan ruang lingkup peranannya dalam menunjang pertumbuhan wilayah dan fungsi pelayanan kota terhadap masyarakat dan wilayah belakangnya. Keempat tingkatan fungsi kota tersebut adalah:

- a. **Pusat kegiatan nasional** adalah daerah perkotaan yang memiliki wilayah pelayanan berskala nasional. Kota ini pada umumnya merupakan pintu gerbang arus barang dan jasa dan merupakan simpul perdagangan internasional, merupakan pusat pelayanan jasa, produksi, distribusi dan memiliki fasilitas transportasi yang lengkap.
- b. **Pusat kegiatan wilayah** adalah kota yang memiliki wilayah layanan yang mencakup beberapa kawasan atau kabupaten. Kota ini merupakan pusat pelayanan jasa, produksi dan distribusi.
- c. **Pusat kegiatan lokal** yaitu kota yang memiliki wilayah layanan terdiri dari beberapa kawasan dalam kabupaten yang pada umumnya merupakan kota sedang atau kota kecil.
- d. **Fungsi khusus dalam menunjang sektor ekonomi tertentu** yaitu kota yang memiliki fungsi pelayanan khusus dalam menunjang pengembangan sektor strategis, menunjang pengembangan wilayah, penyebaran kegiatan ekonomi,



dan berfungsi juga sebagai daerah penyangga dari pertumbuhan kota yang sudah ada.

Dengan diketahuinya fungsi kota, dapat disusun rencana pengembangan kota dan penyusunan kebijaksanaan yang lebih terarah dan sesuai untuk masing-masing pusat pengembangan.

2.6. Sistem Pasar dalam Pengembangan Wilayah

Pasar dapat diartikan sebagai tempat atau lokasi dimana penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Dengan demikian sistem pasar menyangkut mekanisme hubungan antar pasar yang berkaitan transportasi, arus barang antar pasar, arus informasi harga, manajemen tata niaga dan pergerakan pasar.

Menurut Maulidian (1993), dalam skala mikro, pasar merupakan juga terminal dari macam-macam angkutan. Dalam skala makro pasar merupakan suatu pusat transportasi dimana sistem aliran barang dan jasa didistribusikan.

Menurut Smith (1976) dalam Setiawan (1995), terdapat dua pandangan mengenai pasar dalam konteks yang lebih luas. Pertama, memandang keseimbangan pasar terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang akan membentuk keseimbangan. Sistem ini akan mengatur mekanisme pengalokasian barang dan sumberdaya yang langka melalui mekanisme harga. Distribusi dan alokasi sumberdaya akan mengarahkan pada spesialisasi dan mengintensifkan pertukaran. Pandangan kedua menyatakan bahwa pasar adalah suatu aktifitas manusia yang tidak alami dan membutuhkan kondisi yang spesifik untuk berkembang. Hal ini berarti membutuhkan kekuatan dari luar sistem ekonomi domestik.



Menurut Smith (1976) dalam Setiawan (1995), kedua pandangan di atas bila dipadukan dengan teori Tempat Sentral justru sangat berguna untuk menelaah sistem pasar dalam tata ruang. Berdasarkan Teori Tempat Sentral Christaller, perbedaan kelas akan menumbuhkan pertukaran dan pusat kota akan merangsang munculnya pasar-pasar desa. Kekuatan sosial politik sebagai kekuatan dari luar sistem ekonomi domestik akan menciptakan kondisi yang dibutuhkan oleh sistem pasar untuk berkembang dan sistem harga akan menunjang perkembangannya.

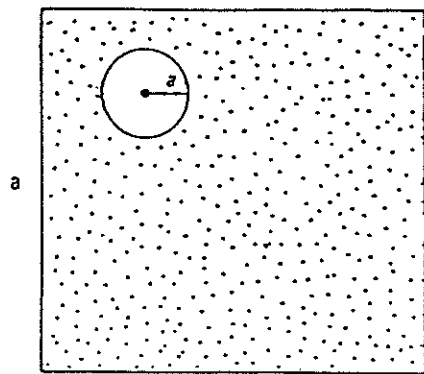
Aktifitas pasar dan sistem pasar akan ditunjang oleh tersedianya fasilitas transportasi yang menghubungkan pusat-pusat pemukiman sehingga akan terbentuk jalur-jalur perdagangan yang berupa jalan antara kedua daerah tersebut. Pada lokasi-lokasi tertentu dari jalur jalan utama tersebut akan terbentuk pasar, yaitu pada lokasi yang strategis. Dengan demikian pasar ini terbentuk karena kekuatan lokasi.

Berdasarkan Teori Tempat Sentral dapat dianalisis sistem pasar dan struktur hirarkhi pasar sebagai pusat aktifitas ekonomi. Dalam analisa ini Chisrtaller mendasarkan pada asumsi bahwa daerah analisis berupa dataran yang rata, memiliki sumberdaya alam yang menyebar secara merata dan penduduk juga menyebar secara merata. Penduduk juga diasumsikan sebagai petani. Apabila seorang petani membuka toko untuk melayani daerah sekitarnya, penduduk yang lain bersedia menempuh jarak tertentu untuk memperoleh pelayanan dari pusat tersebut. Semakin jauh jarak yang harus ditempuh maka kemanfaatan dari pusat tersebut akan menurun karena meningkatnya biaya transportasi, sampai pada jarak tertentu penduduk tidak bersedia lagi untuk menempuh jarak tersebut dan akan mencari pusat pelayanan yang lain. Jarak

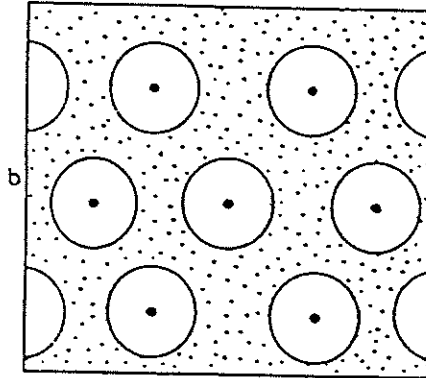


maksimum yang bersedia ditempuh oleh penduduk untuk memperoleh pelayanan dari pusat tersebut disebut jangkauan pasar (*market range*). Apabila radius jangkauan pasar ini bertambah karena penemuan teknologi baru dan penurunan biaya produksi dan biaya transportasi, akan terjadi tumpang tindih pelayanan pada wilayah tersebut. Konsumen pada wilayah ini dilayani oleh lebih dari satu tempat sentral. Bila diasumsikan penduduk adalah rasional, akan memilih pusat pelayanan dengan jarak terdekat, maka akan terbentuk wilayah berbentuk heksagonal di sekitar tempat sentral, yang merupakan wilayah layanannya.

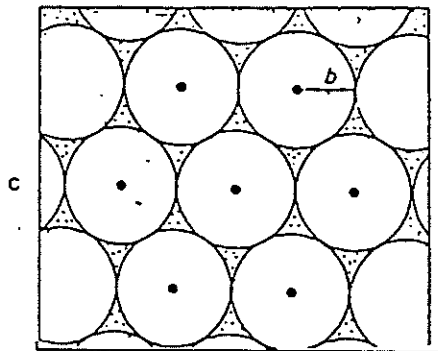
Berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani dan jangkauan pasar (*market range*) dari suatu tempat sentral akan terbentuk suatu hirarkhi tempat sentral dari ordo tertinggi sampai ordo terendah. Tempat sentral dengan ordo terendah mempunyai wilayah layanan dan jangkauan pasar yang paling sempit dan tempat sentral yang memiliki ordo tertinggi memiliki wilayah layanan terluas dengan jangkauan pasar juga paling luas. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 1.



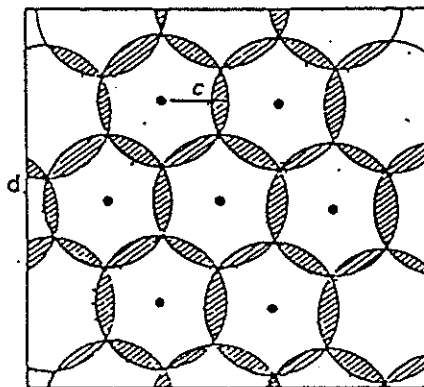
Gambar 1.a. Untuk berbagai keperluan, rumahtangga dan produksi, petani mempunyai area pasar dengan radius tertentu yaitu a .



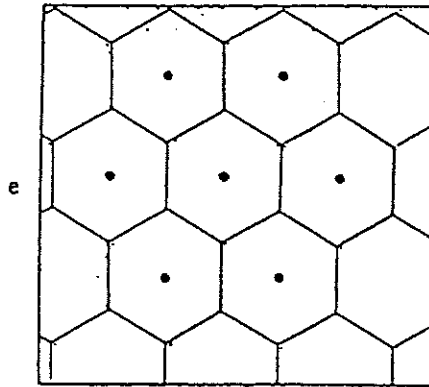
Gambar 1.b. Petani lain juga demikian halnya, yaitu mempunyai masing-masing radius pasar, lebih kurang sama dengan a .



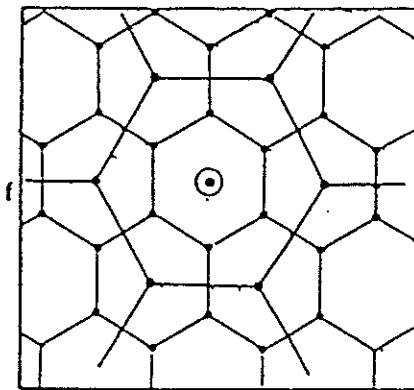
Gambar 1.c. Petani-petani yang mempunyai radius lebih besar dari a , misalnya b , akan memperhitungkan ongkos. Timbul persaingan tata ruang diantara yang melakukan kegiatan pelayanan. Pada tahap ini tidak semua pasar dapat dilayani.



Gambar 1.d. Bila diasumsikan bahwa fasilitas transportasi dan komunikasi menjadi lebih baik, maka jarak jelajah menjadi c dan area pasar menjadi lebih luas. Area pasar menjadi tumpang tindih, penduduk yang tinggal di area ini mempunyai beberapa pasar.



Gambar 1.e. Penduduk yang tinggal di area pasar yang tidak tumpang tindih hanya mempunyai satu pasar. Secara rasional terdapat perhitungan biaya transpor minimum, maka akan timbul area pasar heksagonal di sekitar tempat sentral; disebut juga sistem sarang lebah.



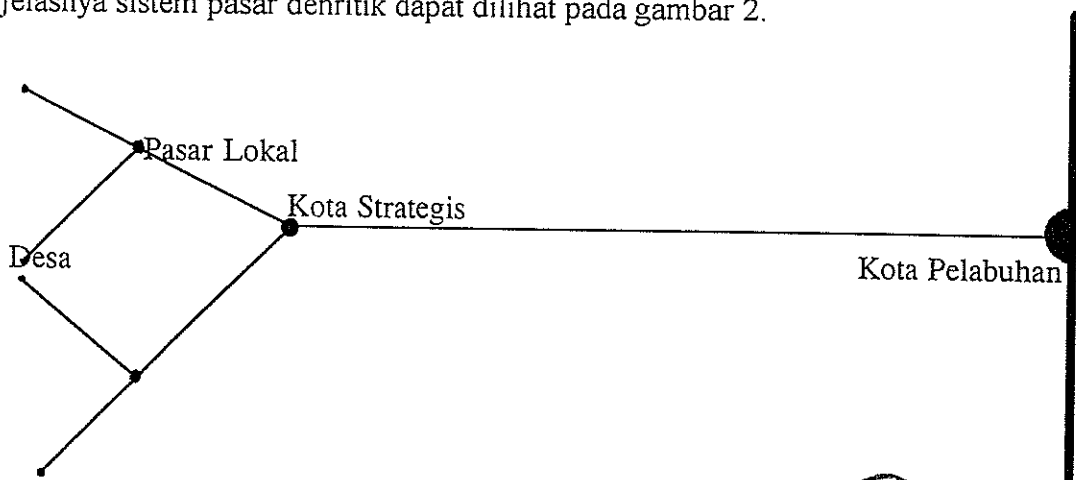
Gambar 1.f. Berdasarkan area pasar heksagonal ini, yaitu berdasarkan efisiensi sistem pelayanan, timbul sistem TS dengan orde tinggi dan orde rendah.

- | | |
|----------------------------|-------------|
| : Area yang tidak dilayani | : A Kota |
| : Area pasar tumpangtindih | : B Desa |
| | : C Kampung |

Gambar 1. Perkembangan hirarkhi Tempat Sentral

Dalam struktur tata ruang wilayah, sistem pasar dibagi menjadi dua yaitu sistem pasar **denritik** dan sistem pasar **intermeshed**. Dalam sistem pasar *denritik* ada tiga komponen utama yaitu: (1) kota pelabuhan (*port city*) yang merupakan pusat konsumsi, pusat ekspor dan impor dan biasanya merupakan ibukota nasional, (2) kota strategis (*strategic city*) dan (3) pasar-pasar lokal yang tersebar. Pasar lokal ini tergantung pada kota strategis dalam hal transportasi, pengolahan dan kredit.

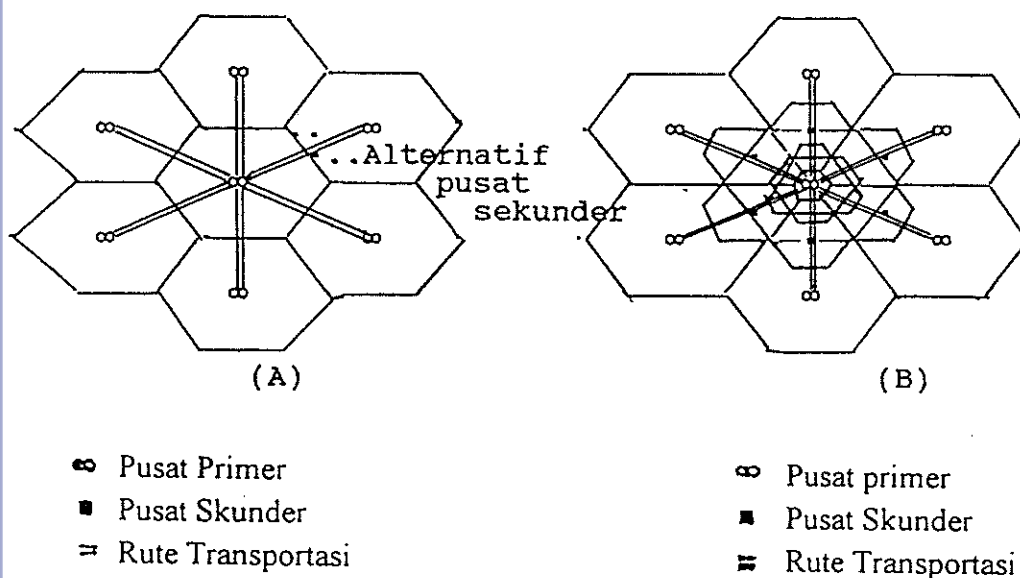
Implikasi ekonomi dari sistem pasar denritik, menurut Smith (1976) dalam Setiawan (1995), adalah: (1) karena hanya terdapat satu pusat maka pusat yang lebih tinggi akan memiliki kemampuan untuk menekan harga-harga komoditi pertanian dan menjual komoditi non pertanian dengan harga yang tinggi. Dengan demikian nilai tukar sektor pertanian tergantung pada pusat kota, (2) karena semua barang harus melalui kota pelabuhan, akan terjadi inefisiensi dalam distribusi barang kebutuhan masyarakat, (3) petani yang berlokasi dekat dengan kota pelabuhan (*inner zone*) akan memperoleh keuntungan dalam memasarkan produk yang dihasilkan dan sebaliknya untuk petani yang jauh dari kota pelabuhan. Lebih jelasnya sistem pasar denritik dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Komponen Utama Pasar Denritik
Sumber : ESCAP, 1979 dalam Setiawan 1995.



Model sistem pasar yang kedua adalah sistem pasar intermeshed. Model ini menyatakan bahwa timbulnya pasar diawali dengan adanya pertukaran pada suatu daerah yang terisolasi dan memiliki spesialisasi yang terbatas. Daerah tersebut kemudian mengadakan hubungan dengan daerah lain yang berdekatan. Akibatnya terjadi perluasan pasar yang menyebabkan munculnya ekspansi penduduk atau bertambahnya sektor domestik yang dipertukarkan. Jika diasumsikan distribusi produksi dan konsumen homogen serta konsumen rasional dengan meminimisasi biaya perjalanan maka dapat diperkirakan akan terbentuk pola heksagonal yang merupakan wilayah pelayanan suatu pusat. Pusat akan dihubungkan antara satu dengan yang lainnya melalui sistem jalan dan transportasi yang memencar dari enam buah pusat lainnya. Pada tahap ini pertukaran yang terjadi mungkin rendah tetapi areal permintaan akan meningkat oleh pengaturan pasar secara temporal. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Perkembangan Sistem pasar intermeshed
 Sumber : Schwimmer, 1976 dalam Setiawan, 1995.

Perkembangan selanjutnya akan mendorong timbulnya pusat-pusat baru. Ketika pusat skunder muncul pusat-pusat sebelumnya akan mempunyai fungsi tambahan. Pasar sentral dengan level paling tinggi akan menyediakan barang dan jasa dengan orde tinggi dan akan menampilkan fungsi grosir yang meliputi redistribusi spesialisasi lokal. Pasar sentral juga mempunyai peranan dalam menciptakan perdagangan antar negara (ekspor dan impor).

Menurut Maulidian (1993), pasar sebagai salah satu fasilitas pelayanan dalam suatu pemukiman, sifatnya melayani penduduk dalam pemukiman tersebut. Semakin besar jumlah penduduk yang dilayani akan semakin kompleks keadaan pasar tersebut. Kekompleksan keadaan pasar terlihat dari intensitas kegiatan pasar, ragam dan volume barang yang diperdagangkan.

Menurut Johnson (1976) dalam Maulidian (1993), salah satu bentuk nyata intensitas kegiatan pasar adalah waktu berlangsungnya kegiatan pasar tersebut. Menurut frekwensi kegiatan pasar, pasar dapat dibedakan menjadi pasar tetap dan pasar tidak tetap atau pasar periodik. Frekwensi kegiatan pasar ini berhubungan dengan pola konsumsi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat wilayah layanannya.

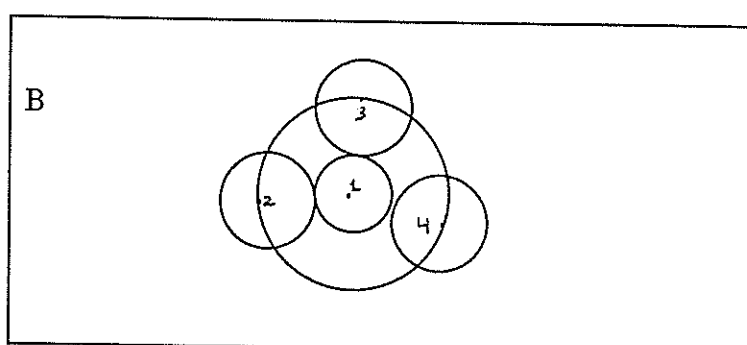
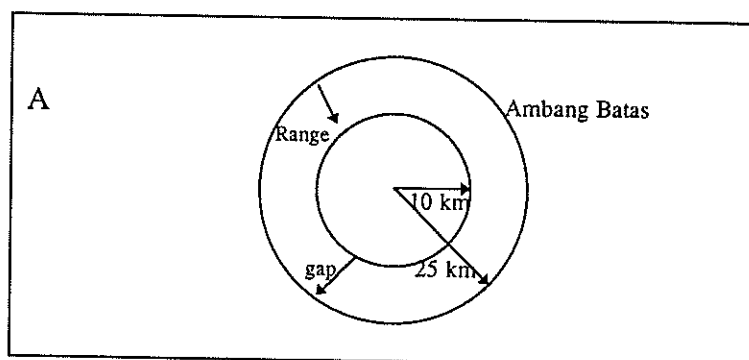
1. Pasar tetap, yaitu pasar yang relatif besar ukurannya dimana penduduk dapat membeli segala keperluannya dan menjual hasil-hasil produksinya setiap hari. Pasar ini mempunyai wilayah pengaruh berdasarkan prinsip sentralitas, pusat persimpangan, transportasi dan aksesibilitas yang baik, misalnya pasar kecamatan.
2. Pasar tidak tetap atau pasar periodik, yaitu pasar yang hanya terdapat 1 - 3 kali dalam satu minggu, relatif kecil, komoditi yang diperjualbelikan juga terbatas

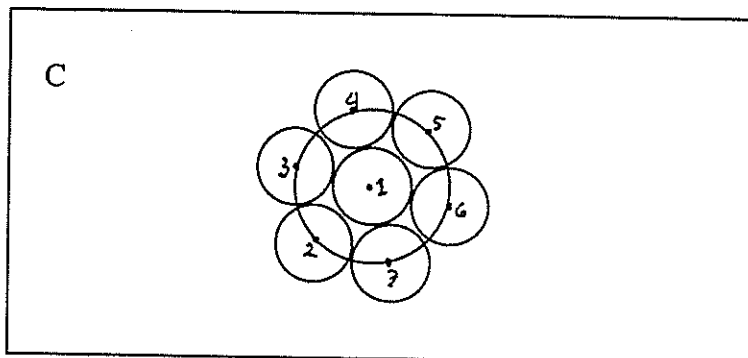


dan pasar ini bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan pola tertentu.

Pasar periodik ini mempunyai radius 3-6 km di sekitar desa.

Adanya pasar periodik ini membuat penjual dapat menjual dagangannya lebih banyak dari pada ia menetap pada lokasi tertentu. Dari pergerakan pedagang tersebut dapat ditentukan hari kegiatan pasar pada suatu tempat. Pergerakan pedagang ini dapat terjadi jika ada koordinasi antar pedagang untuk membentuk suatu pola pergerakan pasar dari satu tempat ke tempat lain, sehingga terbentuk pola pergerakan pasar periodik yang teratur. Pergerakan pasar ini tergantung pada adanya gap atau celah ruang yang belum mendapat pelayanan. Semakin banyak celah, akan semakin banyak tempat yang dijadikan lokasi pasar periodik. Gambar berikut memperlihatkan contoh pergerakan pasar periodik dalam satu minggu.





Gambar 4. Pola Pergerakan Pasar Periodik

Keterangan: Range bagi suatu usaha yang menjual barang atau jasa adalah jarak maksimum rata-rata penduduk yang datang. Angka 1 sampai 7 menunjukkan urutan pergerakan pedagang penjual.

Sumber : Able, Ronald, Adams, John S (1971) dalam Maulidian (1993).

Sebagai pusat kegiatan ekonomi, pasar memperlancar kegiatan produksi, pasar juga menyediakan kebutuhan modal, alat pertanian, tenaga kerja dan barang-barang konsumsi yang diproduksi oleh daerah lain. Selain itu pasar juga berfungsi mendistribusikan barang-barang kebutuhan masyarakat. Dengan demikian keberadaan pasar dalam struktur tata ruang wilayah akan memperlancar aktifitas perekonomian masyarakat di daerah tersebut.

Faktor utama yang berperan dalam berlangsungnya kegiatan pasar adalah adanya jaringan jalan dan fasilitas transportasi. Mobilitas orang, barang dan jasa juga sangat tergantung pada ada tidaknya fasilitas transportasi ini. Dengan demikian perkembangan pasar yang berarti perkembangan ekonomi wilayah merupakan fungsi dari jaringan jalan dan sarana transportasi.

Penelaahan terhadap fungsi ekonomi kota kecamatan dalam pembangunan wilayah didasarkan pada teori-teori tata ruang wilayah. Dengan demikian penelaahan didasarkan pada posisi kota kecamatan dalam hirarkhi pusat pelayanan,

sesuai dengan teori Tempat Sentral. Disamping itu dilihat dari aspek struktur tata ruang wilayah, kota kecamatan akan berfungsi sebagai pusat aglomerasi kegiatan sosial ekonomi dari masyarakat dan desa-desa sekitarnya. Aglomerasi kegiatan ekonomi masyarakat akan menciptakan skala ekonomis yang akan meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan kota tersebut. Pertumbuhan yang cepat pada kota kecamatan akan menarik kegiatan ekonomi desa sekitarnya dan mengimbaskan pengaruh pertumbuhan ke wilayah-wilayah belakangnya, sesuai dengan konsep pusat pertumbuhan dan kutub pertumbuhan.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

III. KERANGKA PEMIKIRAN

3.1. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan program pembangunan bertujuan untuk mencapai kondisi yang lebih baik, yaitu tercapainya kondisi masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil secara merata. Pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumberdaya, baik sumberdaya alam seperti air, tanah, flora dan fauna, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan yaitu sarana, teknologi, kelembagaan dan modal.

Masalah pemanfaatan sumberdaya yang paling pokok adalah ketidakmerataan penyebaran sumberdaya, dan mobilitas sumberdaya yang tidak sempurna, sehingga menyebabkan perbedaan potensi antar wilayah. Perbedaan potensi wilayah menyebabkan pertumbuhan wilayah tidak merata. Ketidakmerataan pertumbuhan wilayah ini diperkuat dengan kegiatan investasi yang cenderung terpusat pada wilayah-wilayah yang mempunyai potensi tinggi dan wilayah-wilayah yang relatif sudah berkembang.

Perbedaan potensi sumberdaya serta perbedaan pertumbuhan wilayah menyebabkan ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan antar sektor. Ketimpangan antar wilayah akan menyebabkan adanya wilayah maju, wilayah berkembang dan wilayah kurang berkembang. Sedang ketimpangan antar sektor menyebabkan dominasi sektor-sektor tertentu dalam perekonomian wilayah tersebut.

Masalah pemerataan pembangunan telah lama mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Usaha pemerataan pembangunan dilaksanakan melalui usaha mengembangkan wilayah/daerah yang kurang atau tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

berkembang. Mengingat sebagian besar wilayah ini berada pada wilayah pedesaan maka pengembangan wilayah yang kurang berkembang ini berkaitan dengan pengembangan wilayah pedesaan.

Penerapan pendekatan pusat - *pheripery* yang mempertimbangkan hubungan fungsional antara kota dengan desa, telah mendapat perhatian yang besar. Pengembangan daerah belakang dapat dilaksanakan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan yang akan menjadi pusat kegiatan investasi dan kegiatan ekonomi, yang mendorong pertumbuhan daerah belakang, juga berfungsi sebagai penghantar pertumbuhan kota yang hirarkhinya lebih tinggi ke daerah yang mempunyai hirarkhi lebih rendah. Kaitannya dengan pembangunan pedesaan kota kecamatan merupakan tempat strategis sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan, dengan penyediaan fasilitas sosial ekonomi.

Kecamatan ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan kecil, dengan pertimbangan bahwa pemerintahan di tingkat kecamatan yang paling dekat dengan masyarakat dan merupakan unit wilayah yang cukup luas untuk satu unit pengembangan. Disamping itu adanya jumlah penduduk yang cukup untuk mendukung penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi.

Penentuan jumlah dan lokasi fasilitas sosial ekonomi akan mempengaruhi tingkat efektifitas fasilitas tersebut. Penentuan lokasi fasilitas pelayanan harus mempertimbangkan: (1) ambang batas penduduk dan (2) jangkauan dari fasilitas tersebut. Ambang batas penduduk adalah jumlah penduduk minimum untuk mendukung tersediaya fasilitas tertentu. Apabila jumlah penduduk kurang dari nilai ambang batas ini maka fasilitas tersebut tidak ada. Setiap jenis fasilitas



memerlukan ambang batas penduduk yang berbeda. Jangkauan fasilitas merupakan luas wilayah yang mampu dilayani oleh suatu fasilitas pelayanan. Untuk masyarakat yang di luar jangkauan suatu fasilitas pelayanan akan mencari fasilitas pelayanan yang lain.

Fasilitas pelayanan ekonomi pasar memegang peranan penting dalam menunjang pertumbuhan wilayah. Peningkatan produksi pertanian, peningkatan lapangan usaha, memerlukan fasilitas untuk memasarkan produknya. Disamping itu peningkatan pendapatan masyarakat karena berbagai program pembangunan akan meningkatkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa baik jumlah maupun ragamnya. Pasar dalam hal ini merupakan sarana pertukaran dalam memasarkan produk wilayah tersebut dan untuk memperoleh barang dan jasa dari luar.

Aktifitas pasar memerlukan penyediaan sarana transportasi untuk kelancaran peredaran barang dan jasa. Dengan demikian perkembangan pasar ini tidak terlepas dari perkembangan dan penyediaan fasilitas sosial ekonomi yang lainnya. Aktifitas ekonomi pasar akan membentuk struktur permintaan produksi daerah sekitarnya dan tenaga kerja, disamping membentuk kekuatan penawaran untuk barang dan jasa dari daerah lain. Aktifitas pasar akan merangsang dan menumbuhkan aktifitas produksi barang dan jasa yang memanfaatkan sumberdaya lokal, sehingga menunjang pertumbuhan dalam bentuk peningkatan pendapatan dan nilai tambah produk.

Untuk menentukan lokasi fasilitas pelayanan yang tepat, perlu dilakukan:

- (1) pengidentifikasian hirarki struktur tata ruang wilayah, (2) identifikasi



pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan serta (3) identifikasi potensi wilayah. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan efektifitas fasilitas sosial ekonomi agar seluruh masyarakat mampu memanfaatkan fasilitas yang ada, sehingga mendorong pertumbuhan wilayah. Pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerangka pemikiran yang telah diuraikan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

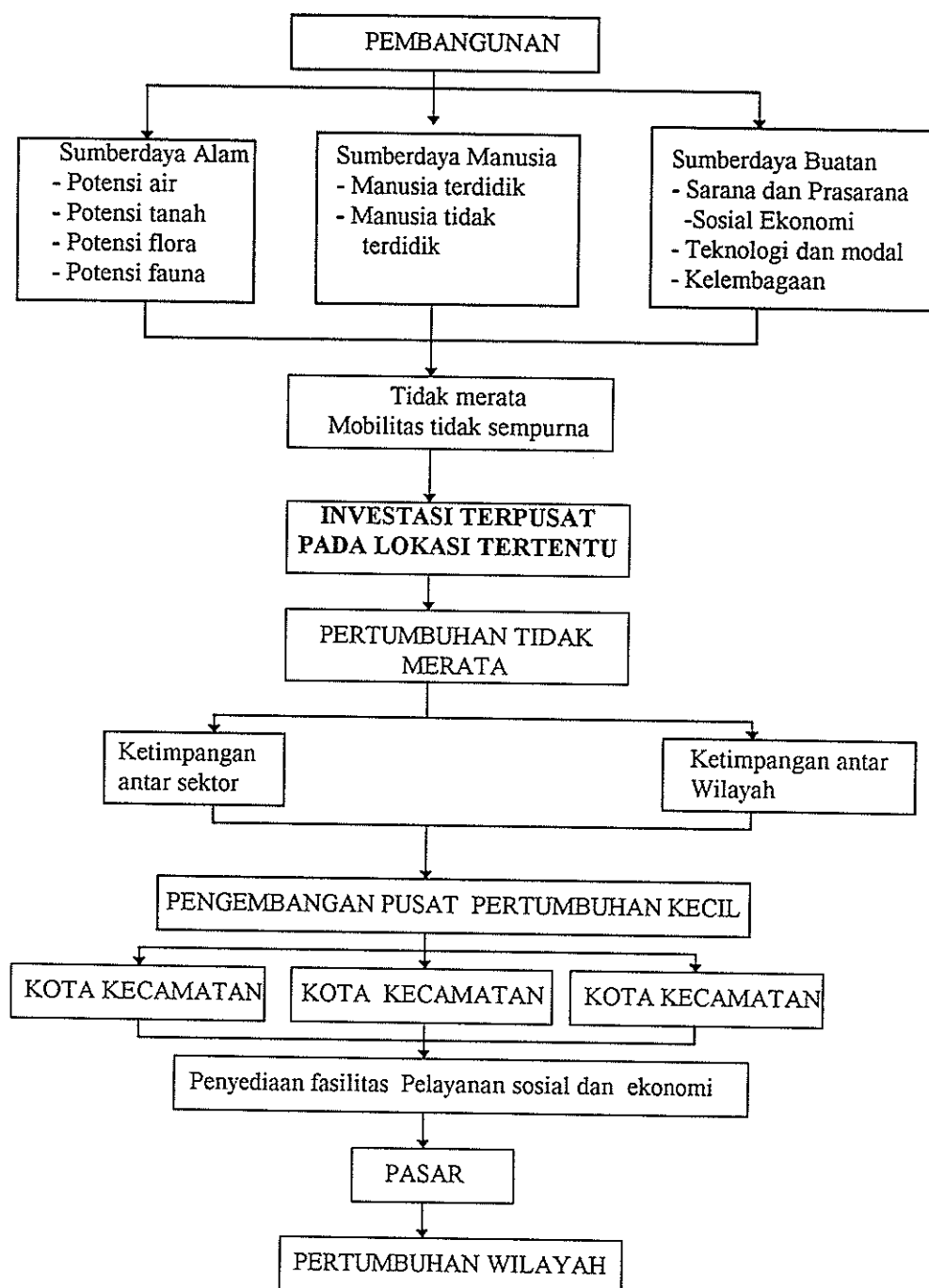
@Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 5. Kerangka Pemikiran Analisis Fungsi Ekonomi Kota Kecamatan dalam Pembangunan Wilayah

3.2. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Konsentrasi penduduk pada kota kecamatan dan konsentrasi kegiatan ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap perekonomian desa-desa sekitarnya.
2. Aksesibilitas kota kecamatan terhadap kota kabupaten dan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi pada kota kecamatan mempunyai pengaruh positif terhadap fungsi ekonomi kota kecamatan.
3. Aktifitas dan volume pasar dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Secara lebih terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hipotesis 1. Konsentrasi penduduk dan konsentrasi kegiatan ekonomi pada kota kecamatan mempunyai pengaruh positif terhadap perekonomian desa-desa sekitarnya.

Wilayah yang tumbuh dengan pesat akan menarik wilayah-wilayah sekitarnya ke dalam pertumbuhan wilayah tersebut, melalui kekuatan aglomerasi. Hal ini dikarenakan adanya keuntungan skala ekonomis yang ditimbulkan dari kegiatan yang bersifat terpusat, disamping adanya kecenderungan kegiatan manusia untuk mengelompok. Dengan demikian, kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan kecil pedesaan akan menarik kegiatan ekonomi wilayah pedesaan sekitarnya, dalam bentuk arus modal, arus barang dan jasa serta pola perpindahan penduduk baik yang bersifat permanen maupun yang bersifat sirkuler.

Konsentrasi kegiatan ekonomi di kota kecamatan akan menumbuhkan skala ekonomis pada unit-unit usaha karena didukung adanya fasilitas komunikasi,



transportasi dan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang lain, seperti lembaga keuangan sarana pendidikan, pelayanan administrasi dan lain-lain. Kegiatan ekonomi yang terpusat ini akan merembes ke wilayah-wilayah sekitarnya dalam bentuk arus barang, arus orang, arus kapital, arus informasi dari kedua daerah tersebut. Arus dari desa ke kota meliputi arus pemasaran produk pertanian, arus tenaga kerja. Sedangkan arus sebaliknya bisa berupa arus barang kebutuhan masyarakat, baik barang baku untuk produksi maupun barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh daerah luar.

Kota kecamatan juga merupakan pusat konsentrasi pemukiman penduduk. Hal ini dikarenakan masyarakat akan cenderung memilih lokasi pemukiman yang optimal dari fasilitas sosial ekonomi yang tersedia. Konsentrasi penduduk ini akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga meningkatkan aktifitas perekonomian wilayah tersebut. Pertumbuhan yang cepat pada kota kecamatan juga akan merangsang kreatifitas kewirausahaan dari masyarakat, yang akan menumbuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi baru misalnya kegiatan produksi, pengolahan hasil pertanian yang akan menghasilkan nilai tambah produk pertanian. Kegiatan pengolahan ini merupakan kegiatan pengolahan dalam skala rumah tangga.

Sirkulasi barang dan jasa serta timbulnya kegiatan ekonomi akan memberikan efek pada daerah belakangnya dalam bentuk peningkatan pendapatan dan kondisi pedesaan yang lebih dinamis.

Alat analisis untuk menguji hipotesis ini adalah analisis skor skalogram, analisis tabulasi perbandingan dan deskriptif. Analisis skor skalogram digunakan



untuk menunjukkan bahwa kota kecamatan merupakan pusat konsentrasi fasilitas sosial ekonomi dan pusat pemukiman penduduk. Data fasilitas sosial ekonomi diambil dengan unit terkecil desa pada kecamatan contoh. Data tabulasi meliputi data kegiatan perekonomian desa-desa pada kecamatan contoh, dan variabel yang menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat. Variabel yang dianalisis dapat dilihat pada tabel data analisis. Studi perbandingan dilakukan pada ketiga kecamatan contoh yang dipilih berdasarkan metode pengambilan contoh.

Hipotesis 2. Aksesibilitas kota kecamatan terhadap kota kabupaten dan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi pada kota kecamatan mempunyai pengaruh positif terhadap fungsi ekonomi kota kecamatan.

Salah satu fungsi kota kecamatan adalah sebagai penghantar pertumbuhan dan perkembangan kota kabupaten ke desa-desa. Semakin tinggi aksesibilitas kota kecamatan, terhadap kota kabupaten akan semakin besar denyutan pertumbuhan yang dihantarkan oleh kota kecamatan dan semakin besar pengaruh kota kabupaten yang sampai ke desa-desa. *Spread effects* pertumbuhan kota akan semakin besar dan akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan wilayah-wilayah belakangnya. Aksesibilitas kota kecamatan terhadap kota kabupaten yang tinggi akan memperlancar arus barang dan jasa antara kedua daerah tersebut, disamping itu arus informasi juga akan makin lancar. Aksesibilitas kota kecamatan terhadap kota kabupaten dapat dinyatakan dalam jarak antara pusat kota kecamatan terhadap pusat kota kabupaten, waktu yang diperlukan untuk mencapai kota kabupaten, biaya transportasi, sarana transportasi serta kondisi jalan yang menghubungkan kedua kota tersebut.

Adanya hubungan saling menguntungkan antara fasilitas sosial ekonomi yang satu dengan yang lainnya, akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas fungsi pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dalam menjalankan fungsinya. Investasi akan lebih murah dan memungkinkan pembangunan sistem jalan yang menghubungkan wilayah belakang dengan pusat atau menghubungkan antara pusat yang satu dengan pusat yang lain. Dengan demikian akan membuka isolasi wilayah dan memperlancar arus barang dan jasa baik dari wilayah bersangkutan ke luar atau sebaliknya, atau mobilitas di dalam wilayah kecamatan tersebut.

Analisis hipotesis ini dilakukan melalui analisis tabulasi mengenai variabel yang mempengaruhi aksesibilitas kota kecamatan terhadap kota kabupaten pada ketiga kecamatan contoh, kemudian dilakukan studi perbandingan pada tiga kecamatan contoh mengenai kondisi perekonomian masyarakat, dengan variabel sama dengan variabel yang digunakan pada uji hipotesis satu.

Hipotesis 3. Aktifitas dan volume pasar dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pasar merupakan pusat aktifitas perekonomian masyarakat, selain berfungsi sebagai tempat komunikasi dan informasi. Peranan utama pasar adalah dalam kegiatan ekonomi masyarakat yaitu sebagai tempat pertukaran komoditi baik yang dihasilkan dalam wilayah tersebut maupun yang dihasilkan dari wilayah lain. Dengan demikian pasar merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah. Pasar akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah, melalui penciptaan nilai tambah produk dan pembukaan peluang berusaha dan kesempatan

kerja. Sektor pasar ini merupakan pendorong utama berkembangnya sektor informal pedesaan.

Aktifitas pasar dipengaruhi oleh kondisi perekonomian masyarakat wilayah yang dilayani, kebutuhan masyarakat, dan jumlah penduduk yang dilayani. Kondisi sosial ekonomi yang lebih baik akan menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa yang lebih beragam dan lebih banyak jumlahnya. Dengan demikian suatu masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik menuntut penyediaan barang dan jasa yang lebih banyak dan lebih beragam. Besarnya permintaan masyarakat dan besarnya jumlah penduduk yang dilayani akan mempercepat arus barang dan jasa.

Permintaan yang kecil dan jumlah penduduk yang dilayani oleh pasar yang kurang menyebabkan timbulnya pasar periodik. Pasar ini beroperasi antara satu sampai tiga kali dalam satu minggu dan berpindah-pindah menurut jalur tertentu. Perpindahan pasar ini akan menjangkau lebih banyak wilayah dan lebih banyak masyarakat yang dilayani. Pada umumnya pasar periodik ini adalah pasar-pasar desa yang mempunyai volume dan aktifitas pasar yang kecil.

Dari uraian diatas dapat dianalogkan bahwa perekonomian masyarakat dan perekonomian desa dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas sosial ekonomi dan aksesibilitas terhadap kota yang lebih besar dan aktifitas pasar dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan jumlah masyarakat yang dilayani. Dengan demikian dapat juga dihipotesiskan bahwa aktifitas dan volume pasar kecamatan berbanding lurus dengan aksesibilitas terhadap kota dan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi.



Analisis terhadap sistem pasar dan peranan pasar dalam pembangunan wilayah dilakukan antara lain dengan (1) memetakan pasar secara geografis untuk mengetahui penyebaran pasar di wilayah analisis, (2) memetakan hari-hari pasar dan pergerakan pasar untuk pasar tidak tetap dan (3) mengukur aktifitas pasar dari sisi ekonomi yang meliputi kinerja pasar dan volume pasar dihubungkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah layanannya.

Uji terhadap hipotesis ini dilaksanakan melalui perbandingan tabulasi terhadap pasar kecamatan contoh, kemudian dilaksanakan analisis deskriptif terhadap variabel-variabel yang digunakan. Variabel ini menyangkut variabel yang menunjukkan aktifitas pasar dan variabel yang menunjukkan tingkat perekonomian masyarakat desa-desa pada kecamatan contoh. Selain itu dilaksanakan pemetaan pasar di wilayah kecamatan contoh, pemetaan hari-hari pasar dan pergerakan pasar periodik.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



IV. METODE PENELITIAN

4.1. Daerah dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kasus dengan daerah penelitian adalah Kabupaten DT II Cilacap, Propinsi DT I Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan.

Pertimbangan pertama, Kabupaten DT II Cilacap mempunyai potensi sumberdaya yang sangat besar dan beragam yang meliputi pertanian, baik lahan basah maupun lahan kering, potensi laut dan potensi tambang berupa tambang minyak bumi. Sehingga bila pengembangan wilayah ini direncanakan sesuai hirarki tata ruang akan mendorong pertumbuhan wilayah yang lebih cepat lagi.

Pertimbangan kedua, terdapat heterogenitas yang cukup besar dalam penyediaan fasilitas pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Ketimpangan penyebaran fasilitas pelayanan ini akan mempengaruhi kinerja perekonomian wilayah. Kerena itu memberikan pemerataan dan kemudahan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah perlu dilakukan intervensi teradap hirarki tata ruang wilayah.

Penelitian dilakukan selama dua bulan yaitu pertengahan bulan September sampai pertengahan bulan November 1996 dengan lima hari kerja dalam satu minggu.

4.2. Batasan Penelitian

Untuk keperluan analisis fungsi ekonomi kota kecamatan dalam pengembangan wilayah perlu dikemukakan batasan penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Batasan wilayah analisis berdasarkan konsep unit program atau administratif. Meskipun batasan ini kurang menunjukkan hubungan fungsional antar daerah tetapi memiliki nilai praktis dalam pelaksanaan program pembangunan.
2. Dalam penelaahan hubungan *centre-pheripery*, hubungan antara pusat dengan pusat pada satu tingkat hirarkhi, atau pusat dengan wilayah belakang dari pusat lain, dapat diabaikan. Hal ini untuk mengisolasi pengaruh pusat lain terhadap kondisi ekonomi wilayah analisis. Dengan demikian dapat dilakukan penelaahan yang lebih mendalam.

4.3. Metode Analisis

Untuk keperluan analisis dalam studi fungsi ekonomi kota kecamatan dalam pembangunan wilayah digunakan beberapa metode analisis antara lain skor skalogram, sistem limpitan sejajar. Alat analisis tersebut digunakan untuk menentukan kecamatan-kecamatan contoh yaitu dengan mengidentifikasi kecamatan maju, sedang dan kurang berkembang. Selanjutnya metode skor skalogram digunakan untuk menguji hipotesis satu yang didukung oleh tabulasi data dan analisis deskriptif.

4.3.1. Skalogram

Metode ini digunakan untuk mengetahui hirarkhi pusat pengembangan dan sarana pembangunan. Metode skalogram dapat memberi informasi tentang hirarkhi pusat-pusat pengembangan dan penyebaran fasilitas pelayanan sosial ekonomi. Dalam analisis, fasilitas dibedakan menjadi fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi. Hal ini untuk melihat apakah kemajuan di bidang ekonomi akan diikuti kemajuan di bidang sosial atau sebaliknya.



Prasarana yang dijadikan indikator ekonomi antara lain: pasar, perusahaan, bank, koperasi, lembaga keuangan lain dan lain-lain. Sedangkan fasilitas yang dapat dijadikan indikator sosial antara lain sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, puskesmas dan lain-lain.

Menurut Hanafiah (1987), metode skalogram dapat digunakan untuk beberapa kepentingan antara lain:

1. Memperlihatkan hubungan dasar antara jumlah penduduk dan ketersediaan fasilitas pembangunan.
2. Dapat mengorganisasikan data mengenai wilayah.
3. Membandingkan antara pusat-pusat pengembangan yang ada berdasarkan fasilitas pembangunan yang dimiliki.
4. Menggambarkan hirarkhi pusat-pusat pengembangan.
5. Secara potensial dapat dipergunakan untuk merancang pusat-pusat pengembangan baru dan pengalokasian prasarana-prasarana pembangunan.

4.3.2. Sistem Limpitan Sejajar

Analisis sistem limpitan sejajar digunakan untuk menetapkan wilayah-wilayah pembangunan yang perlu mendapat prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah. Wilayah-wilayah yang perlu mendapat prioritas adalah wilayah-wilayah potensial, kritis dan strategis.

Wilayah potensial diprioritaskan karena dalam jangka pendek akan mampu meningkatkan pertumbuhan wilayah secara cepat dan mampu memberikan pelayanan bagi perkembangan wilayah-wilayah belakangnya. Sedangkan wilayah kritis diprioritaskan dengan pertimbangan sosial, politik



yaitu dalam rangka pemeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya. Wilayah strategis diprioritaskan karena wilayah ini mempunyai potensi pertumbuhan yang cukup besar untuk tumbuh dan berkembang di atas kekuatannya sendiri dan akan mendorong pertumbuhan wilayah belakangnya.

Pengkategorian wilayah ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengetahui potensi sumberdaya wilayah melalui analisis hirarkhi potensi sumberdaya wilayah, yang dipadukan dengan hasil analisis hirarkhi fasilitas sosial ekonomi, yang dianalisis melalui analisis fasilitas sosial ekonomi. Wilayah maju adalah wilayah yang menempati peringkat tinggi pada hirarkhi potensi sumberdaya wilayah dan sekaligus menempati peringkat yang baik pula dalam hirarkhi fasilitas sosial dan ekonomi. Wilayah sedang adalah wilayah yang menempati peringkat tengah dalam hirarkhi potensi sumberdaya dan pada hirarkhi fasilitas sosial ekonomi, tetapi memiliki potensi pengembangan. Wilayah kritis adalah wilayah yang mempunyai peringkat bawah pada hirarkhi potensi fisik dan mempunyai peringkat bawah dalam sistem hirarkhi fasilitas sosial ekonomi.

4.3.3. Analisis Sistem Pasar

Analisis sistem pasar dan fungsi pasar dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap dilaksanakan dengan menelaah kegiatan pasar, penyebaran lokasi pasar dalam tata ruang wilayah kecamatan contoh dan pergerakan pasar terutama untuk pasar periodik.

Kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis sistem pasar meliputi:

1. Melakukan inventarisasi kegiatan pasar dan pergerakan pasar pada kecamatan contoh. Kegiatan ini dilaksanakan melalui observasi langsung ke lapangan disertai dengan wawancara dengan tokoh masyarakat, petugas dinas pasar, aparat kecamatan dan didukung dengan wawancara dengan pelaku pasar dalam hal ini pedagang.
2. Pemetaan pasar dan hari-hari pasar. Menggambarkan lokasi pasar dalam tata ruang wilayah kecamatan contoh dan menunjukkan hari-hari pasar serta pergerakan pasar antar lokasi dan menunjukkan jarak antara pasar periodik.
3. Mengukur kegiatan pasar. Pengukuran kegiatan pasar dilaksanakan melalui pengukuran variabel-variabel pasar baik variabel langsung maupun tidak langsung. Variabel langsung meliputi jumlah pedagang, volume barang dagangan, jenis pedagang, transaksi dan lain-lain. Sedangkan variabel tidak langsung meliputi jumlah pajak, jenis bangunan dan lain-lain.
4. Membandingkan variabel-variabel pasar antara kecamatan contoh. Hal ini untuk mengetahui volume dan kegiatan pasar yang dihubungkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi perekonomian wilayah kecamatan contoh. Analisis perbandingan ini dilaksanakan dengan analisis tabulasi sederhana dan analisis deskriptif.

4.4. Metode Pengumpulan Data dan Pemilihan Contoh

Pengumpulan data untuk keperluan analisis dilaksanakan berdasarkan data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari Pemerintah Daerah, Biro Pusat Statistik dan Dinas/instansi pemerintah maupun non

pemerintah yang terkait dan analisis data potensi desa. Data skunder ini diperlukan untuk analisis skor skalogram, analisis sistem limpitan sejajar serta analisis tabulasi dan deskriptif. Data skunder yang diambil meliputi data potensi sumberdaya alam, hasil pembangunan yang berupa sarana dan prasarana sosial ekonomi, data tentang perekonomian wilayah penelitian, aktifitas ekonomi kondisi ekonomi masyarakat, struktur penduduk dan lain-lain. Data skunder ini bersumber pada BAPPEDA, dinas terkait serta instansi otonon yang berhubungan. Data primer digunakan sebagai pelengkap data skunder terutama dalam analisis sistem pasar. Sampel untuk data primer adalah pelaku pasar dalam wilayah kecamatan contoh. Responden dikonsentrasikan pada aktifitas sektor informal pasar yang meliputi pedagang, produsen lokal dan penyedia jasa-jasa.

Pemilihan Contoh dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penelitian dilaksanakan pada tiga kecamatan yang mewakili kecamatan yang maju, kecamatan sedang dan kecamatan kurang maju, dengan mengeluarkan kecamatan yang berada pada wilayah kota Administratif Kabupaten Cilacap dari analisis, yaitu Kecamatan Cilacap Utara, Cilacap Tengah dan Cilacap Selatan. Pengecualian kecamatan pada daerah Administratif Cilacap dilakukan karena kecamatan wilayah ini mempunyai aksesibilitas terhadap kota kabupaten yang sangat besar dan pengaruh pertumbuhan kota kabupaten sangat tinggi, sehingga bila analisis fungsi ekonomi kota kecamatan dilaksanakan akan menimbulkan bias yang besar.
2. Pemilihan kecamatan contoh dilaksanakan dengan analisis skor skalogram, dan analisis sistem limpitan sejajar. Variabel yang digunakan adalah variabel



fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi pada wilayah kecamatan, dengan tiga pengklasifikasian yaitu kecamatan maju, kecamatan berkembang dan kecamatan yang kurang maju.

3. Pemilihan responden untuk data primer dilaksanakan dengan metode acak sederhana. Sampel diambil dari setiap pasar kecamatan contoh dan satu sistem pasar periodik pada masing-masing kecamatan contoh. Responden yang diambil sebanyak 71 responden, yang dibagi dua, 30 responden untuk pasar tetap dan 41 responden lagi untuk pasar periodik. Jumlah tiap kecamatan ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah dan luas pasar.
4. Untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang dianalisis dilaksanakan dengan menghitung koefisien korelasi antara variabel perekonomian dengan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi, aksesibilitas dan kepadatan penduduk, melalui metode *Rank Spearman*.

Notasi matematis dari uji korelasi Spearman dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$R_s = \frac{6 \times \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Dimana : R_s : Nilai koefisien korelasi
 d_i : Selisih peringkat
 n : Jumlah populasi analisis

Uji dilaksanakan dengan membandingkan dengan nilai kritis dari tabel korelasi Spearman. Jika $R_s >$ dari nilai kritis maka terbukti terdapat korelasi yang nyata antara variabel yang dianalisis.

4.5. Definisi Operasional

1. Kota Kecamatan adalah desa tempat pusat pemerintahan tingkat kecamatan berada.
2. Fungsi ekonomi kota kecamatan adalah fungsi kota kecamatan dilihat dari struktur tata ruang wilayah kecamatan dan hubungan fungsional kota kecamatan dengan wilayah lainnya.
3. Perekonomian wilayah adalah aktifitas ekonomi masyarakat dan jumlah unit usaha, serta ragam usaha pada suatu wilayah. Variabel yang digunakan sebagai parameter adalah : produksi daerah, produksi daerah perkapita, jumlah lembaga keuangan seperti bank dan lembaga kredit non bank, jumlah KUD dan koperasi non KUD, jumlah unit usaha pada sektor angkutan, perdagangan, jasa, industri kecil dan industri rumah tangga dan persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian.
4. Aksesibilitas wilayah adalah kemudahan wilayah tersebut berhubungan dengan wilayah lain dan kelancaran arus informasi sampai ke wilayah tersebut. Variabel yang digunakan sebagai parameter adalah panjang jalan aspal, jarak wilayah ke kota yang lebih besar hirarkhinya, jumlah angkutan umum dan angkutan pribadi serta angkutan niaga, jumlah sambungan telepon, jumlah pesawat TV dan jumlah rasio.
5. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk per satuan luas wilayah.
6. Pasar adalah lokasi yang tetap dengan bangunan dimana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan transaksi ekonomi.
7. Aktifitas pasar adalah kegiatan transaksi yang terjadi pada lokasi pasar. Parameter yang digunakan untuk mengukur aktifitas pasar meliputi frekuensi



kegiatan pasar per minggu, luas areal pasar, jumlah kios dan jumlah los, jumlah pedagang tetap dan pedagang pasaran, pendapatan pasar yang masuk pemerintah daerah, transaksi rata-rata per hari pasaran, jumlah ragam barang yang diperjualbelikan di pasar dan jumlah unit aktifitas ekonomi di sekitar pasar yang meliputi jumlah toko dan unit usaha ekonomi yang lain, serta fasilitas pendukung pasar seperti terminal, lembaga keuangan dan fasilitas transportasi.

8. Peringkat dari masing-masing parameter ditentukan dengan skoring berdasarkan jumlah terbesar menempati peringkat pertama dan seterusnya. Jika ada lebih dari dua observasi yang memiliki jumlah yang sama, maka penetapan skoring adalah rata-rata dari peringkat.



V. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Penjelasan mengenai keadaan umum lokasi penelitian dibagi ke dalam empat sub bab. Sub bab pertama membahas kondisi geografis daerah penelitian, yang meliputi letak geografis, topografi, iklim dan geologi. Sub bab kedua membahas masalah kependudukan. Pembahasan mengenai kependudukan ini menyangkut jumlah penduduk, komposisi dan penyebarannya pada wilayah penelitian. Sub bab ketiga membahas perekonomian wilayah penelitian yang meliputi struktur perekonomian wilayah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Sub bab keempat membahas kebijaksanaan perwilayahan pembangunan yang menyangkut kebijaksanaan tata ruang pembangunan dan tata ruang daerah Kabupaten DT II Cilacap.

5.1. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten DT II Cilacap terletak di bagian Barat Daya Propinsi DT I Jawa Tengah, merupakan kabupaten yang terjauh dari Ibu Kota Propinsi DT I Jawa Tengah. Letak geografis Kabupaten DT II Cilacap pada 108.4'30" - 109.30'30" Bujur Timur dan 7.45'20" - 7.30' Lintang Selatan.

Batas administrasi wilayah Kabupaten DT II Cilacap meliputi:

Sebelah Barat : Propinsi DT I Jawa Barat

Sebelah Selatan: Samudera Indonesia

Sebelah Timur : Kabupaten DT II Kebumen dan Banyumas

Sebelah Utara : Kabupaten DT II Brebes dan Banyumas

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Kondisi topografi Kabupaten DT II Cilacap dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu berupa dataran dan berupa perbukitan. Wilayah yang berupa dataran sebagian besar terdapat pada bagian selatan wilayah kabupaten tersebut dengan kemiringan antara 0 - 2 derajat dan sebagian kecil mempunyai kemiringan antara 2 - 15 derajat. Sedangkan wilayah sebelah utara sebagian besar mempunyai kemiringan antara 15 - 40 derajat dan sebagian kecil lebih dari 40 derajat.

Perbedaan kemiringan berimplikasi dengan ketinggian dari permukaan air laut. Wilayah Kabupaten DT II Cilacap mempunyai ketinggian yang bervariasi antara 0 - 1.146 meter dpl. Wilayah bagian selatan mempunyai ketinggian yang relatif rendah yaitu kurang dari 25 m dpl. dan mempunyai garis pantai yang membentang dari barat ke timur. Sebagian wilayah ini mempunyai ketinggian antara 25 - 100 meter dpl. Untuk wilayah bagian utara wilayah kabupaten ini sebagian besar memiliki ketinggian antara 100 - 500 meter dpl. dan sebagian memiliki ketinggian antara 500 - 1000 meter, bahkan lebih dari 1000 meter. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter ini terletak di wilayah Kecamatan Dayeuhluhur.

Perbedaan kondisi topografi ini berakibat pada perbedaan kesesuaian lahan. Wilayah bagian selatan yang merupakan dataran rendah akan sesuai dengan tanaman pangan dan wilayah bagian utara akan sesuai dengan tanaman perkebunan dan hortikultura.

Kondisi iklim wilayah ini sesuai dengan letak lintang rendah yang memiliki iklim tropis yang rata-rata mempunyai curah hujan tinggi. Curah hujan wilayah Kabupaten DT II Cilacap berkisar antara 0,7 mm sampai 4.620 mm per tahun. Jenis



tanah termasuk jenis tanah muda, yaitu tanah aluvial, litosol dan regosol dan tanah tua, yaitu latosol, andosol dan mediteran.

Luas wilayah keseluruhan adalah 225.360,843 ha merupakan kabupaten terluas di Propinsi DT I Jawa Tengah. Secara administratif wilayah Kabupaten DT II Cilacap terbagi ke dalam empat wilayah pembantu bupati dan satu kota administratif, 22 Kecamatan, tiga diantaranya terletak di wilayah kota administratif Cilacap, 11 Kelurahan, 247 desa definitif dan 18 desa persiapan.

Pola penggunaan lahan sebagian besar masih berupa lahan pertanian terutama untuk lahan sawah yang meliputi 30,226 persen atau seluas 68.118,360 hektar.

5.2. Kondisi Demografi

Pembahasan mengenai kependudukan terdiri dari pembahasan mengenai perkembangan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, komposisi penduduk dan penyebarannya pada lokasi penelitian.

Jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan potensi yang besar bagi pembangunan wilayah yang bersangkutan. Namun hal ini harus ditunjang dengan kebijaksanaan yang tepat yang meliputi penciptaan iklim usaha yang kondusif dan pembukaan lapangan kerja. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang tidak diimbangi dengan pembukaan lapangan usaha yang luas akan menimbulkan masalah pengangguran yang akan membebani ekonomi wilayah.



Pertumbuhan penduduk Kabupaten DT II Cilacap dalam kurun waktu dasa warsa terakhir (1985-1994) rata-rata sebesar 1,27 persen pertahun. Pertumbuhan penduduk paling tinggi terjadi pada tahun 1986 yang mencapai 3,33 persen, kemudian menurun pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 0,54 persen pada tahun 1988. Setelah itu perlahan naik kembali, hingga pada tahun 1991 pertumbuhan penduduknya sebesar 2,99 persen. Pertumbuhan penduduk pada tahun 1994 tercatat 1,35 persen. Selengkapny mengenai pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhannya di Kabupaten DT II Cilacap, tahun 1984 - 1994

| No | Tahun | Jumlah Penduduk | Pertumbuhan (%) |
|----|-------|-----------------|-----------------|
| 1 | 1985 | 1.369.849 | - |
| 2 | 1986 | 1.415.466 | 3,33 |
| 3 | 1987 | 1.424.367 | 0,63 |
| 4 | 1988 | 1.432.047 | 0,54 |
| 5 | 1989 | 1.441.749 | 0,68 |
| 6 | 1990 | 1.455.877 | 0,98 |
| 7 | 1991 | 1.499.401 | 2,99 |
| 8 | 1992 | 1.509.334 | 0,66 |
| 9 | 1993 | 1.506.747 | 0,49 |
| 10 | 1994 | 1.537.158 | 1,35 |

Sumber: Cilacap dalam Angka 1994, 1995

Sebagian besar penduduk kabupaten DT II Cilacap merupakan penduduk usia kerja (produktif). Pada tahun 1994 jumlah penduduk usia antara sepuluh tahun hingga 65 tahun mencapai 566.931 dari 767.382 jumlah total penduduk tahun 1994. Jumlah ini mencapai 73,88 persen. Nilai perbandingan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif dengan penduduk usia produktif sebesar 35,36



persen. Artinya tiap 100 penduduk usia produktif dibebani menanggung 35,36 penduduk usia belum dan tidak produktif. Selengkapnya tentang jumlah penduduk, kepadatan dan penyebarannya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Penyebarannya menurut Kecamatan di Kabupaten DT II Cilacap, Tahun 1995

| No . Kecamatan | Luas Wilayah(ha) | Jumlah Penduduk | Kepadatan (Jiwa/km ²) | Persen Penyebaran |
|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Dayeuhluhur | 185,06 | 43.851 | 237 | 2,85 |
| 2. Wanareja | 190,60 | 87.393 | 458 | 5,69 |
| 3. Majenang | 138,56 | 107.026 | 772 | 6,69 |
| 4. Cimanggu | 167,44 | 85.723 | 512 | 5,58 |
| 5. Sidareja | 54,04 | 48.943 | 906 | 3,18 |
| 6. Cipari | 121,47 | 55.424 | 456 | 3,64 |
| 7. Kedungreja | 75,32 | 72.301 | 957 | 4,70 |
| 8. Patimuan | 143,18 | 39.371 | 523 | 2,56 |
| 9. Gandrungmangu | 115,25 | 85.485 | 597 | 4,70 |
| 10. Karangpucung | 356,61 | 65.020 | 564 | 4,23 |
| 11. Kawunganten | 99,30 | 135.170 | 379 | 8,79 |
| 12. Jeruklegi | 82,31 | 54.827 | 552 | 3,57 |
| 13. Kesugihan | 28,04 | 91.044 | 985 | 5,92 |
| 14. Maos | 27,30 | 40.340 | 1.439 | 2,62 |
| 15. Sampang | 61,19 | 34.562 | 1.266 | 4,59 |
| 16. Adipala | 58,83 | 70.655 | 1.115 | 5,91 |
| 17. Kroya | 51,42 | 90.894 | 1.545 | 3,55 |
| 18. Binangun | 61,26 | 54.621 | 1.062 | 4,32 |
| 19. Nusawungu | 9,11 | 66.334 | 1.083 | 4,79 |
| 20. Cil. Selatan* | 18,84 | 73.671 | 8.087 | 3,50 |
| 21. Cil. Utara | 18,84 | 53.742 | 2.853 | 3,50 |
| 22. Cil. Tengah | 22,15 | 80.761 | 3.646 | 5,25 |
| Jumlah | 2.142,57 | 1537.158 | 717 | 100,00 |

Sumber : BPS,1995

Keterangan: * belum termasuk Nusakambangan

Penyebaran penduduk antar wilayah di Kabupaten DT II Cilacap tidak merata. Hal ini dapat dilihat dari kepadatan penduduk antar kecamatan yang bervariasi antara 237 jiwa per kilometer persegi pada Kecamatan Dayeuhluhur yang merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk yang paling rendah, sampai 8.087 jiwa per kilometer persegi pada Kecamatan Cilacap Selatan. Kecamatan ini tidak termasuk dalam analisis dalam penelitian ini karena termasuk dalam Kota Administratif Cilacap. Sedangkan untuk kecamatan yang termasuk dalam analisis, yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kroya yang mencapai 1.545 jiwa per kilometer persegi. Persentase penyebaran antar kecamatan berkisar antara 2,56 persen pada Kecamatan Patimuan hingga 8,79 persen pada Kecamatan Kawunganten.

Potensi sumberdaya manusia masih harus dikembangkan terutama pendidikan dan keterampilannya. Dari 1.357.158 penduduk Kabupaten DT II Cilacap, hanya 1,1 persen (12.234) yang mencapai pendidikan akademi atau perguruan tinggi. Selebihnya 6,38 persen (98.147) berpendidikan SLTA, 11,1 persen (170.626) tamat SLTP, tamat SD 39,36 persen (605.069) dan tidak tamat SD atau tidak sekolah berjumlah 438.969 atau 28,55 persen. Dengan demikian diperlukan instrumen kebijaksanaan yang tepat di bidang peningkatan kualitas sumberdaya manusia, melalui peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan informal.



5.3. Struktur Perekonomian Wilayah

Struktur perekonomian wilayah Kabupaten DT II Cilacap masih menitik beratkan pada sektor pertanian. Hal ini ditunjukkan oleh kontribusi sektor pertanian dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor pertanian menduduki peringkat pertama dalam struktur produksi domestik. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 33,34 persen pada tahun 1994, dihitung tanpa minyak. Selengkapnya produksi regional bruto dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten DT II Cilacap menurut sektor, Tahun 1993 - 1994 tanpa minyak.

| Sektor | Produksi Domestik (Juta rupiah) | | | | Perubahan (%) |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|
| | 1993 | (%) | 1994 | (%) | |
| Pertanian | 584.673,84 | (37,02) | 627.108,15 | (33,57) | 7,26 |
| Tan. Pangan | 412.383,66 | (26,11) | 434.623,70 | (23,27) | 5,39 |
| Perk. Rakyat | 1.965,12 | (0,12) | 445,12 | (0,02) | 77,35 |
| Perk. Besar | 21.830,57 | (1,38) | 33.427,74 | (1,79) | 53,12 |
| Peternakan | 56.770,06 | (3,59) | 63.375,26 | (3,39) | 11,64 |
| Perikanan | 17.524,8 | (1,11) | 18.163,88 | (0,97) | 3,65 |
| Pertambangan | 29.647,92 | (1,88) | 37.776,47 | (2,02) | 27,42 |
| Industri | 271.929,53 | (17,22) | 386.321,14 | (20,68) | 42,06 |
| Listri, Gas dan Air Minum | 11.419,79 | (0,72) | 12.794,36 | (0,68) | 12,04 |
| Bangunan | 49.393,89 | (3,13) | 58.240,32 | (3,12) | 17,91 |
| Perdagangan, Rest.Hotel | 374.431,15 | (23,71) | 448.325,84 | (24,00) | 19,74 |
| Transportasi | 50.339,71 | (3,19) | 60.155,06 | (3,22) | 19,50 |
| Keuangan | 64.349,99 | (4,07) | 88.020,82 | (4,71) | 36,78 |
| Jasa-jasa | 143.807,74 | (9,12) | 162.079,63 | (8,68) | 13,34 |
| PDRB | 1.579.193,56 | (100,00) | 1.868.072,43 | (100,00) | 18,89 |

Sumber : Pendapatan Daerah Kabupaten DT II Cilacap, Dinas Pendapatan Daerah, (1995).

Pada sektor pertanian, sub sektor tanaman pangan memegang peran utama yang menguasai 69,31 persen dari pendapatan regional sektor pertanian. Sektor pertanian juga merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling besar, yaitu sebesar 73,88 persen dari total tenaga kerja atau menyerap 686.931 tenaga kerja dari 939.738 tenaga kerja di Kabupaten DT II Cilacap.

Sektor industri merupakan penyumbang produksi regional terbesar ke dua setelah sektor pertanian. Kontribusi sektor ini dalam PDRB mencapai 20,54 persen atau 386.321,14 juta rupiah pada tahun 1994. Sektor ini juga menyerap tenaga kerja terbesar kedua yaitu 8,73 persen dari total tenaga kerja.

Penjelasan tiap sektor perekonomian secara terinci dapat diterangkan sebagai berikut:

5.3.1. Sektor Pertanian

Penjelasan sektor pertanian dapat dibedakan menjadi sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan.

Di wilayah Kabupaten DT II Cilacap komoditi yang paling banyak dibudidayakan pada sub sektor tanaman pangan antara lain: padi, kacang tanah, kedelai, jagung, kacang hijau dan ketela rambat. Tanaman padi dan jagung terutama dikembangkan pada wilayah Kecamatan Kawunganten, Kecamatan Gandrungmangu, Kedungreja dan Kecamatan Majenang. Budidaya tanaman kedelai banyak dikembangkan di Kecamatan Gandrungmangu dan Kawunganten.

Tanaman sayuran yang banyak diusahakan meliputi kacang panjang, cabai, tomat, terong, ketimun, labu siam kangkung dan bayam, sedangkan produk

hortikultura buah-buahan meliputi pisang, mangga, pepaya, sukun, durian, rambutan serta jambu biji.

Sub sektor perkebunan, terutama perkebunan rakyat cukup banyak menyerap tenaga kerja. Komoditi yang banyak dibudidayakan untuk tanaman perkebunan terdiri atas kelapa, cengkeh, kopi, kapuk, panili, kakao, kapulaga dan lada. Wilayah yang cocok untuk budidaya tanaman perkebunan adalah wilayah dataran tinggi, yang sebagian besar terdapat pada bagian utara wilayah Kabupaten DT II Cilacap, yang meliputi Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Cimanggu dan Majenang.

Letak geografis Kabupaten DT II Cilacap yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, menyebabkan sub sektor perikanan merupakan sub sektor yang potensial untuk dikembangkan, terutama pada budidaya perikanan laut dan tambak. Potensi ini dimiliki oleh kecamatan yang memiliki garis pantai, yaitu Kecamatan Nusawungu, Kawunganten, terutama pada wilayah segara anakan, Kecamatan Adipala dan Kecamatan Jeruklegi. Budidaya perikanan air tawar relatif merata terutama pada wilayah dataran tinggi, seperti Kecamatan Dayeuhluhur, Kecamatan Patimuan, Wanareja, Majenang dan Kecamatan Kedungreja. Budidaya perikanan air tawar lain yang sering dikembangkan kecuali kolam adalah mina padi dan penangkapan ikan di perairan bebas seperti sungai dan rawa.

Sub sektor peternakan menyumbang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten DT II Cilacap, yaitu mencapai 63.375,26 juta rupiah pada tahun 1994 atau sebesar 10,11 persen dari PDRB sektor pertanian. Ternak yang paling banyak diusahakan adalah ternak kambing dan domba, kerbau, dan sapi potong. Wilayah



budidaya ternak hampir merata di wilayah Kabupaten DT II Cilacap, dengan konsentrasi, untuk kambing dan domba di Kecamatan Wanareja dan Kecamatan Kawunganten. Ternak Kerbau di Kecamatan Dayeuhluhur dan Adipala. Sedangkan ternak sapi potong banyak diusahakan di Kecamatan Adipala dan Binangun.

Sub sektor kehutanan menempati urutan pertama dalam luas areal yang mencapai 52.010,52 ha atau 23,079 persen dari luas wilayah. Sub sektor ini menyumbang 12,29 persen PDRB dari sektor pertanian atau sekitar 77.072,44 juta rupiah pada tahun 1994. Hasil hutan yang utama meliputi kayu, damar terpentin dan rotan.

5.3.2. Sektor Industri

Sektor industri menempati urutan kedua dalam PDRB Kabupaten DT II Cilacap pada tahun 1994 setelah sektor pertanian. Sektor industri ini menyumbang sekitar 386.321,14 juta rupiah atau 20,54 persen dari total PDRB Kabupaten DT II Cilacap. Sektor industri ini menyerap sekitar 19,37 persen tenaga kerja atau sekitar 182.045 tenaga kerja, sehingga memberikan lapangan kerja dan lapangan usaha yang luas bagi masyarakat.

Industri yang paling banyak berkembang adalah industri skala kecil dan industri rumah tangga, yang meliputi industri pengolahan bahan makanan, industri kerajinan rumah tangga dan industri pariwisata. Industri besar yang berkembang meliputi industri semen, industri minyak yang merupakan komoditi strategis baik dalam skala regional maupun skala nasional. Disamping itu dikembangkan industri



logam dasar, pertambangan dan galian. Bahan galian yang paling banyak adalah galian tipe C seperti batu dan pasir.

5.3.3. Sektor Perdagangan dan Jasa

Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat strategis dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan wilayah. Sektor ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pada tahun 1993/1994 angka pertumbuhannya mencapai 19,74 persen. Komoditi perdagangan yang utama adalah cengkeh, kopi, kakau, vanili, kapuk, kapulogo, lada, kayu dan rotan. Komoditi lainnya meliputi minyak, ikan baik ikan asin maupun ikan air tawar, udang dan *fast food*. Sektor ini menyumbang 448.325 juta rupiah terhadap PDRB atau sekitar 23,84 persen pada tahun 1994.

5.3.4. Sektor Pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata ditujukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan regional dan meningkatkan perolehan devisa.

Kabupaten DT II Cilacap terletak pada jalur lalu-lintas regional maupun nasional, sepanjang pantai selatan sampai Yogyakarta. Jalur pengembangan pariwisata tersebut meliputi pantai pangandaran - segara anakan - Nusakambangan - teluk penyu - Gunung Selok, terus ke timur yaitu obyek wisata di Kabupaten Kebumen - Borobudur - Yogyakarta.

Ke Utara pengembangan pariwisata ini meliputi Baturaden di Purwokerto, Goa Lawa - Dieng terus ke Semarang. Posisi yang strategis ini memungkinkan pengembangan lebih lanjut. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, diukur



melalui pertumbuhan PDRB, cukup mengesankan yaitu mencapai 19,1 persen pada tahun 1993/1994 menurut harga berlaku (1994) atau sekitar 7,38 persen menurut harga konstan 1993 tanpa minyak.

Arah pengembangan perekonomian Kabupaten DT II Cilacap mengarah pada sektor industri, yang didukung oleh sektor jasa, transportasi dan keuangan. Pertumbuhan sektor industri sangat tinggi yaitu mencapai 42,06 persen pada tahun 1993 - 1994 menurut harga berlaku atau 35,09 persen menurut harga konstan tahun 1993. Pertumbuhan sektor industri yang tinggi akan mampu menggantikan posisi sektor pertanian yang terus menurun dalam sumbangannya terhadap PDRB. Penurunan sektor pertanian, terutama sub sektor tanaman pangan yang mencapai -12,03 persen disebabkan karena meningkatnya permintaan lahan untuk pemukiman karena pertumbuhan penduduk dan meningkatnya permintaan lahan untuk industri dan fasilitas pendukung karena peningkatan aktifitas ekonomi, terutama di wilayah kota.

5.4. Pola Dasar Pembangunan Kabupaten DT II Cilacap

Pola Dasar Pembangunan Kabupaten DT II Cilacap merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan GBHN yang disesuaikan dengan potensi wilayah dan kondisi masyarakat Kabupaten DT II Cilacap.

5.4.1. Pembangunan Jangka Panjang II

Pembangunan jangka panjang ke dua Kabupaten DT II Cilacap merupakan rangkaian pembangunan jangka panjang nasional yang dilaksanakan di daerah



sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. Pembangunan jangka panjang ke dua merupakan kelanjutan pembangunan jangka panjang pertama daerah yang telah menetapkan landasan yang kuat bagi pembangunan selanjutnya.

Pola dasar pembangunan daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam rencana pembangunan lima tahun daerah yang merupakan rangkaian pembangunan lima tahunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan jangka panjang ke dua Kabupaten DT II Cilacap adalah terciptanya kualitas sumberdaya manusia dan kualitas masyarakat Kabupaten DT II Cilacap yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir dan batin dalam tata kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dalam suasana kehidupan yang selaras dalam hubungan antara sesama manusia dan manusia dengan Tuhan YME, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang DT I Jawa Tengah dan nasional dengan memperhatikan kondisi, potensi dan permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten DT II Cilacap.

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten DT II Cilacap dalam bidang ekonomi adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meningkatkan pemerataan pembangunan yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama Pelita VI, Kabupaten DT II Cilacap menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 9,5 persen pertahun dengan rincian sektor pertanian tumbuh dengan 4,07 persen per tahun, sektor pertambangan 12,71 persen, industri 13,17 persen, perdagangan 9,97 persen dan transportasi dan komunikasi tumbuh dengan 7,49 persen per tahun.

Sektor industri diharapkan mampu mendukung perkembangan sektor lain seperti sektor pertanian yaitu dengan menyediakan sarana dan alat-alat pertanian sehingga akan tercapai keseimbangan pertumbuhan antara sektor industri dan sektor pertanian. Disamping itu pertumbuhan sektor industri diharapkan mampu meningkatkan pendapatan perkapita daerah, meningkatkan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan persediaan barang dan jasa untuk keperluan sendiri maupun dalam peningkatan ekspor, disamping mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam.

Pengembangan sektor industri diarahkan melalui pengembangan keterkaitan antara sektor industri dengan sektor yang lain, meningkatkan kemitraan antara industri besar, menengah dan kecil serta antara industri hulu dan industri hilir.

Pengembangan sektor pertanian terutama diarahkan untuk mencukupi kebutuhan daerah, khususnya dalam mempertahankan swasembada pangan. Titik berat pengembangan sektor ini meliputi pengembangan tanaman pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan. Pengembangan sektor pertanian terutama dilaksanakan melalui optimalisasi pendayagunaan sumberdaya tanah dan air, yaitu melalui intensifikasi pertanian. Hal ini karena semakin sulit untuk memperluas lahan pertanian karena desakan permintaan sektor lain. Sub sektor kehutanan diarahkan untuk melestarikan sumberdaya hutan, penanaman hutan kembali dan pengembangan agro wisata.



5.4.2. Kebijakan Tata Ruang Daerah

Kebijakan tata ruang daerah diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam yang didasarkan pada hubungan fungsional antar daerah dalam wilayah Kabupaten DT II Cilacap. Pembahasan mengenai kebijakan tata ruang daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: (1) pembangunan desa dan kota dan (2) Satuan Wilayah Pembangunan (SWP).

1. Pembangunan Desa dan Kota

Pendekatan tata ruang pedesaan dan perkotaan diharapkan mampu memadukan kegiatan-kegiatan pembangunan di pedesaan dan perkotaan secara timbal balik dan saling melengkapi sehingga laju pertumbuhan di wilayah pedesaan dan perkotaan dapat lebih seimbang secara proporsional. Dengan demikian dapat mengurangi ketimpangan antara desa dan kota dan mampu menciptakan struktur pedesaan yang dinamis.

2. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP)

Untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan wilayah yang didasarkan pada kondisi, potensi, perkiraan kegiatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah di masa yang akan datang maka perwilayahan pembangunan di Kabupaten DT II Cilacap yang semula terdiri dari empat Sub Wilayah Pembangunan pada Pelita V, dikembangkan menjadi tujuh Sub Wilayah Pembangunan pada Pelita VI, yaitu: **Sub Wilayah Pembangunan I** meliputi Kecamatan Jeruklegi, Cilacap Tengah, Cilacap Utara dan Kecamatan Cilacap Selatan, dengan pusat pengembangan di Kota Administratif Cilacap. Prioritas pengembangan SWP I adalah untuk pengembangan industri, perkebunan kakau, perikanan lepas pantai, peternakan dan



sektor pariwisata. **Sub Wilayah Pembangunan II** meliputi Kecamatan Kesugihan, Maos dan Kecamatan Sampang, dengan pusat pengembangan di Kecamatan Sampang, Potensi Pengembangan SWP ini adalah industri, jasa dan peternakan. **Sub Wilayah Pembangunan III** meliputi Kecamatan Sidareja, Kecamatan Kedungreja, Gandrungmangu, Kecamatan Cipari dan Kecamatan Patimuan yang mempunyai potensi pengembangan pada sektor industri pengolahan makanan dan peternakan dengan pusat pengembangan di Kecamatan Sidareja. **Sub Wilayah Pembangunan IV** meliputi Kecamatan Kawunganten yang mempunyai potensi pengembangan pada sektor industri pengolahan makanan, peternakan dan wisata laguna di hutan payau segara anakan, dengan pusat pengembangan di Kecamatan Kawunganten. **Sub Wilayah Pengembangan V** meliputi Kecamatan Kroya, Kecamatan Adipala, Kecamatan Binangun dan Kecamatan Nusawungu yang mempunyai potensi pengembangan pada sektor industri kecil, kerajinan, wisata pantai dan perdagangan dengan pusat pengembangan pada Kecamatan Kroya. **Sub Wilayah Pengembangan VI** meliputi Kecamatan Majenang, Kecamatan Dayeuhluhur dan Kecamatan Wanareja yang mempunyai potensi pengembangan pada sektor industri pengolahan makanan, peternakan dan perkebunan rakyat, dengan pusat pengembangan di Kecamatan Majenang. **Sub Wilayah Pembangunan VII** meliputi Kecamatan Karangpucung dan Kecamatan Cimanggu yang mempunyai potensi pada sektor industri pengolahan dan peternakan dengan pusat pengembangan di Kecamatan Karangpucung.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

5.4.3. Pengembangan Satuan Wilayah Sungai (SWS)

Untuk mendukung meningkatkan hasil pertanian yang sesuai dengan kebutuhan daerah Cilacap sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah dan dengan tetap memperhatikan pembangunan berwawasan lingkungan demi kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka kebijaksanaan tata ruang di satuan wilayah sungai diarahkan pada pemanfaatan sumberdaya air yang efisien, lestari dan seimbang sehingga menumbuhkan keserasian diantara Sub Wilayah Pembangunan. Secara terinci peta pembagian wilayah Kabupaten DT II Cilacap ke dalam Sub Wilayah Pembangunan (SWP) dapat ditelaah pada lampiran 6.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

VI. POTENSI SUMBERDAYA DAN STRUKTUR TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP

Pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya alam wilayah dan potensi lokasi geografis wilayah terhadap wilayah lain. Potensi sumberdaya alam yang tidak merata dan aksesibilitas terhadap kota menimbulkan perbedaan potensi pengembangan dan perbedaan pertumbuhan antar wilayah. Pada akhirnya hal ini akan menimbulkan kesenjangan antar wilayah. Perbedaan potensi sumberdaya menyebabkan adanya wilayah yang kaya, wilayah sedang dan wilayah miskin.

Pengembangan wilayah kaya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan mendorong pertumbuhan wilayah belakang melalui pengimbasan pembangunan. Wilayah yang mempunyai potensi sedang didorong agar mampu berkembang di atas kekuatannya sendiri dengan pemanfaatan sumberdaya secara optimal. Sedangkan wilayah miskin dikembangkan agar mampu mengimbangi pertumbuhan wilayah lainnya dan dalam upaya lebih pemeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Untuk menentukan kebijaksanaan pembangunan terlebih dahulu harus diketahui potensi sumberdaya di masing-masing wilayah sehingga dapat disusun kebijaksanaan pembangunan secara terpadu yang didasarkan pada hubungan fungsional antar wilayah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

6.1. Hirarkhi Potensi Sumberdaya Wilayah

Analisis hirarkhi potensi sumberdaya wilayah menggunakan batasan wilayah unit program, dengan wilayah kecamatan sebagai satuan wilayah analisis. Kabupaten DT II Cilacap terbagi ke dalam 22 kecamatan, tiga kecamatan diantaranya terletak di wilayah kota administratif Cilacap, sehingga ketiga kecamatan ini dikeluarkan dari analisis. Ketiga kecamatan ini adalah Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan Cilacap Selatan dan Kecamatan Cilacap Tengah.

Berdasarkan hasil analisis hirarkhi potensi sumberdaya wilayah ini, maka kecamatan-kecamatan dapat dikelompokkan ke dalam wilayah-wilayah kaya, wilayah sedang dan wilayah-wilayah miskin. Dengan demikian terlihat perbedaan potensi sumberdaya wilayah sehingga dapat disusun kerangka kebijaksanaan pembangunan di masing-masing wilayah.

Komponen yang digunakan sebagai dasar analisis hirarkhi potensi sumberdaya wilayah meliputi sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertambangan dan energi, kependudukan dan sektor jasa.

Komponen sektor pertanian meliputi sub sektor tanaman pangan, yang terdiri dari luas lahan yang potensial untuk di kembangkan menjadi lahan produksi tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai dan kacang tanah. Sub sektor peternakan dibedakan menjadi ternak besar seperti kerbau, sapi, kuda, kambing dan domba dan peternakan unggas. Sub sektor perkebunan meliputi perkebunan rakyat dan perkebunan besar, sedangkan sub sektor perikanan meliputi perikanan laut, darat, maupun perikanan di perairan bebas seperti sungai dan rawa.



Komponen sektor pertanian dilengkapi dengan luas pelayanan irigasi teknis di masing-masing wilayah analisis.

Komponen sektor industri meliputi jumlah unit usaha pada industri kecil, industri rumah tangga dan aneka industri. Sektor pertambangan dan energi, sektor - perdagangan dan sektor jasa diukur dari sumbangannya terhadap produksi domestik Kabupaten DT II Cilacap, yang menunjukkan tingkat pengelolaan saat ini dan potensi pengembangan dimasa yang akan datang.

6.1.1. Wilayah Kaya

Hasil analisis potensi sumberdaya berdasarkan komponen seperti yang dikemukakan di atas diperoleh 36,84 persen wilayah kecamatan di Kabupaten DT II Cilacap tergolong ke dalam wilayah yang memiliki potensi sumberdaya yang kaya, 26,84 persen tergolong wilayah sedang dan 26,84 persen tergolong wilayah miskin. Kecamatan yang termasuk dalam wilayah kaya adalah Kecamatan Kawunganten, Kecamatan Majenang, Kecamatan Jeruklegi, Kecamatan Wanareja, Kecamatan Kesugihan, Kecamatan Kroya dan Kecamatan Nusawungu.

Potensi wilayah Kecamatan Kawunganten terutama pada sektor pertanian tanaman pangan. Hal ini didukung oleh pelayanan irigasi yang baik. Sub sektor peternakan juga menempati skor yang baik, baik ternak besar maupun ternak unggas.

Kecamatan Majenang mempunyai potensi pengembangan pada sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan terutama perkebunan rakyat, peternakan,



sektor pertambangan, terutama pertambangan galian tipe C. Sektor lain yang potensial adalah sektor perdagangan serta sektor jasa.

Sektor perekonomian di Kecamatan Jeruklegi yang potensial untuk dikembangkan adalah sektor perkebunan rakyat, sektor peternakan dan sektor pertambangan. Sedangkan Kecamatan Wanareja potensial di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, terutama kerbau, sapi, kambing dan domba.

Kecamatan Kesugihan, sesuai letak geografisnya yang berpantai terutama pantai teluk penyu, sehingga potensi perikanan laut dan tambak menempati posisi yang strategis untuk dikembangkan. Disamping itu sektor pertambangan pasir besi juga potensial untuk dikembangkan.

Potensi utama yang dimiliki oleh Kecamatan Kroya adalah sektor industri, terutama industri kecil dan industri rumah tangga serta sektor perdagangan. Potensi sektor perdagangan didukung oleh letak geografis Kecamatan Kroya yang merupakan pintu masuk dan transit ke dan dari Kabupaten DT II Cilacap dari arah timur dan arah utara yaitu dari Kabupaten Kebumen, Wonosobo dan Prembun, dari arah timur, Purwokerto, Banyumas dan Brebes dari arah Utara.

Aktivitas perdagangan antar daerah yang tinggi menyebabkan berkembangnya sektor usaha sekunder dan tersier, yang berupa industri pengolahan, industri rumahtangga, dan industri skala kecil. Kecamatan Nusawungu merupakan kecamatan paling timur di Wilayah Kabupaten DT II Cilacap yang berbatasan langsung dengan Kabupaten DT II Kebumen. Kecamatan ini mempunyai potensi pengembangan pada sektor pertanian tanaman pangan,



perkebunan industri rumahtangga, industri kecil, jasa dan wisata pantai. Kecamatan ini juga mempunyai potensi pada galian bahan bangunan yaitu pasir dan potensi tambang pasir besi.

6.1.2. Wilayah Sedang

Kecamatan-kecamatan yang mempunyai potensi wilayah sedang meliputi Kecamatan Adipala, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Kedungreja, Kecamatan Karang Pucung, Kecamatan Gandrungmangu, Kecamatan Dayeuhluhur dan Kecamatan Binangun. Kecamatan-kecamatan ini meliputi 26,84 persen dari jumlah kecamatan yang termasuk dalam analisis.

Sektor yang potensial dikembangkan di Kecamatan Adipala adalah industri kecil dan industri rumah tangga, sektor perikanan, terutama perikanan laut. Hal ini karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Bentuk wilayah yang relatif subur dan berupa dataran rendah sesuai untuk budidaya tanaman pangan. Di Kecamatan Adipala juga potensial dikembangkan galian pasir dan bijih besi.

Kecamatan Cimanggu, sesuai dengan topografinya yang berupa dataran tinggi dan berbukit maka tanaman perkebunan dapat tumbuh dengan baik, terutama perkebunan kakau, kopi dan kelapa. Sektor perdagangan juga potensial untuk dikembangkan karena letaknya yang strategis, yang merupakan pintu masuk dari Kabupaten Banyumas.

Dukungan fasilitas irigasi yang baik dan bentuk topografi yang berupa dataran merupakan kondisi yang cocok untuk mengembangkan budidaya pertanian



khususnya tanaman pangan. Disamping itu di Kecamatan Kedungreja juga potensial untuk dikembangkan perikanan, terutama perikanan air laut dan air payau, disamping pengembangan pada sektor pertambangan.

Kondisi letak geografis yang baik menyebabkan sektor transportasi mempunyai potensi pengembangan yang baik di Kecamatan Karang Pucung. Berkembangnya transportasi akan mendorong tumbuhnya aktifitas di bidang jasa, dan perdagangan. Selain itu sektor-sektor yang menempati peringkat atas dalam analisis hirarkhi potensi wilayah adalah sektor peternakan, terutama ternak besar. Tanaman pangan potensial dikembangkan di Kecamatan Gandrungmangu. Hal ini juga didukung oleh sistem irigasi dan pelayanan irigasi yang baik. Selain itu perdagangan dan jasa juga mempunyai potensi untuk dikembangkan.

Kecamatan Dayeuhluhur merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Barat. Kondisi geografis kecamatan yang berupa perbukitan sesuai untuk tanaman perkebunan. Sub sektor peternakan, perikanan, terutama perikanan air tawar dan industri mempunyai peluang pengembangan yang sedang.

Sektor industri cukup berkembang di Kecamatan Binangun. Selain itu sub sektor peternakan dan perkebunan rakyat juga potensial dikembangkan di Kecamatan ini.

6.1.3. Wilayah Miskin

Kecamatan-kecamatan yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang relatif rendah menurut hasil analisis meliputi Kecamatan Maos, Kecamatan Cipari, Kecamatan Sidareja dan Kecamatan Sampang. Sebagian besar sektor yang



dijadikan indikasi dalam analisis potensi sumberdaya alam, pada kecamatan-kecamatan tersebut memiliki peringkat yang rendah. Kecuali sektor perdagangan pada Kecamatan Sidareja yang menduduki peringkat ketiga. Sektor ini sekaligus merupakan sektor potensial untuk dikembangkan pada kecamatan ini. Majunya perdagangan di Kecamatan Sidareja didukung oleh fasilitas transportasi yang baik, yaitu merupakan jalur transportasi utama yang menghubungkan Kota Bandung dengan kota-kota di Jawa Tengah. Selengkapnya dapat ditelaah pada tabel 5.

Tabel 5. Analisis Potensi Sumberdaya Kabupaten DT II Cilacap, Tahun 1995

| Kecamatan | Pend. Usia Tan. Kerja | Tan. Pangan | Ternak Besar | Ternak Unggas | Perk. Rakyat | Perk. Besar | Peri kanan | Iri gasi | Indus tri | Pertb. Energi | Perd. Jasa | To Jenjang tal | | |
|---------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|----------------|-----|----|
| Dayeuhluhur | 16 | 12 | 7 | 10 | 5 | 3 | 7 | 14 | 9 | 15 | 19 | 12 | 129 | 13 |
| Wanareja | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 6 | 5 | 15 | 12 | 11 | 4 | 11 | 84 | 4 |
| Majenang | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 9 | 17 | 11 | 1 | 2 | 3 | 66 | 2 |
| Cinanggu | 6 | 11 | 8 | 11 | 3 | 4 | 14 | 17 | 7 | 17 | 5 | 13 | 116 | 9 |
| Sidareja | 15 | 18 | 10 | 13 | 12 | 8 | 15 | 8 | 13 | 13 | 16 | 16 | 157 | 16 |
| Cipari | 13 | 14 | 6 | 14 | 14 | 2 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 17 | 158 | 17 |
| Kedungreja | 8 | 5 | 16 | 16 | 13 | 8 | 10 | 5 | 10 | 5 | 14 | 14 | 124 | 12 |
| Patimuan | 17 | 9 | 16 | 16 | 19 | 8 | 1 | 8 | 16 | 8 | 18 | 8 | 144 | 15 |
| Gandrungmangu | 7 | 2 | 13 | 15 | 18 | 8 | 19 | 3 | 15 | 7 | 8 | 2 | 117 | 10 |
| Karangpucung | 11 | 17 | 3 | 7 | 17 | 8 | 6 | 17 | 18 | 4 | 11 | 1 | 120 | 11 |
| Kawunganten | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 18 | 6 | 5 | 61 | 1 |
| Jeruklegi | 12 | 19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 74 | 3 |
| Kesugihan | 4 | 10 | 12 | 5 | 10 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 10 | 9 | 85 | 5 |
| Maos | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 8 | 12 | 5 | 17 | 10 | 9 | 19 | 164 | 18 |
| Sampang | 19 | 16 | 18 | 18 | 16 | 8 | 17 | 10 | 19 | 12 | 13 | 1 | 167 | 19 |
| Adipala | 9 | 7 | 11 | 4 | 11 | 8 | 3 | 11 | 2 | 9 | 15 | 15 | 105 | 8 |
| Kroya | 3 | 8 | 15 | 6 | 9 | 8 | 11 | 9 | 3 | 14 | 1 | 10 | 97 | 7 |
| Binangun | 14 | 13 | 9 | 12 | 8 | 1 | 18 | 12 | 4 | 19 | 17 | 7 | 134 | 14 |
| Nusa Wungu | 10 | 8 | 14 | 8 | 6 | 8 | 13 | 7 | 1 | 6 | 12 | 4 | 95 | 6 |

Sumber : BPS, 1995, diolah

Apabila dilihat potensi pengembangan yang berbeda-beda antar kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya, hal ini memungkinkan pengembangan

wilayah secara terpadu, berdasarkan hubungan fungsional antar wilayah. Wilayah tertentu dimungkinkan untuk berspesialisasi pada potensi sumberdaya yang dimiliki, sehingga pertumbuhan wilayah dapat dipercepat dan pemerataan pembangunan dapat diwujudkan.

Untuk mengembangkan potensi sumberdaya alam di masing-masing wilayah diperlukan penyediaan fasilitas pendukung seperti tersedianya fasilitas transportasi dan jalan yang menghubungkan dengan wilayah lain, fasilitas keuangan, seperti bank atau lembaga perkreditan yang lain, pusat informasi, tersedianya sarana produksi, sarana peningkatan sumberdaya manusia seperti sekolah, puskesmas dan lembaga pelatihan yang lain, terciptanya iklim yang kondusif yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pemerataan fasilitas-fasilitas tersebut secara proporsional akan mendukung pertumbuhan wilayah yang lebih cepat. Untuk mengetahui ketersediaan fasilitas sosial dan ekonomi antar wilayah maka dilaksanakan analisis hirarkhi fasilitas sosial ekonomi di Kabupaten DT II Cilacap. Hasil analisis tersebut dan dipadukan dengan analisis sumberdaya akan diketahui penyebaran fasilitas sosial ekonomi antar kecamatan.

6.2. Hirarkhi Fasilitas Sosial Ekonomi

Analisis hirarkhi fasilitas sosial ekonomi menunjukkan tingkat ketersediaan dan penyebaran fasilitas sosial ekonomi pada wilayah-wilayah. Hirarkhi fasilitas sosial ekonomi didasarkan pada ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi yang terdiri dari 72 jenis fasilitas yang berbeda. Secara garis besar dapat dibedakan



ke dalam: fasilitas ekonomi, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, sarana informasi, pemerintahan, fasilitas peribadatan dan sarana pelayanan umum.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kecamatan yang mempunyai fasilitas sosial dan ekonomi yang baik relatif merata di wilayah Kabupaten DT II Cilacap di bagian barat wilayah Kabupaten DT II Cilacap, kecamatan yang menduduki peringkat atas adalah Kecamatan Majenang, Kecamatan Wanareja dan Kecamatan Kawunganten. Sedangkan di sebelah timur, kecuali kota administratif Cilacap adalah Kecamatan Kroya dan Kecamatan Kesugihan.

Pertumbuhan ekonomi wilayah sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas wilayah ke kota. Aksesibilitas terhadap kota ini ditunjukkan dengan tersedianya fasilitas jalan, fasilitas transportasi yang menghubungkan wilayah yang pertumbuhannya tinggi. Hal ini dapat diamati dari hasil analisis bahwa kecamatan-kecamatan yang maju terletak di sepanjang jalur lalu-lintas utama. Kecamatan Wanareja dan Majenang terletak di sepanjang jalur utama Bandung - Yogyakarta, Purwokerto dan Brebes. Sedangkan Kecamatan Kroya, Kecamatan Kesugihan dan Kecamatan Kawunganten terletak pada jalur utama Bandung - Kebumen - Yogyakarta dan Wonosobo. Disamping ketersediaan fasilitas transportasi, hal yang menentukan adalah sumberdaya alam. Kecamatan-kecamatan yang menduduki peringkat atas (satu sampai lima) adalah kecamatan-kecamatan yang memiliki sumberdaya alam yang besar, yaitu yang termasuk kategori kaya dalam analisis potensi sumberdaya alam wilayah.

Kecamatan-kecamatan yang mempunyai fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi yang lengkap juga memiliki jumlah penduduk yang besar. Hal ini



menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas sosial ekonomi cenderung terpusat pada wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang besar atau pemukiman penduduk cenderung menempati lokasi yang strategis dari fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Analisis Ketersediaan dan Penyebaran Fasilitas Sosial Ekonomi Kabupaten DT II Cilacap, Tahun 1995

| Kecamatan | Eko nomi | Trans portasi | Fas. Umum | Kese hatan | Pendi dikan | Fas. Ibadah | Pemerin tahan | Infor masi | Total | Jenjang | Deskripsi |
|--------------|----------|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------|---------|-----------|
| Dayeuhluhur | 122 | 131 | 31 | 60 | 78 | 28 | 37 | 56 | 543 | 12 | Sedang |
| Wanareja | 93 | 87 | 31 | 52 | 72 | 13 | 17 | 25 | 390 | 3 | Maju |
| Majenang | 99 | 55 | 20 | 48 | 95 | 28 | 25 | 17 | 387 | 2 | Maju |
| Cimanggu | 107 | 100 | 25 | 58 | 105 | 35 | 34 | 39 | 503 | 8 | Sedang |
| Sidareja | 115 | 110 | 32 | 83 | 78 | 37 | 43 | 48 | 546 | 13 | Sedang |
| Cipari | 155 | 142 | 34 | 87 | 95 | 35 | 44 | 45 | 637 | 16 | Terblk. |
| Kedungreja | 141 | 113 | 34 | 101 | 88 | 24 | 35 | 37 | 573 | 14 | Sedang |
| Patimuan | 186 | 145 | 31 | 101 | 115 | 36 | 36 | 70 | 720 | 19 | Terblk. |
| Gand. mangu | 188 | 163 | 41 | 64 | 75 | 55 | 34 | 34 | 654 | 17 | Terblk. |
| Karangpucung | 153 | 147 | 24 | 102 | 50 | 30 | 28 | 46 | 580 | 15 | Sedang |
| Kawunganten | 109 | 85 | 21 | 41 | 88 | 45 | 6 | 21 | 416 | 4 | Maju |
| Jeruklegi | 128 | 106 | 24 | 56 | 111 | 50 | 27 | 34 | 536 | 11 | Sedang |
| Kesugihan | 132 | 79 | 29 | 45 | 83 | 23 | 15 | 44 | 450 | 6 | Maju |
| Maos | 121 | 101 | 23 | 80 | 111 | 9 | 34 | 42 | 521 | 9 | Sedang |
| Sampang | 192 | 120 | 36 | 99 | 90 | 47 | 42 | 47 | 673 | 18 | Terblk. |
| Adipala | 111 | 65 | 25 | 109 | 83 | 26 | 21 | 35 | 475 | 7 | Sedang |
| Kroya | 77 | 53 | 22 | 56 | 78 | 14 | 17 | 32 | 349 | 1 | Maju |
| Binangun | 135 | 119 | 37 | 93 | 56 | 31 | 13 | 38 | 522 | 10 | Sedang |
| Nusa Wungu | 115 | 84 | 30 | 58 | 59 | 23 | 16 | 38 | 423 | 5 | Maju |

Sumber: BPS, 1995, diolah.

Dilihat dari ketersediaan dan penyebaran fasilitas sosial ekonomi Kabupaten DT II Cilacap, enam kecamatan (31,58 persen) termasuk dalam kategori maju, delapan kecamatan (42,12 persen) termasuk dalam kategori sedang dan lima kecamatan (26,3 persen) termasuk dalam kategori terbelakang. Dengan tersediannya fasilitas sosial ekonomi yang baik diharapkan akan menunjang aktifitas masyarakat dalam memanfaatkan dan menggali potensi sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya.

Penyediaan fasilitas sosial ekonomi cenderung berkorelasi positif dengan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Untuk menguji hal ini bisa dilaksanakan dengan uji statistik yaitu dengan uji peringkat Spearman. Uji statistik ini membuktikan bahwa ada hubungan antara ketersediaan fasilitas sosial ekonomi dan sumberdaya yang dimiliki. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi (R_s) yang lebih besar dari nilai kritis uji peringkat Spearman. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai R_s uji hubungan antara sumberdaya wilayah dengan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi adalah 0.7298 sedangkan nilai kritis pada tingkat kepercayaan 99 persen adalah 0.584. Dengan demikian kita bisa mempercayai pada tingkat 99 persen bahwa terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara ketersediaan fasilitas sosial ekonomi dengan ketersediaan sumberdaya wilayah.

Tersedianya fasilitas sosial ekonomi yang lebih baik pada kecamatan-kecamatan yang memiliki potensi wilayah yang besar dapat dimengerti, karena untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang tersedia diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Secara logis dapat diambil kesimpulan bahwa pada wilayah ini akan terjadi pertumbuhan yang pesat yang disebabkan oleh aglomerasi aktifitas ekonomi dan pemusatan penyediaan fasilitas sosial ekonomi.

tiga kecamatan contoh masing-masing Kecamatan Kroya untuk kecamatan maju, Kecamatan Adipala untuk kecamatan sedang dan Kecamatan Sampang untuk kecamatan terbelakang. Pembahasan kondisi umum kecamatan contoh membahas antara lain kondisi geografis, kependudukan dan perekonomian pada masing-masing kecamatan.



6.3.1. Kecamatan Kroya

Kecamatan Kroya terletak sekitar 32 km ke arah Timur dari pusat kota Cilacap. Secara geografis, letak Kecamatan Kroya berbatasan dengan: sebelah Timur dengan Kecamatan Nusawungu dan Kabupaten Banyumas, Sebelah Utara dengan Kabupaten Banyumas, sebelah Barat dengan Kecamatan Sampang dan Maos dan sebelah Selatan dengan Kecamatan Binangun.

Wilayah Kecamatan Kroya merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 500 meter dpl. Luas wilayah Kecamatan Kroya seluruhnya 5.883,603 ha yang terbagi kedalam 17 pemerintahan desa. Sebagian besar peruntukan lahan di kecamatan ini untuk lahan pertanian sawah. Lahan basah meliputi 54,6 persen dari luas wilayah atau sekitar 3.213 ha, sisanya berupa lahan kering. Dengan demikian sektor pertanian masih mendominasi peruntukan lahan di kecamatan ini.

Jumlah penduduk seluruhnya mencapai 90.894 pada tahun 1994 dengan kepadatan penduduk berkisar antara 5.224 jiwa per km² di Desa Kroya dan 958 jiwa per km² di Desa Sikampuh. Kepadatan penduduk rata-rata adalah 1.545 jiwa per km². Dilihat dari struktur pekerjaan penduduk, sektor pertanian masih merupakan lapangan kerja terbesar bagi penduduk Kecamatan Kroya. Sekitar 64,86 persen penduduk kecamatan ini bekerja di sektor pertanian. Sektor petanian sebagai lapangan kerja penduduk dengan persentase terkecil pada Desa Bajing yaitu 41,17 persen dan tertinggi pada Desa Mujur lor yang mencapai 84,60 persen penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Selengkapnya luas wilayah,



jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kecamatan Kroya dapat ditelaah pada tabel 7.

Tabel 7. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Kroya Tahun 1994

| Desa | Luas wilayah (ha) | Jumlah Penduduk | Kepadatan jiwa/km ² |
|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Kroya | 153,0 | 8.024 | 5.244 |
| Karangmangu | 371,0 | 5.984 | 1.613 |
| Ayamalas | 292,5 | 4.873 | 1.666 |
| Pesanggrahan | 154,0 | 2.875 | 1.867 |
| Pekuncen | 361,1 | 7.267 | 2.001 |
| Sikampusih | 701,5 | 6.719 | 958 |
| Gentasari | 766,4 | 9.873 | 1.288 |
| Buntu | 225,6 | 3.226 | 1.431 |
| Mujur | 264,6 | 4.877 | 1.843 |
| Kedawung | 525,4 | 7.134 | 1.358 |
| Bajing | 298,6 | 6.332 | 2.121 |
| Pucung lor | 281,3 | 3.358 | 1.194 |
| Pucung kidul | 307,6 | 4.458 | 1.449 |
| Mergawati | 293,8 | 3.012 | 1.025 |
| Karangturi | 308,7 | 3.691 | 1.196 |
| Bajing kulon | 315,4 | 6.322 | 6.325 |
| Mujur lor | 260,3 | 2.869 | 1.102 |
| Jumlah | 5.883,0 | 90.894 | 1.545 |

Sumber: BPS Kabupaten DT II Cilacap, 1995

Produksi domestik Kecamatan Kroya pada tahun 1994 mencapai 91.966.920.000 rupiah menurut harga konstan tahun 1993, dengan pendapatan perkapita sebesar 1.021.049,19 rupiah. Hal ini berarti terjadi pertumbuhan PDRB sebesar 6,71 persen dari 86.182,23 juta rupiah pada tahun 1993. Pendapatan perkapita tumbuh sebesar 4,9 persen pada tahun yang sama dari 973. 458,55 rupiah perkapita pada tahun 1993. PDRB terbesar diperoleh dari sektor perdagangan, hotel

dan restoran yang mencapai 46,10 persen atau sekitar 42.398,55 juta rupiah, disusul sektor pertanian yang mencapai 19,11 persen atau sekitar 17.576,58 juta rupiah. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah sektor industri pengolahan yang mencapai 35,09 persen dari 11.720,16 juta rupiah pada tahun 1993 menjadi 15.833,03 juta rupiah pada tahun 1994.

Tabel 8. Produksi Domestik Regional Bruto Menurut Sektor di Kecamatan Kroya Atas Dasar Harga Konstan tahun 1993, Tahun 1993 - 1994 (juta rupiah)

| Sektor | Produksi Domestik Regional Bruto | | Pertumbuhan | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|
| | 1993 | (%) | 1994 | (%) | |
| Pertanian | 18.358,76 | (21,30) | 17.576,58 | (19,11) | - 4,26 |
| Industri Pengolahan | 11.720,16 | (13,60) | 15.833,03 | (17,22) | 35,09 |
| Listrik, Gas dan Air Minum | 138,18 | (0,16) | 152,02 | (0,17) | 10,02 |
| Bangunan | 83,97 | (0,10) | 93,53 | (0,10) | 11,39 |
| Perd., Restoran dan Hotel | 40.962,77 | (47,53) | 42.398,55 | (46,10) | 3,51 |
| Angkutan dan Komunikasi | 3.815,75 | (4,43) | 4.123,62 | (4,48) | 8,07 |
| Bank dan Lembaga keuangan | 87,83 | (0,10) | 109,78 | (0,12) | 24,99 |
| Sewa Rumah | 2.699,98 | (3,13) | 2.797,99 | (3,04) | 3,63 |
| Pemerintahan dan dan Pemerintahan | 7.587,20 | (8,80) | 8.060,09 | (8,76) | 6,23 |
| Jasa - jasa | 727,64 | (0,84) | 821,74 | (0,89) | 12,93 |
| P D R B | 86.182,23 | (100,00) | 91.966,92 | (100,00) | 6,71 |
| Penduduk | 88.532 | | 90.071 | | 1,74 |
| PDRB Perkapita | 973.458,55 | | 1.021.149,19 | | 4,90 |

Sumber : PDRB Kabupaten DT II Cilacap, 1995

Keterangan: Angka dalam kurung menyatakan persentase.

Sektor pertanian mengalami penurunan sebesar - 4,26 persen dari 18.358,76 juta rupiah pada tahun 1993 menjadi 17.576,58 juta rupiah pada tahun 1994. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB juga mengalami penurunan dari

menunjukkan semakin berkurangnya peranan sektor pertanian dalam perekonomian wilayah dan digantikan oleh sektor lainnya seperti perdagangan dan industri pengolahan. Berikut ini struktur produksi daerah Kecamatan Kroya menurut sektor dihitung berdasarkan harga dasar tahun 1993 tanpa sektor migas.

6.3.2. Kecamatan Adipala

Wilayah Kecamatan Adipala terletak sekitar 22 km ke arah Timur dari kota Administratif Cilacap. Batas wilayah kecamatan ini meliputi: sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Binangun, sebelah Utara dengan Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos, sebelah Barat dengan Kecamatan Kesugihan dan sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia.

Wilayah Kecamatan Adipala merupakan wilayah pantai yang memiliki ketinggian yang rendah yaitu kurang dari 500 meter dpl. Luas wilayah keseluruhan 61,19 km², yang terdiri dari 16 desa definitif. Sebesar 52,61 persen dari wilayah kecamatan ini merupakan lahan basah yang sesuai untuk usahatani terutama untuk pertanian tanaman pangan. Ciri pertanian masih melekat pada kecamatan ini.

Jumlah penduduk Kecamatan Adipala pada tahun 1994 adalah 70.655 jiwa. Dengan demikian kepadatan penduduk rata-rata adalah 1.155 jiwa per km². Penyebaran penduduk di kecamatan ini belum merata. Variasi kepadatan penduduk masih cukup besar yaitu berkisar antara 524 jiwa per km² pada Desa Karangbenda dan 9.358 jiwa per km² pada Desa Adipala. Selengkapnya dapat ditelaah pada tabel 9.



Tabel 9. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Adipala, Tahun 1994

| Desa | Luas wilayah (km ²) | Jumlah Penduduk | Kepadatan (%) |
|---------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
| Wlahar | 2,92 | 3.560 | 1.220 |
| Penggalang | 4,08 | 7.479 | 1.833 |
| Karangsari | 3,51 | 6.000 | 1.709 |
| Adipala | 4,48 | 9.358 | 2.088 |
| Kalikudi | 3,81 | 5.631 | 1.478 |
| Doplang | 4,54 | 4.314 | 950 |
| Adireja Kulon | 1,33 | 1.265 | 951 |
| Adireja Wetan | 2,95 | 2.884 | 978 |
| Karanganyar | 2,45 | 2.528 | 1.032 |
| Bunton | 5,02 | 4.431 | 883 |
| Adiraja | 5,04 | 5.122 | 1.016 |
| Karangbenda | 4,49 | 2.354 | 524 |
| Glempangpasir | 7,07 | 6.391 | 904 |
| Pedasong | 1,88 | 1.514 | 811 |
| Welahan Wetan | 5,82 | 5.276 | 907 |
| Gombolharjo | 1,80 | 2.538 | 1.410 |
| Jumlah | 61,19 | 70.655 | 1.155 |

Sumber: BPS, Kabupaten DT II Cilacap, 1995

Struktur perekonomian Kecamatan Adipala masih sangat tergantung pada sektor pertanian. Sebesar 80,67 persen tenaga kerja di kecamatan ini masih menggantungkan penghasilannya pada sektor pertanian. Angka ini bervariasi untuk tiap desa yaitu berkisar antara 91,67 persen di Desa Gombolharjo dan 70,91 persen di Desa Kalikudi. Tingginya tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian menunjukkan belum berkembangnya sektor sekunder dan tersier.

Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan Adipala sebesar 58.161,87 juta rupiah pada tahun 1994 berdasarkan harga dasar tahun 1993. Nilai ini mengalami pertumbuhan sebesar 4,30 persen dari tahun sebelumnya yaitu

55.763,37 juta rupiah. PDRB perkapita tahun 1994 tumbuh sebesar 3,24 persen dari tahun sebelumnya yaitu naik dari 802.939,81 rupiah menjadi 828.918,18 rupiah.

Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB, walaupun menunjukkan kontribusi yang semakin menurun dari 49,80 persen pada tahun 1993 menjadi 45,72 persen pada tahun 1994. Hal ini dikarenakan sektor ini mengalami penurunan sebesar - 4,26 persen pada tahun yang sama. Sektor industri pengolahan tumbuh sangat pesat yaitu mencapai 35,09 persen disusul sektor perbankan yang tumbuh sebesar 24,99 persen. Selengkapny struktur produksi domestik regional Kecamatan Adipala menurut sektor pada tahun 1993 dan 1994 dapat ditelaah pada tabel 10. berikut:

Tabel 10. Produk Domestik Regional Bruto menurut Sektor di Kecamatan Adipala atas dasar Harga Konstan tahun 1993 dalam juta rupiah, Tahun 1993-1994

| Sektor | Produksi Regional Bruto | | Pertumbuhan | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------|-------------------|---------|-------------|
| | 1993 | (%) | 1994 | (%) | (%) |
| Pertanian | 27.772,01 | (49,90) | 26.588,77 | (45,72) | - 4,26 |
| Pertambangan dan galian | 581,10 | (1,04) | 682,03 | (1,17) | 17,37 |
| Industri pengolahan | 6.363,15 | (11,41) | 8.596,12 | (14,78) | 35,09 |
| Listri, Gas dan Air Minum | 26,26 | (0,05) | 28,90 | (0,05) | 10,05 |
| Bangunan | 2.198,03 | (3,94) | 2.448,23 | (4,21) | 11,38 |
| Perd., Restoran dan Hotel | 8.611,92 | (15,44) | 8.913,77 | (15,33) | 3,51 |
| Angkutan dan Komunikasi | 4.283,91 | (7,68) | 4.629,55 | (7,96) | 8,07 |
| Bank dan Lembaga Keuangan | 80,66 | (0,14) | 100,82 | (0,17) | 24,99 |
| Sewa Rumah | 2.098,97 | (3,76) | 2.175,17 | (3,74) | 3,63 |
| Pemerintahan dan Pertahanan | 3.484,75 | (6,25) | 3.701,94 | (6,36) | 6,23 |
| Jasa -jasa | 262,60 | (0,47) | 296,57 | (0,51) | 12,94 |
| P D R B | 55.763,37 | | 58.161,87 | | 4,30 |
| Jumlah Penduduk | 69.449 | | 70.166 | | 1,03 |
| PDRB Perkapita | 802.939,81 | | 828.918,18 | | 3,24 |

Sumber : PDRB Kabupaten DT II Cilacap, 1995

Pertumbuhan yang cepat pada sektor industri dan perbankan menunjukkan terjadinya transformasi perekonomian dari sektor primer ke sekunder dan jasa. Hal ini diikuti oleh menurunnya peranan sektor pertanian dalam struktur produksi wilayah.

6.3.3. Kecamatan Sampang

Wilayah Kecamatan Sampang terletak sekitar 35 km ke arah Timur Laut dari kota Administratif Cilacap. Batas wilayah kecamatan ini meliputi: sebelah Utara, Kabupaten Banyumas, sebelah Barat Kecamatan Kesugihan dan Maos, sebelah Selatan Kecamatan Maos dan Kroya dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kroya. . Selengkapnya dapat ditelaah pada tabel 11. berikut

Tabel 11. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Sampang, Tahun 1994.

| Desa | Luas Wilayah (km ²) | Jumlah Penduduk | Kepadatan (jiwa/km ²) |
|---------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Brani | 1,69 | 1.955 | 1.156 |
| Karangtengah | 4,25 | 6.233 | 1.379 |
| Paketingan | 2,81 | 2.591 | 922 |
| Sampang | 2,76 | 4.667 | 1.691 |
| Sidasari | 2,23 | 3.183 | 1.427 |
| Nusajati | 3,48 | 4.118 | 1.183 |
| Ketanggung | 0,68 | 941 | 1.383 |
| Karangjati | 4,41 | 5.928 | 1.344 |
| Paberasan | 1,22 | 1.431 | 1.173 |
| Karangasem | 3,50 | 3.515 | 1.004 |
| Jumlah | 27,30 | 34.562 | 1.266 |

Sumber : BPS, 1995

Luas wilayah keseluruhan adalah 27,30 km² yang terbagi ke dalam 10 pemerintahan desa. Dari luasan tersebut 71,58 persen atau 19,54 km² diantaranya

merupakan wilayah lahan basah yang sesuai dengan budidaya pertanian terutama pertanian tanaman pangan. Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian wilayah kecamatan ini.

Jumlah penduduk keseluruhan mencapai 34.562 jiwa pada tahun 1994, kepadatan penduduk rata-rata mencapai 1.266 jiwa per km². Penyebaran penduduk antar desa belum merata. Kepadatan penduduk terbesar terdapat di Desa Sampang yang mencapai 1.691 jiwa per km² dan terendah pada Desa Paketingan yaitu 922 jiwa per km²:

Struktur perekonomian Kecamatan Sampang relatif merata, walaupun sektor pertanian masih merupakan sektor utama. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Regional Bruto mencapai 29,72 persen pada tahun 1993 dan menurun menjadi 26,79 persen pada tahun 1994. Sektor lain yang mempunyai kontribusi yang besar adalah sektor bangunan, perdagangan dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi, yang masing-masing mencapai 14,18 persen, 24,96 persen dan 10,56 persen pada tahun 1993 dan berubah masing-masing menjadi 15,52 persen, 24,33 persen dan 10,75 persen pada tahun 1994.

Besarnya PDRB Kecamatan Sampang pada tahun 1994 adalah 40.520,75 juta rupiah dihitung atas dasar harga tetap tahun 1993. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 6,19 persen dari 38.160,36 juta pada tahun 1993. Dengan demikian besarnya PDRB perkapita adalah 1.178.819,66 rupiah pada tahun 1994, meningkat dari 1.133.229,12 rupiah pada tahun 1993 atau sebesar 4,02 persen. Lebih lengkapnya dapat ditelaah pada tabel 12 berikut ini:

Tabel 12. Produk Domestik Regional Kecamatan Sampang menurut Sektor, Dihitung atas Harga Dasar Tahun 1993, dalam juta rupiah, Tahun 1993 - 1994

| Sektor | Produksi Domestik Regional | | | | Perubahan (%) |
|-----------------------------|----------------------------|---------|---------------------|---------|---------------|
| | 1993 | (%) | 1994 | (%) | |
| Pertanian | 11.342,68 | (29,72) | 10.859,42 | (26,79) | - 4,26 |
| Pertambahan dan Penggalian | 292,92 | (0,76) | 343,80 | (0,85) | 17,37 |
| Industri Pengolahan | 3.590,01 | (9,41) | 4.849,83 | (11,97) | 35,09 |
| Listrik, Gas dan Air Minum | 52,91 | (0,14) | 58,21 | (0,14) | 10,02 |
| Bangunan | 5.647,80 | (14,80) | 6.290,68 | (15,52) | 11,38 |
| Perd., Restoran dan Hotel | 9.525,53 | (24,96) | 9.859,41 | (24,33) | 3,51 |
| Angkutan dan Komunikasi | 4.030,40 | (10,56) | 4.355,58 | (10,75) | 8,07 |
| Bank dan lainnya | 109,63 | (0,63) | 137,03 | (0,34) | 24,99 |
| Sewa Rumah | 1.022,39 | (2,68) | 1.059,51 | (2,61) | 3,63 |
| Pemerintahan dan Pertahanan | 2.508,67 | (6,57) | 2.665,03 | (6,58) | 6,23 |
| Jasa-jasa | 37,42 | (0,10) | 42,26 | (0,10) | 12,93 |
| P D R B | 38.160,36 | | 40.520,75 | | 6,19 |
| Jumlah Penduduk | 33.647 | | 34.374 | | 2,08 |
| PDRB Perkapita | 1.133.229,12 | | 1.178.819,66 | | 4,02 |

Sumber : PDRB Kabupaten DT II Cilacap, 1995

Keterangan: Angka dalam kurung menyatakan persentase

VII. KEDUDUKAN KOTA KECAMATAN DALAM STRUKTUR TATA RUANG WILAYAH

Kota kecamatan memiliki kedudukan strategis dalam pengembangan wilayah pedesaan. Selain sebagai pusat pemerintahan, kota kecamatan juga berfungsi sebagai pusat pemukiman penduduk dan kegiatan sosial ekonomi. Dengan demikian kota kecamatan memiliki peranan ganda dalam hubungannya dengan wilayah belakangnya juga hubungan antar kota kecamatan maupun dengan kota yang lebih besar.

Pembahasan kedudukan kota kecamatan dalam struktur tata ruang wilayah menyangkut kedudukan strategis ketiga kota kecamatan contoh dalam pengembangan wilayah.

7.1. Fungsi Kota Kroya dalam Struktur Tata Ruang

7.1.1. Fungsi Kota Kroya dalam Tata Ruang Wilayah Kabupaten DT II Cilacap

Dalam struktur tata ruang wilayah, kota Kroya memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pusat pengembangan dari Sub Wilayah Pembangunan (SWP) V, dan pusat pengembangan dari wilayah Kecamatan Kroya sendiri. Sebagai pusat pengembangan dari Sub Wilayah Pembangunan V yang meliputi Kecamatan Kroya, Kecamatan Adipala, Kecamatan Binangun dan Kecamatan Nusawungu, kota Kroya berperan mengimbaskan perkembangan kota ke kecamatan-kecamatan tersebut, dalam bentuk permintaan terhadap produk-produk pertanian, yang berarti sebagai tempat pemasaran produk pertanian dan juga menyediakan kebutuhan masyarakat yang tidak dihasilkan sendiri seperti pakaian, bawang

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

merah, bawang putih sepatu dan sandal serta barang-barang elektronika yang didatangkan dari luar daerah. Dalam hal ini kota Kroya merupakan tempat transit bagi barang dari luar. Hal ini terlihat dari pengamatan arus barang dari luar yang memasuki Wilayah Kabupaten Cilacap, terutama yang berasal dari arah Utara dan Timur seperti Brebes, Purwokerto, Kebumen, Wonosobo, Solo dan Jogjakarta. Pusat perdagangan kota Kroya melayani kebutuhan masyarakat pada wilayah pengembangannya, bahkan mencapai kota Administratif Cilacap, yang mencakup kebutuhan bumbu dapur, sayuran dan buah yang berasal dari luar Kabupaten Cilacap.

Wilayah kota Kroya juga berfungsi sebagai penyangga pertumbuhan kota administratif Cilacap, dalam bentuk pengimbasan investasi pembangunan dan pemukiman penduduk. Selain itu sebagai kota penyangga, juga merupakan penyedia tenaga kerja, pasar bagi produk-produk kota yang lebih besar, menyediakan fasilitas transportasi bagi kelancaran arus barang dari dan ke kota Cilacap. Terlebih posisi kota Kroya yang merupakan pintu masuk dan keluar yang menghubungkan kota Cilacap ke arah Utara dan Timur.

Dalam struktur tata ruang wilayah kecamatan, kota Kroya mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Kroya. Sebagai pusat pemerintahan di tingkat kecamatan, di Kroya tersedia fasilitas perkantoran, meliputi kantor Camat, kantor kepala desa dan kantor instansi dan dinas sektoral di tingkat kecamatan. Sebagai pusat pemerintahan kecamatan, kota Kroya memiliki kekuatan aglomerasi yang akan menarik aktifitas masyarakat daerah sekitarnya di sekitar pusat pemerintahan. Sebagai pusat pelayanan sosial, di kota Kroya terjadi



konsentrasi penyediaan fasilitas kebutuhan dasar manusia, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan pelayanan pemerintahan dan lain-lain.

Tersedianya fasilitas pelayanan yang lengkap, mendorong konsentrasi pemukiman penduduk di sekitar pusat kota, sehingga akan terbentuk pola pemukiman yang terpusat pada lokasi-lokasi yang optimal dari pusat pelayanan. Dengan demikian kota Kroya berfungsi sebagai pusat pemukiman penduduk Kecamatan Kroya. Hal ini ditunjukkan oleh angka kepadatan penduduk kota Kroya yang relatif lebih tinggi dari desa lainnya. Desa Kroya sebagai pusat pemerintahan menempati posisi pertama angka kepadatan penduduknya yang mencapai 5.243,96 per km².

Aktifitas perdagangan yang tinggi pada kota Kroya akan menumbuhkan kegiatan masyarakat diluar sektor pertanian, seperti industri rumahtangga, industri kecil dan jasa. Pada tahun 1994, 58,01 persen tenaga kerja bekerja di luar sektor pertanian dan sebesar 41,99 persen bekerja disektor pertanian. Hal ini menunjukkan adanya transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Sebagai pusat perdagangan kota Kroya memiliki fasilitas pemasaran yang berupa pasar kecamatan, pasar hewan dan pusat pertokoan yang terkonsentrasi pada Desa Kroya dan Desa Bajing. Kedudukan kota Kroya sebagai pusat perdagangan tidak lepas dari keuntungan geografis yang dimilikinya yang terletak pada jalur lintas perdagangan Cilacap - Purwokerto, Banyumas, Cilacap - Kebumen, Wonosobo. Untuk mendukung fungsi pusat perdagangan ini diperlukan fasilitas transportasi, keuangan, jasa dan komunikasi. Dengan demikian akan terbuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.



Jumlah penduduk yang besar di kota Kroya merupakan potensi pasar yang besar bagi produk pertanian maupun produk olahan yang lainnya. Karena itu peluang pengembangan usaha pengolahan dan industri kecil, maupun industri skala rumah tangga yang berorientasi pada pasar lokal dan pasar regional terbuka lebar. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi tenaga kerja yang bermanfaat bagi pengelolaan sumberdaya alam. Jumlah penduduk yang besar juga memerlukan berbagai macam pelayanan yang terus berkembang, sehingga akan menumbuhkan sektor tersier, yang juga merupakan peluang usaha yang besar.

Kegiatan perekonomian akan berkembang lebih cepat pada wilayah yang memiliki fasilitas pelayanan lengkap dan jumlah penduduk yang padat. Munculnya bidang usaha di luar sektor pertanian didukung oleh adanya prasarana yang baik.

7.1.2. Hubungan Kota Kroya dengan Wilayah Layanannya

Sebagai pusat pengembangan dari Sub Wilayah Pembangunan V (SWP V), Kota Kroya memiliki hubungan fungsional dengan wilayah belakangnya yang meliputi Kecamatan Adipala, Kecamatan Nusawungu dan Kecamatan Binangun. Perencanaan pembangunan di wilayah SWP V ini didasarkan pada hubungan fungsional antar daerah dan sesuai dengan potensi sumberdaya, keperluan serta permasalahan yang ada pada masing-masing wilayah.

Sebagai pusat pengembangan di kecamatan Kroya dan wilayah Sub Wilayah Pembangunan V, perencanaan pembangunan kota Kroya diarahkan terutama pada sektor industri pengolahan, pemasaran, pengembangan transportasi, menyediakan fasilitas pendukung perekonomian, menyediakan sarana produksi



dan informasi. Untuk itu peruntukan lahan pada kota Kroya terutama adalah untuk memenuhi permintaan lahan akan pemukiman, perkantoran, pertokoan dan memenuhi permintaan akan industri pengolahan, meskipun untuk keperluan tersebut belum mendesak, karena industri yang berkembang merupakan industri kecil dan industri skala rumah tangga, sehingga tidak memerlukan lahan yang luas.

Pada wilayah kota Kroya perluasan lahan pertanian hampir tidak mungkin dilaksanakan, bahkan yang terjadi adalah proses peralihan fungsi lahan pertanian ke fungsi non pertanian. Hal ini merupakan keadaan yang sering terjadi pada wilayah yang sedang tumbuh. Pengembangan sektor pertanian dilaksanakan melalui pengoptimalan lahan yang ada dan memanfaatkan lahan-lahan marginal. Pengembangan pertanian dapat dilaksanakan pada wilayah-wilayah hinterlandnya.

Hubungan fungsional antara pusat dan hinterlandnya terlihat dari arus barang dan jasa yang terjadi antar wilayah. Meskipun hal ini belum menunjukkan hubungan yang sebenarnya, tetapi akan memberikan gambaran yang berarti tentang hubungan timbal balik antara pusat dan *hinterlandnya*.

Arus barang yang terjadi dari kecamatan-kecamatan hinterlandnya meliputi hasil pertanian terutama beras, kelapa, sayuran seperti mentimun, bayam, kangkung dan lain-lain. Sedangkan arus dari kota Kroya meliputi bumbu dapur yang berasal dari Brebes, Kebumen, Purworejo, Purwokerto, dan Wonosobo. Jenisnya meliputi cabai, tomat, kol, wortel, bawang merah dan bawang putih, dimana kota Kroya merupakan tempat transit yang melayani pembelian eceran maupun grosir. Untuk penjualan grosir terutama bumbu dapur wilayah layanannya mencapai kota Administratif Cilacap dan SWP lainnya. Selain itu juga



menyediakan kebutuhan pakaian, barang elektronika, jasa perbankan, pegadaian, dan telekomunikasi.

Dengan demikian pertumbuhan yang cepat yang terjadi di kota Kroya akan mempengaruhi perkembangan wilayah layanannya yang meliputi kecamatan dalam Sub wilayah Pembangunan V dan wilayah pedesaan di wilayah Kecamatan Kroya sebagai hinterlandnya. Pengaruh pertumbuhan kota Kroya terhadap wilayah belakangnya/desa-desa sekitarnya, berhubungan erat dengan aksesibilitas desa terhadap kota. Untuk desa-desa yang memiliki aksesibilitas terhadap kota yang tinggi menerima pengaruh pengimbasan pertumbuhan kota yang besar yang diindikasikan oleh aktifitas perekonomian desa tersebut. Desa-desa yang memiliki peringkat aksesibilitas yang tinggi juga menempati peringkat perekonomian yang baik dan sebaliknya. Hal ini untuk desa-desa yang memiliki peringkat tinggi atau rendah, sedangkan untuk desa yang menempati peringkat tengah kurang menunjukkan pola yang jelas. Hal ini terlihat di beberapa desa yang memiliki aksesibilitas rendah tetapi mempunyai peringkat yang baik dalam perekonomian.

Desa Gentasari menempati peringkat yang rendah dalam aksesibilitas yaitu menempati peringkat 12, tetapi memiliki peringkat dua dalam perekonomian. Hal ini disebabkan karena potensi sumberdaya alam yang dimilikinya. Pengaruh potensi sumberdaya alam terhadap perekonomian sangat besar, karena aktifitas utama dalam perekonomian adalah pemanfaatan sumberdaya alam.

Secara keseluruhan uji statistik korelasi Spearman untuk Kecamatan Kroya membuktikan bahwa pada taraf nyata 99 persen terdapat hubungan timbal balik antara aksesibilitas suatu wilayah belakang (desa) dengan perekonomian wilayah

tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh nilai R_s (nilai korelasi) hubungan antara aksesibilitas dengan perekonomian wilayah yaitu sebesar 0,999 yang lebih besar dari nilai kritis korelasi Spearman pada taraf nyata 99 persen yaitu sebesar 0,645.

7.2. Fungsi Kota Adipala dalam Struktur Tata Ruang

7.2.1. Fungsi Kota Adipala dalam Struktur Tata Ruang Kabupaten DT II Cilacap

Kota Adipala terletak sekitar 15 km sebelah Timur pusat kota Cilacap. Letak kota Adipala dilalui jalur transportasi yang menghubungkan Cilacap - Kroya, Cilacap - Maos, Sampang, Purwokerto dan Banyumas. Sebagai konsekuensi, kota Adipala dilalui perdagangan antar kecamatan. Kondisi ini membawa pengaruh perkembangan sektor perdagangan pada kota Adipala. Pertumbuhan kota Cilacap juga membawa pengaruh pada pertumbuhan sektor industri dan jasa. Sebagai kota penyangga, Adipala akan menerima limpahan investasi dari kota Cilacap. Potensi pariwisata yang besar yang dimiliki oleh Kecamatan Adipala terutama pariwisata pantai, Gunung Selok mendorong pertumbuhan sektor jasa dan transportasi dalam lingkungan Kecamatan Adipala.

Kondisi iklim yang sesuai, topografi yang berupa dataran rendah dan ditunjang oleh fasilitas irigasi yang baik menyebabkan pengembangan sektor pertanian terutama sub sektor tanaman pangan dapat tumbuh dengan baik. Kondisi yang demikian menjadikan Adipala sebagai salah satu sentra produksi padi di Kabupaten DT II Cilacap.

Dengan demikian dapat dilihat fungsi kota Adipala dalam Struktur Tata Ruang Kabupaten adalah: (1) Sebagai daerah penyangga pertumbuhan kota

Cilacap. Dengan demikian kota Adipala merupakan tempat pemukiman alternatif, mengingat jarak yang tidak jauh dari pusat kota kabupaten dengan waktu tempuh sekitar 15 menit dengan kendaraan umum. Sebagai daerah penyangga, kota Adipala merupakan tujuan investasi alternatif dalam sektor industri terutama industri pariwisata. Dengan demikian memerlukan fasilitas pendukung seperti transportasi, komunikasi serta penyediaan lahan untuk pemukiman dan industri, (2) Sebagai penyedia bahan baku dan tenaga kerja yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan kota Cilacap. Sub sektor industri batu bata di Adipala, mampu melayani permintaan untuk keperluan pembangunan sarana fisik di kecamatan maupun di kota Cilacap, Walaupun tidak diketahui berapa pangsa pasar yang dimilikinya, (3) Arus perdagangan antar kecamatan yang melalui kota Adipala mendorong pertumbuhan sektor ini terutama di sepanjang jalur transportasi, (4) Sebagai transit dari arus barang dari dan ke kota Cilacap.

Dalam struktur tata ruang wilayah kecamatan, sebagaimana kota Kroya, kota Adipala berfungsi sebagai pusat pemerintahan tingkat kecamatan. Selayaknya pusat pemerintahan, di kota Adipala juga tersedia lokasi perkantoran yang meliputi kantor Camat, kantor desa serta kantor-kantor instansi vertikal dan dinas otonom di tingkat kecamatan. Hal ini menjadikan kota Adipala sebagai tujuan mobilitas penduduk dalam memperoleh pelayanan administrasi pemerintahan.

Sebagai pusat pelayanan kecil dan pelayanan kebutuhan dasar manusia maka di kota Adipala disediakan fasilitas kesehatan yang berupa puskesmas, fasilitas pendidikan, jasa komunikasi dan pelayanan sejenis lainnya. Tersedianya fasilitas tersebut menjadikan kota Adipala sebagai pusat pemukiman penduduk.



Hubungan ini bisa juga terbalik yaitu karena kota Adipala sebagai pusat pemukiman, maka disediakan berbagai fasilitas pendukung perkembangan dan fasilitas pelayanan kebutuhan dasar manusia.

Konsentrasi pemukiman dan konsentrasi fasilitas pelayanan sosial ekonomi akan menyebabkan berkembangnya sektor perekonomian yang berupa tumbuhnya sektor perekonomian dan pergeseran mata pencaharian masyarakat. Perkembangan sektor ekonomi dapat diamati dari pertumbuhan sektor industri kecil dan sektor industri skala rumah tangga, baik dalam jumlah unit, maupun tenaga kerja yang terserap didalamnya, walaupun sektor pertanian masih merupakan tumpuhan utama perekonomian wilayah ini yang mencapai lebih dari 70 persen tenaga kerja di wilayah Kecamatan Adipala masih menggantungkan pada sektor ini.

7.2.2. Hubungan Kota Adipala dengan Wilayah Layanannya

Sebagai hinterland dari pertumbuhan kota Kroya dan Cilacap, maka pertumbuhan di kedua kota ini akan mewarnai perkembangan dan pertumbuhan kota Adipala. Sebagai kota yang memiliki aksesibilitas yang cukup baik dalam tata ruang kabupaten yaitu dilalui transportasi Cilacap - Kroya dan Cilacap - Maos maka arus barang dari dan ke Adipala menjadi lancar. Arus barang yang terjadi dari Adipala berupa hasil pertanian, industri kecil, kerajinan bata merah, galian tipe C yaitu pasir dan pengolahan hasil pertanian terutama yang khas adalah gula merah. Sedangkan arus barang yang masuk ke kecamatan Adipala meliputi pakaian, sepatu dan sandal, bahan bakar minyak dan lain-lain.

Dalam mendukung dan mengantisipasi pengaruh perkembangan kota Cilacap dan Kroya sebagai pusat perkembangan di Kabupaten DT II Cilacap dan Sub Wilayah Pembangunan V, kota Adipala mempersiapkan dengan menyediakan fasilitas transportasi, komunikasi dan mempersiapkan tata ruang kota yang mendukung berkembangnya usaha wiraswasta, berupa pengembangan industri pengolahan bahan makanan, industri kerajinan terutama skala rumah tangga yang banyak menyerap tenaga kerja, unit usaha jasa dan perdagangan, yang meliputi jasa transportasi, komunikasi, rumah makan dan lain-lain. Pengaruh kota Adipala terhadap desa-desa hinterlannya ditunjukkan melalui imbasan perkembangan kota, yang terlihat melalui arus barang dan jasa serta arus informasi. Uji statistik dengan metode peringkat Spearman menunjukkan bahwa antara aksesibilitas desa terhadap kota dan perekonomian desa terdapat hubungan yang nyata. Uji statistik menunjukkan pada derajat kepercayaan 99 persen nilai R_s sebesar 0,822 yang lebih besar dari nilai kritisnya sebesar 0,666. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan timbal balik yang nyata antara aksesibilitas desa terhadap kota dengan perekonomian desa tersebut.

Analisis tabel menunjukkan bahwa untuk desa yang memiliki aksesibilitas terhadap kota yang baik yang ditunjukkan oleh peringkat yang tinggi dalam analisis aksesibilitas memiliki peringkat perekonomian yang baik juga, demikian sebaliknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efek pengimbasan kota Adipala terhadap desa sekitarnya sangat tergantung pada keberadaan fasilitas transportasi desa tersebut, yang menghubungkannya dengan kota.



7.3. Fungsi Kota Sampang dalam Struktur Tata Ruang

7.3.1. Fungsi Kota Sampang dalam Tata Ruang Kabupaten DT II Cilacap

Kecamatan Sampang merupakan kecamatan yang relatif baru yang resmi dibentuk pada tahun 1993. Sebelumnya Kecamatan Sampang termasuk dalam wilayah Kecamatan Maos. Dalam Kebijakan tata ruang Kabupaten DT II Cilacap, Kecamatan Sampang bersama Kecamatan Maos dan Kecamatan Kesugihan bergabung dalam satu Sub Wilayah Pembangunan II, dengan Kota Sampang sebagai pusat pengembangannya. Posisi strategis Kota Sampang yang dilewati jalur transportasi antar kota dan antar kabupaten merupakan salah satu sebab berkembangnya sektor perdagangan dan jasa. Bahkan dalam analisis perekonomian wilayah Kabupaten DT II Cilacap sektor ini di Kecamatan Sampang menempati peringkat pertama, yang dilihat dari sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten DT II Cilacap tahun 1994.

Sebagai pusat pengembangan dari SWP II Kota Sampang memegang peranan yang strategis dalam hubungannya dengan kota administratif Cilacap, kota-kota kecamatan lainnya terutama kota kecamatan hinterlandnya dan terhadap wilayah layanannya yang meliputi desa-desa di wilayah Kecamatan Sampang. Keterkaitan dengan kota administratif Cilacap, kota Sampang memegang posisi strategis yang berfungsi sebagai mediator pertumbuhan kota kabupaten ke daerah belakang.

Pertumbuhan kota Sampang sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan kota Cilacap terutama arus perdagangan antar wilayah. Arus perdagangan antara kota



Cilacap dengan kota lain terutama kota administratif Purwokerto, Kebumen Prembun, Wonosobo dan Brebes, yang melewati kota Sampang menumbuhkan kreatifitas masyarakat sehingga berkembang sektor ekonomi baru terutama perdagangan, pengolahan bahan makanan dan kerajinan rumahtangga. Posisi strategis pada jalur transportasi dan jalur perdagangan mendukung berkembangnya sektor tersier.

Sebagai pusat pengembangan dari SWP II, kota Sampang menyediakan fasilitas perdagangan, informasi, sarana produksi, benih dan lain-lain, untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya alam wilayah hinterlandnya. Sebagai pusat pemasaran dari produk yang dihasilkan hinterlandnya, kota Sampang berperan menyediakan fasilitas pemasaran produk pertanian, peternakan dan fasilitas transportasi. Tersedianya fasilitas pemasaran memungkinkan kecamatan *hinterlandnya* mengembangkan potensi wilayahnya dan berspesialisasi sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Kota Sampang juga merupakan daerah penyangga bagi pertumbuhan kota administratif Cilacap, dalam bentuk arus investasi dan pemukiman alternatif.

Sebagaimana kota kecamatan yang lain, kota Sampang berfungsi sebagai pusat pemerintahan di tingkat kecamatan yang berfungsi melayani masyarakat akan birokrasi pemerintahan dan pusat pelayanan masyarakat akan fasilitas kebutuhan dasar manusia. Hal ini berarti di kota Sampang terjadi konsentrasi penyediaan fasilitas sosial ekonomi. Hal ini ditunjukkan melalui analisis skalogram fasilitas sosial ekonomi, yang menunjukkan terjadinya konsentrasi penyediaan fasilitas pelayanan pada kota Sampang.



Sebagai konsekuensi dari konsentrasi fasilitas sosial ekonomi, adalah terjadinya aglomerasi aktifitas perekonomian terutama industri dan perdagangan. Keuntungan aglomerasi menyebabkan konsentrasi pemukiman penduduk, yang ditunjukkan kepadatan penduduk yang menempati peringkat pertama.

7.3.2. Hubungan Kota Sampang dengan Wilayah Layanannya

Hubungan fungsional antara kota Sampang dan kota-kota kecamatan *hinterlandnya* yang meliputi kecamatan Kesugihan dan Kecamatan Maos berupa arus barang dan jasa. Arus barang dari hinterland berupa hasil pertanian seperti beras, sayuran dan buah yang akan dipasarkan baik lokal maupun antar kabupaten. Untuk pemasaran antar kota dalam partai besar biasanya tidak transit di kota kecamatan tetapi langsung dari produsen (petani), yang diambil oleh para tengkulak. Hal ini terjadi untuk komoditi perkebunan terutama kelapa, kopi, sukun dan lain-lain. Sebagai pusat perdagangan kota Sampang menyediakan berbagai keperluan penduduk akan barang yang tidak dihasilkan sendiri seperti barang elektronika, tekstil, bawang merah, bawang putih dan kol. Untuk bumbu dapur dan sayuran wilayah Kecamatan Sampang dan *hinterlandnya* masih tercakup dalam wilayah layanan Kota Kroya. Pedagang pada wilayah Kecamatan Sampang mengambil barang dagangannya di kota Kroya.

Bentuk pengimbasan yang lain berupa pengaruh pertumbuhan kota Sampang terhadap desa-desa di wilayahnya, dalam bentuk munculnya lapangan usaha di luar sektor pertanian di desa-desa, terutama pengolahan bahan makanan, perdagangan dan jasa. Hal ini menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap



sektor pertanian dan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian melalui pengolahan. Dengan demikian pengaruh kota kecamatan terhadap wilayah belakangnya dapat dilihat dari prosentase penduduk yang menggantungkan pada sektor pertanian. Semakin kecil nilainya akan semakin besar pengaruh kota yang sampai pada desa tersebut.

Sebagaimana pada kota Kroya dan kota Adipala, pengaruh kota Sampang terhadap desa-desa sekitarnya juga menurun seiring dengan menurunnya aksesibilitas desa terhadap kota. Hal ini dibuktikan melalui uji korelasi Spearman, yang menunjukkan derajat kepercayaan 95 persen, bahwa terjadi hubungan timbal balik antara aksesibilitas desa terhadap kota dengan kondisi perekonomian desa tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh nilai R_s sebesar 0,757 dengan nilai kritis 0,648. Nilai R_s lebih besar dari nilai kritis, berarti kesimpulan tersebut dapat diterima.

7.4. Pasar dan Sistem Pasar dalam Tata Ruang Wilayah

Sebagai fasilitas ekonomi yang utama, pasar memegang peranan yang penting dalam pengembangan ekonomi wilayah. Pasar berfungsi sebagai tempat memasarkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Untuk memperoleh manfaat yang optimal dari fasilitas pasar, penentuan lokasi pasar merupakan hal yang penting. Penentuan lokasi pasar akan mempengaruhi transportasi, biaya pegangkutan yang pada akhirnya akan mempengaruhi harga barang.

Kebijaksanaan penentuan lokasi pasar juga berpengaruh pada kemudahan masyarakat untuk mencapainya. Hal ini akan mempengaruhi jumlah masyarakat

yang memanfaatkan fasilitas pasar tersebut. Dengan demikian efektifitas fasilitas pasar ditentukan oleh penentuan letak dalam tata ruang wilayah.

Hasil pengamatan pada kecamatan contoh, lokasi pasar selalu pada posisi yang strategis, yaitu pada jalur transportasi utama dan dekat dengan fasilitas pelayanan yang lain seperti terminal, pertokoan, fasilitas hiburan seperti bioskop dan pusat pemerintahan.

Tinggi rendahnya aktifitas pasar sangat tergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat wilayah layanannya. Pasar Kroya yang merupakan salah satu pusat perdagangan di Kabupaten DT II Cilacap, terletak pada jalur lalulintas utama yang menghubungkan kota Cilacap dengan kota-kota lain di bagian timur Kabupaten DT II Cilacap, seperti Purwokerto, Banyumas dan Kebumen. Aktifitas pasar ini adalah yang paling tinggi diantara pasar contoh, yang dilihat dari luas tanah pasar, luas bangunan, jumlah pedagang, jumlah restribusi yang mencerminkan nilai transaksi pasar. Bila dilihat kondisi perekonomian Kecamatan Kroya, menduduki peringkat pertama dalam hirarkhi perekonomian kabupaten DT II Cilacap. Wilayah layanan dari pasar Kroya juga paling luas yang meliputi semua pasar contoh. Dengan demikian jumlah penduduk yang dilayani juga paling besar. Dalam sistem pasar, pasar Kroya menempati posisi sebagai pasar grosir yang melayani pasar-pasar lainnya dan sebagai pasar transit bagi arus barang dari maupun ke Kabupaten DT II Cilacap.

Untuk pasar yang nilai transaksinya kecil yang melayani wilayah yang sempit dengan jumlah penduduk yang sedikit dan daya beli yang terbatas, aktifitas pasar tidak terjadi setiap hari. Hal ini biasanya terjadi pada pasar desa yang



aktifitas pasarnya hanya dua sampai tiga kali dalam satu minggu. Lokasi pasar menurut hasil observasi pada pasar contoh tidak ada yang lebih jauh dari satu kilo meter dari pusat pemerintahan desa. Lokasi pasar berada pada jalan utama desa yang paling mudah dicapai.

Untuk meningkatkan volume transaksi para pedagang menjual barang dagangannya tidak pada satu tempat tetapi pada berbagai lokasi pasar. Hal ini bertujuan untuk memperluas wilayah layanan dan jumlah penduduk yang dilayani. Dalam satu minggu, pedagang bergerak pada dua sampai tiga lokasi untuk menjual barang dagangannya. Dengan demikian terbentuk suatu aktifitas pasar yang terjadi secara periodik pada hari-hari tertentu, sehingga terbentuk sistem pasar periodik pada suatu wilayah layanan tertentu. Suatu sistem pasar periodik memiliki suatu batas wilayah yang optimal. Di luar wilayah layanan tersebut akan ada sistem pasar lain yang melayani wilayah tertentu.

Pasar sebagai pusat aktifitas sosial ekonomi masyarakat, mempunyai kekuatan aglomerasi terhadap aktifitas perekonomian yang lain seperti berkembangnya sektor jasa dan industri pengolahan hasil pertanian. Hal ini terlihat dari hasil pengamatan pada pasar contoh, bahwa disekitar pasar selalu terjadi konsentrasi pertokoan dan fasilitas jasa. Kegiatan sektor industri pengolahan hasil pertanian dan industri rumah tangga mengambil lokasi yang optimal dari pusat pemasaran. Produsen akan memasarkan produknya pada lokasi yang memberikan keuntungan terbesar.

Kekuatan aglomerasi pasar berpadu dengan kekuatan aglomerasi dari pusat pemerintahan sehingga memberikan dampak pengimbasan ke daerah yang semakin



besar, baik dalam bentuk *spread effects* maupun *backwash effects*. Dalam struktur tata ruang wilayah pasar mendukung fungsi kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan kecil pedesaan.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



VIII. FUNGSI EKONOMI KOTA KECAMATAN DALAM PEMBANGUNAN

Dalam pembangunan wilayah terutama wilayah pedesaan fungsi kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pengembangan kecil pedesaan memiliki tiga fungsi utama, yaitu (1) sebagai pusat aktifitas ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan, (2) sebagai pusat lokasi pemukiman penduduk dan (3) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mengimbaskan denyutan pembangunan ke wilayah belakangnya dan menjadi perantara pertumbuhan kota besar ke pedesaan.

8.1. Kepadatan penduduk, Fasilitas Sosial Ekonomi, dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat

Analisis skor skalogram menunjukkan bahwa pada ketiga kota kecamatan yaitu Kroya, Adipala dan Sampang yang merupakan ibu kota Kecamatan Kroya, Adipala dan Kecamatan Sampang, terjadi konsentrasi pemukiman penduduk, konsentrasi aktifitas ekonomi masyarakat dan konsentrasi penyebaran fasilitas sosial ekonomi.

Kepadatan penduduk rata-rata untuk ketiga ibu kota kecamatan masing-masing adalah 5.243,96 jiwa per km² di kota Kroya, 2.088,84 jiwa per km² di Adipala dan 1.690,94 jiwa per km² di kota Sampang. Bila dibandingkan dari tiga ibu kota kecamatan tersebut, kota Kroya merupakan kota yang paling padat penduduknya.

Konsentrasi aktifitas ekonomi ditunjukkan dengan analisis skor kegiatan ekonomi. Pada ketiga kota kecamatan contoh menunjukkan peringkat pertama. Konsentrasi kegiatan ekonomi juga ditunjukkan oleh keragaman aktifitas ekonomi masyarakat. Pada ketiga kota kecamatan ini terdapat ragam aktifitas ekonomi yang

paling tinggi. Pada kota Kecamatan berkembang sektor skunder dan sektor tersier. Sektor skunder yang berkembang meliputi industri pengolahan terutama pada skala rumahtangga, serta sektor tersier yaitu sektor jasa yang meliputi jasa transportasi, komunikasi, keuangan dan rumah makan. Selengkapnya hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 13 dan 14. berikut ini.

Tabel 13. Kepadatan Penduduk, Peringkat Skalogram, dan Aktifitas Ekonomi di tiga Kota Kecamatan contoh, Tahun 1995.

| No | Kota | Kepadatan Penduduk | Peringkat Skalogram | Peringkat Perekonomian |
|----|---------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 1. | Kroya | 5.243,96 | 1 | 1 |
| 2. | Adipala | 2.088,84 | 1 | 1 |
| 3. | Sampang | 1.690,94 | 1 | 1 |

Sumber : Data olahan

Dari tabel di atas terlihat penyebaran fasilitas sosial ekonomi juga terkonsentrasi pada kota kecamatan, baik pada Kecamatan Kroya, Adipala maupun Kecamatan Sampang. Konsentrasi penyebaran fasilitas sosial ekonomi ini ditunjukkan melalui analisis skalogram. Pada analisis skalogram kota-kota kecamatan menduduki peringkat pertama baik dalam jumlah jenis dan jumlah unit fasilitas sosial ekonomi yang tersedia. Terkonsentrasinya fasilitas sosial ekonomi menambah efektifitas fasilitas tersebut karena melayani jumlah penduduk yang besar sehingga ambang batas penduduk terlampaui.

Terkonsentrasinya aktifitas ekonomi, penyediaan fasilitas sosial ekonomi dan kepadatan penduduk pada kota kecamatan merupakan proses yang kompleks dan terjadi secara bertahap. Hubungan yang saling mempengaruhi antara

kepadatan penduduk, penyediaan fasilitas sosial ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat terjadi secara simultan dalam selang waktu yang panjang. Konsentrasi pemukiman penduduk bisa terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki fasilitas sosial ekonomi yang lengkap atau sebaliknya konsentrasi penyediaan fasilitas sosial ekonomi di suatu wilayah karena penduduknya yang padat. Nilai koefisien korelasi untuk ketiga kecamatan dapat dilihat pada tabel 14 berikut.

Tabel 14. Koefisien korelasi Spearman pada Kecamatan Kroya, Adipala dan Sampang, Tahun 1996.

| No Kecamatan | Kepadatan & ekonomi | Kepadatan & fasilitas | Ekonomi & Fasilitas | Nilai Kritis | |
|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------|
| | | | | 0.01 | 0.05 |
| 1. Kroya | 0.220588 | 0.1868872 | 0.852328 | 0.618 | 0.488 |
| 2. Adipala | 0.457352 | 0.4316176 | 0.827205 | 0.635 | 0.503 |
| 3. Sampang | 0.221212 | 0.1636363 | 0.745454 | 0.794 | 0.648 |

Sumber : Data olahan

Pada tabel 14 koefisien korelasi Spearman terbesar pada hubungan antara kegiatan ekonomi dan tersedianya fasilitas sosial ekonomi. Hal ini dapat dimengerti karena perkembangan aktifitas ekonomi memerlukan tersedianya fasilitas pendukung yang baik. Uji *rank Spearman* menunjukkan hubungan yang nyata pada taraf nyata 0.01 pada Kecamatan Kroya dan Kecamatan Adipala dan nyata pada taraf 0.05 pada Kecamatan Sampang. Tingkat kepercayaan pada Kecamatan Sampang lebih rendah dari pada dua kecamatan lainnya dikarenakan hubungan saling mempengaruhi antara variabel tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang. Mengingat Kecamatan Sampang secara resmi terbentuk pada tahun 1993 maka pengaruhnya belum sebesar dua kecamatan yang lainnya.

Hubungan antara kepadatan penduduk dan kegiatan ekonomi, serta hubungan kepadatan penduduk dan tersedianya fasilitas sosial ekonomi tidak menunjukkan hubungan yang nyata pada tingkat nyata 0.01 maupun pada tingkat 0.05 di ketiga kecamatan. Hal ini bukan berarti keberadaan fasilitas sosial ekonomi dan konsentrasi kegiatan tidak mempengaruhi pola pemukiman masyarakat. Pemukiman masyarakat akan membentuk pola yang optimal dari pusat fasilitas sosial ekonomi dan pusat aktifitas perekonomian masyarakat. Keoptimalan pusat pemukiman ditentukan oleh jarak efektif pusat pemukiman dengan pusat tersedianya fasilitas sosial ekonomi dan pusat aktifitas ekonomi.

Jarak efektif lokasi pemukiman terhadap pusat fasilitas lebih dipengaruhi oleh kemudahan mencapainya dari pada jarak geografisnya. Kemudahan untuk mencapai lokasi ditentukan oleh tersedianya fasilitas transportasi dan fasilitas komunikasi di suatu wilayah pemukiman. Fasilitas transportasi ini meliputi tersedianya jalan yang menghubungkan wilayah tersebut ke wilayah lainnya, tersedianya sarana transportasi, baik transportasi umum seperti bus mikrolet, andong dan becak maupun transportasi pribadi. Hasil analisis menunjukkan pengaruh yang nyata antara aksesibilitas dengan perekonomian maupun dengan kepadatan penduduk pada ketiga kecamatan yang dianalisis. Hal ini ditunjukkan oleh analisis hubungan antara aksesibilitas wilayah dengan perekonomian dan kepadatan penduduk. Nilai koefisien korelasi Spearman dapat dilihat pada tabel 15 berikut ini:



Tabel 15. Nilai Koefisien Korelasi Spearman, Hubungan Antara Aksesibilitas dan Kepadatan Penduduk dan Aktifitas Ekonomi Wilayah Kecama- tan contoh, Tahun 1996

| No | Kecamatan | Aksesibilitas & Kepadatan | Aksesibilitas & Ekonomi | Nilai Kritis | |
|----|-----------|---------------------------|-------------------------|--------------|-------|
| | | | | 0,01 | 0,05 |
| 1. | Kroya | 0.526960 | 0.999876 | 0.618 | 0.488 |
| 2. | Adipala | 0.520588 | 0.822058 | 0.635 | 0.503 |
| 3. | Sampang | 0.360606 | 0.757575 | 0.794 | 0.648 |

Sumber : Data olahan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada ketiga kecamatan contoh terdapat hubungan timbal balik yang nyata antara aksesibilitas suatu wilayah pemukiman dengan perekonomian dan penyediaan fasilitas sosial ekonomi. Hubungan timbal balik antara aksesibilitas wilayah dengan ekonomi wilayah untuk ketiga kecamatan contoh terbukti pada taraf nyata 0.01 pada Kecamatan Kroya dan Kecamatan Adipala sedangkan pada Kecamatan Sampang terbukti pada taraf nyata 0.05.

Sedangkan hubungan timbal balik antara aksesibilitas wilayah dan kepadatan penduduk, terbukti pada taraf nyata 0.05 untuk Kecamatan Kroya dan Kecamatan Adipala, sedangkan untuk Kecamatan Sampang tidak terbukti pada taraf nyata ini.

Bila diamati nilai koefisien korelasi baik antara aksesibilitas dengan kepadatan penduduk maupun aksesibilitas dengan kegiatan ekonomi wilayah, koefisien tertinggi terdapat pada Kecamatan Kroya dan terendah pada Kecamatan Sampang. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh timbal balik antara aksesibilitas dengan kegiatan ekonomi dan kepadatan penduduk terlihat lebih nyata pada Kecamatan Kroya.

Hubungan yang tidak nyata antara aksesibilitas dan kepadatan penduduk di Kecamatan Sampang dan nilai koefisien korelasi yang paling rendah, disebabkan karena hubungan fungsional antar wilayah di Kecamatan Sampang belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena pembentukan kecamatan dan penyusunan struktur tata ruang kota Kecamatan Sampang baru sekitar tiga tahun yaitu pada tahun 1993, sehingga pengaruh perkembangan kota pada wilayah belakangnya belum begitu nampak. Berbeda dengan Kecamatan Kroya dan Adipala yang keberadaannya sudah semenjak Kabupaten DT II Cilacap berdiri dan penyusunan tata ruang kota kecamatan dilaksanakan pada tahun 1991. Dengan demikian pengaruhnya lebih nampak. Jadi hasil analisis ini mungkin menghasilkan angka yang berbeda jika dilaksanakan pada waktu yang akan datang.

8.2. Pengaruh Aksesibilitas Kota Kecamatan terhadap Fungsi Ekonomi Kota Kecamatan

Aksesibilitas kota kecamatan terhadap kota kecamatan lain maupun terhadap kota lain yang lebih tinggi hirarkhinya, seperti kota kabupaten akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kota kecamatan. Hal ini analog dengan aksesibilitas desa terhadap kota akan berpengaruh pada perekonomian wilayah tersebut, seperti yang sudah dibahas pada sub bab 8.1. Pertumbuhan yang tinggi kota kecamatan akan mengimbas ke wilayah belakangnya. Dengan demikian tingginya aksesibilitas kota kecamatan terhadap kota yang lebih tinggi jenjang hirarkhinya mempengaruhi aktifitas ekonomi dan konsentrasi fasilitas pelayanan sosial ekonomi di kota kecamatan, yang akan mengimbas ke wilayah pedesaan sekitarnya.

Salah satu fungsi kota kecamatan adalah menjadi perantara pengimbasan pertumbuhan kota kabupaten ke wilayah pedesaan. Fungsi ini akan didukung oleh aksesibilitas kota kecamatan terhadap kota kecamatan lain dan kota yang jenjang hirarkhinya lebih tinggi. Analisis skor skalogram yang menunjukkan perbandingan aksesibilitas dari ketiga kecamatan contoh, menunjukkan bahwa kota Kroya memiliki aksesibilitas yang paling tinggi disusul kota Adipala dan kemudian Sampang. Secara lengkap dapat ditelaah pada tabel 16. berikut ini:

Tabel 16. Analisis Skor Aksesibilitas Kecamatan Contoh, Tahun 1996.

| Kecamatan | Jrk ke Kab. | Pj. Jln Aspal | Jml. Truk | Jml. Air | Jml. Armd Colt | Jml. Jmlh. Mobil | Jml. Spd Motor | Jml. Do- Spd. kar | Be- Cak | An- dong | Jml Peringkat Skor | |
|-----------|-------------|---------------|-----------|----------|----------------|------------------|----------------|-------------------|---------|----------|--------------------|---|
| Kroya | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16.5 | 1 |
| Adipala | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 |
| Sampang | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.3 | 3 |

Sumber : Data olahan

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kecamatan Kroya menduduki peringkat pertama dari tiga kecamatan contoh, disusul Adipala dan Sampang. Aksesibilitas yang tinggi pada Kecamatan Kroya menyebabkan arus barang dan jasa serta mobilitas manusia menjadi lebih lancar.

Aksesibilitas yang tinggi pada kota Kroya akan mempengaruhi perekonomian kota Kroya dan Kecamatan Kroya. Hal ini ditunjukkan oleh analisis ekonomi wilayah dari ketiga kecamatan. Hasil analisis menempatkan perekonomian Kecamatan Kroya pada peringkat pertama, disusul Adipala dan Sampang. Seperti dibahas pada bab sebelumnya, mengenai hubungan aksesibilitas dengan perekonomian menghasilkan hubungan yang searah. Aksesibilitas yang

tinggi pada kecamatan dan kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi pada Kecamatan Kroya didukung oleh tersedianya fasilitas sosial ekonomi yang lengkap. Hal ini ditunjukkan oleh peringkat Skalogram Kecamatan Kroya dari tiga kecamatan contoh. Kecamatan Kroya menduduki peringkat pertama diikuti Kecamatan Adipala dan Kecamatan Sampang. Lebih jelasnya dapat ditelaah pada tabel 17 berikut:

Tabel 17. Hubungan Aksesibilitas Kecamatan Contoh dengan Perekonomian dan Penyebaran Fasilitas Sosial Ekonomi, Dilihat dari Skornya, Tahun 1996

| No Kecamatan | Aksesibilitas | Perkonomian | Fasilitas Sosek |
|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1. Kroya | 1 | 1 | 1 |
| 2. Adipala | 2 | 2 | 2 |
| 3. Sampang | 3 | 3 | 3 |

Sumber : Data olahan

Pola hubungan yang linier seperti ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan hubungan yang sangat erat antara aksesibilitas kecamatan terhadap kota dengan perekonomian kecamatan dan penyebaran fasilitas sosial ekonomi di kecamatan yang bersangkutan.

Dengan demikian fungsi kota kecamatan sebagai mediator pertumbuhan kota ke pedesaan, sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas kecamatan terhadap kota-kota lainnya. Hasil analisis menunjukkan dari ketiga kecamatan contoh, yang mempunyai fungsi paling besar sebagai perantara pertumbuhan adalah Kecamatan Kroya kemudian Adipala dan Sampang.

Hasil analisis ini menunjukkan pula bahwa fungsi perantara pertumbuhan kota ke desa dan efek pengimbasan pembangunan dari pusat pertumbuhan lebih besar pada kecamatan-kecamatan yang tergolong maju dan untuk memperluas jangkauan rembesan pertumbuhan di pusat diperlukan saluran-saluran pertumbuhan yang berupa fasilitas transportasi.

Percepatan pertumbuhan pada kutub pertumbuhan didukung tersedianya fasilitas transportasi ke daerah belakang akan mendorong perekonomian kedua daerah melalui hubungan yang saling menguntungkan. Daerah belakang dapat menjual hasil produksinya ke kota dan sebaliknya, kota juga memperoleh bahan baku bagi proses produksi dan sebaliknya kota menyediakan barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi di daerah belakang.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

IX. PASAR DAN SISTEM PASAR DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH

Pasar merupakan fasilitas ekonomi yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Sebagai sarana pertukaran, aktifitas pasar mencerminkan aktifitas perekonomian wilayah yang dilayani dan jumlah penduduk yang dilayani. Semakin kompleks aktifitas perekonomian masyarakat dan semakin besar jumlah penduduk yang dilayani menyebabkan semakin kompleksnya aktifitas pasar yang terjadi. Karena itu pembahasan mengenai pasar dan sistem pasar erat hubungannya dengan perekonomian wilayah.

9.1. Sistem Pasar Kecamatan Kroya

Kecamatan Kroya memiliki empat buah pasar umum, yaitu pasar Kroya di Desa Bajing, pasar Sikampuh di Desa Sikampuh, Gentasari di Desa Gentasari dan pasar Pucung lor di Desa Pucung lor. Dilihat dari aktifitas pasar, pasar Kroya merupakan pasar harian dalam arti aktifitas pasar terjadi setiap hari, dengan kegiatan pasar paling besar pada hari Pahing (perhitungan hari Jawa). Sedangkan di ketiga pasar lainnya kegiatan pasar terjadi dua kali dalam satu pasaran (lima hari).

Kegiatan pasar tidak berjalan setiap hari dikarenakan permintaan masyarakat yang rendah serta jumlah penduduk layanan dan wilayah layanannya yang terbatas pada beberapa desa di sekitar lokasi pasar. Untuk menambah jumlah penduduk yang dilayani dan wilayah layanannya pedagang harus berpindah ke lokasi pasar lainnya. Arus perpindahan pedagang antar lokasi pasar membentuk

suatu siklus pasar yang akan membentuk sistem pasar periodik pada wilayah tertentu.

Kegiatan pasar Sikampung pada hari Pahing dan Kliwon, Pucung lor pada hari Wage dan Manis sedangkan pasar Gentasari pada hari Pon dan Kliwon. Tabel 18 berikut ini menggambarkan lokasi pasar dan aktifitas pasar di Kecamatan Kroya.

Tabel 18. Penyebaran Pasar dan Aktifitas Pasar di Kecamatan Kroya, Tahun 1996

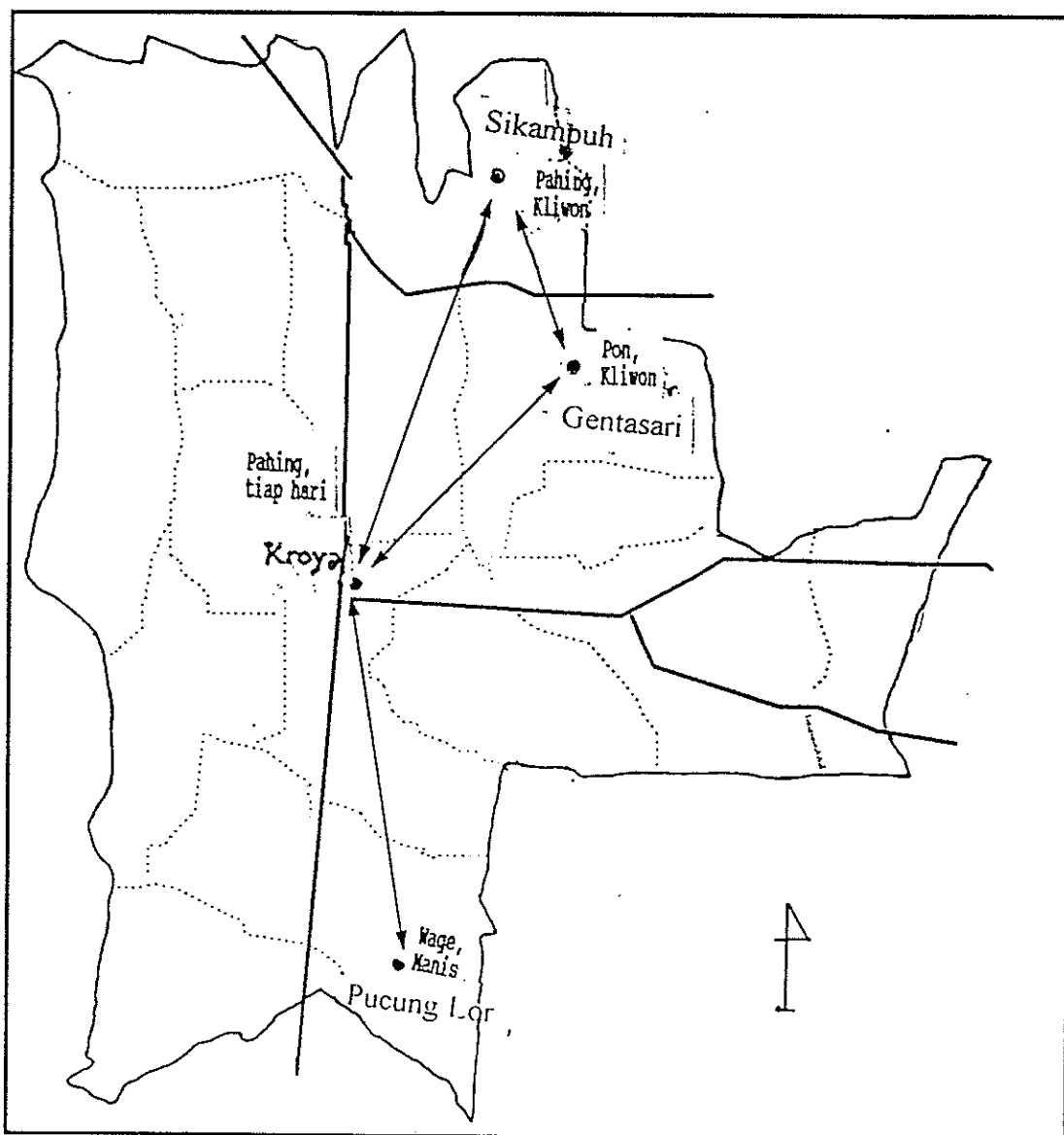
| No. | Nama Pasar | Lokasi Pasar | Hari-hari pasaran |
|-----|------------|-----------------|--------------------------|
| 1. | Kroya | Desa Bajing | Tiap hari(Pasaran Paing) |
| 2. | Gentasari | Desa Gentasari | Pon dan Kliwon |
| 3. | Sikampung | Desa Sikampung | Paing dan Kliwon |
| 4. | Pucung lor | Desa Pucung lor | Wage dan Manis |

Sumber : Dinas Pengelolaan pasa Kabupaten DT II Cilacap, 1996

Penyebaran pasar secara geografis relatif merata. Pasar Kroya terletak di tengah pusat kota Kroya, dengan jarak kurang dari satu km dari pusat pemerintahan Kecamatan Kroya, pasar Sikampung terletak di sebelah Barat wilayah Kecamatan Kroya, Gentasari di sebelah Utara dan pasar Pucung lor di sebelah Timur. Dengan demikian wilayah layanan pasar Kecamatan Kroya mencakup seluruh wilayah Kecamatan dengan pusat pasar Kroya sebagai pasar kecamatan.

Wilayah layanan pasar Kroya sebagai Pasar Kecamatan meliputi seluruh wilayah Kecamatan. Pedagang yang berdagang di pasar lainnya dilingkungan Kecamatan Kroya mengambil barang dagangannya dari pasar Kroya.

Pasar periodik yang tersebar pada desa-desa memiliki sistem gerak yang teratur sesuai hari-hari pasar yang telah tertentu. Penyebaran lokasi pasar dan sistem pergerakan pasar periodik pada Kecamatan Kroya dapat diamati pada gambar 6 berikut ini.



Gambar 6. Penyebaran dan gerak pasar periodik Kecamatan Kroya

Berdasarkan parameter yang dijadikan kriteria aktifitas pasar, pasar Kroya merupakan pasar yang terbesar, yang memiliki luas areal terbesar, jumlah kios dan jumlah los terbanyak, jumlah pedagang terbesar, serta pendapatan pasar yang terbesar. Lebih jelasnya dapat ditelaah pada tabel 19 berikut ini

Tabel 19. Luas Areal Pasar, Jumlah Pedagang, Jumlah Kion dan Los, Pendapatan Pasar Perhari Pasaran pada Kecamatan Kroya, Tahun 1996.

| No. Pasar | Luas areal pasar (m ²) | Jumlah Pedagang | Jumlah kios | Jumlah los | Pendapatan (rp) |
|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|
| 1. Kroya | 13675,1 | 480-542 | 169 | 37 | 155.150 |
| 2. Gentasari | 1200 | 86-151 | 7 | 6 | 7.500 |
| 3. Sikampung | 750 | 30- 52 | 4 | - | 4.000 |
| 4. Pucung lor | 350 | 72- 78 | 4 | 2 | 7.200 |

Dari tabel di atas dapat ditelaah bahwa aktifitas pasar yang paling besar pada pasar kroya, disusul kemudian pasar Gentasari yang menduduki peringkat kedua, pasar Sikampung dan Pucung lor. Perolehan pendapatan pasar akan dipengaruhi oleh luas areal pasar, jumlah kios, jumlah pedagang maupun jumlah los. Hal ini disebabkan karena pendapatan pasar diperoleh dari sewa kios, redistribusi pedagang serta sewa los.

Pasar merupakan pusat aglomerasi aktifitas ekonomi wilayah. Kondisi ini dapat ditunjukkan oleh aglomerasi pelayanan ekonomi di sekitar pasar yang berupa pertokoan dan fasilitas pendukung seperti transportasi, keuangan dan informasi.

Tabel 20 menunjukkan konsentrasi aktifitas perdagangan disekitar pasar dan

fasilitas pendukung di sekitar pasar yang berbanding lurus dengan besarnya aktifitas pasar.

Tabel 20. Jumlah Pertokoan, Fasilitas Pendukung Aktifitas Perekonomian di Sekitar Pasar di Kecamatan Kroya, Tahun 1996

| No. | Pasar | Jumlah Toko | Fasilitas Pendukung | Jarak ke kota Kecamatan |
|-----|------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. | Kroya | 87 | Bank, pegadaian, Terminal | 0.8 km |
| 2. | Gentasari | 6 | - | 7 km |
| 3. | Sikampuh | 12 | - | 3 km |
| 4. | Pucung lor | 3 | - | 3.5 km |

Tersedianya fasilitas ekonomi akan memperkuat aglomerasi kegiatan sosial ekonomi di sekitar pasar. Dari tabel terlihat fasilitas pendukung dan konsentrasi pertokoan terjadi pada pasar Kroya, yang merupakan pasar terbesar di Kecamatan Kroya.

9.2. Sistem Pasar Kecamatan Adipala

Kecamatan Adipala memiliki lima pasar, yaitu dua pasar di Desa Adipala, salah satunya merupakan pasar kecamatan dan yang lain pasar desa, pasar Adiraja di Desa Adiraja, pasar Glempangpasir di Desa Glempangpasir dan pasar Welahan Wetan di Desa Welahan Wetan.

Sebagaimana pada Kecamatan Kroya, pada Kecamatan Adipala aktifitas pasar bervariasi dilihat dari frekuensinya. Aktifitas pasar Adipala yang merupakan pasar kecamatan terjadi setiap hari, dengan aktifitas terbesar pada hari Pon

(perhitungan jawa). Aktifitas pasar lainnya ada yang berlangsung tiap hari untuk pasar Adipala (pasar desa) dan pasar Adiraja. Sedangkan untuk pasar lainnya kegiatan pasar antara dua sampai tiga kali dalam satu pasaran (satu pasaran sama dengan lima hari). Tabel 21 berikut ini menjelaskan penyebaran pasar dan aktifitas pasar dalam wilayah Kecamatan Adipala.

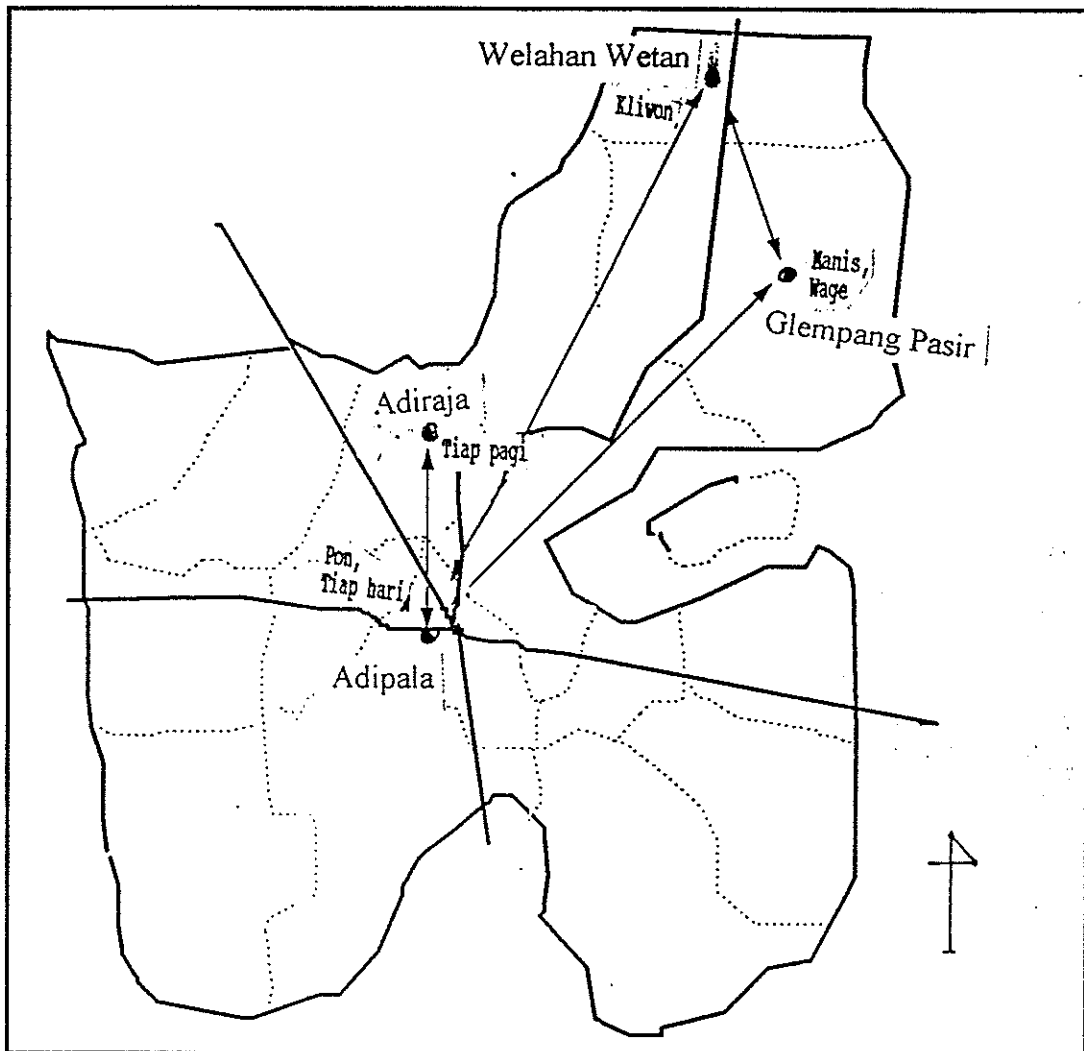
Tabel 21. Penyebaran Pasar dan Hari-Hari Pasaran di Kecamatan Adipala, Tahun 1996

| No. | Nama pasar | Lokasi pasar | Hari-hari pasaran |
|-----|---------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Adipala* | Desa Adipala | tiap hari, Pon |
| 2. | Adipala | Desa Adipala | tiap hari |
| 3. | Adiraja | Desa Adiraja | tiap hari |
| 4. | Glempangpasir | Desa Glempangpasir | Manis dan Wage |
| 5. | Welahan Wetan | Desa Welahan Wetan | Kliwon |

Keterangan : * : pasar kecamatan

Aktifitas pasar pada sebagian besar pasar di Adipala berlangsung setiap hari, kecuali pasar Glempangpasir dan pasar Welahan Wetan yang berlangsung masing-masing dua kali dan sekali dalam satu pasaran (lima hari). Aktifitas pasar pada pasar Adipala baik pasar kecamatan maupun pasar desa terjadi tiap hari. Tetapi untuk pasar desa berlangsung pagi hari antara pukul 05.30 sampai pukul 10.00 wib, demikian juga untuk pasar Adiraja. Bila diamati lokasi pasar desa Adipala dan Adiraja masih dalam lingkungan wilayah kota Adipala. Dengan demikian dapat dimengerti bila permintaan barang dan jasa masyarakat lebih tinggidari pada desa-desa lainnya sehingga memerlukan pelayanan pasar yang frekuensinya lebih sering.

Penyebaran pasar secara geografis, aktifitas pasar desa periodik, ditelaah melalui arah pergerakan pedagang yang membentuk sistem pergerakan pasar periodik dapat ditelaah pada gambar 7. berikut:



Gambar 7. Pergerakan pasar di Kecamatan Adipala.

Aktifitas pasar desa terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok harian masyarakat. Dari hasil observasi, sebagian besar barang yang diperdagangkan berupa barang kebutuhan pokok.

Dilihat dari besarnya aktifitas pasar, maka aktifitas pasar yang terbesar adalah pasar kecamatan yang berada di Desa Adipala, parameter besaran pasar meliputi luas areal pasar, jumlah kios, jumlah los, jumlah pedagang dan besarnya nilai pendapatan pasar. Lebih jelasnya dapat ditelaah pada tabel 22. berikut ini.

Tabel 22. Luas Areal Pasar, Jumlah Pedagang, Jumlah Kios dan Nilai Pendapatan Pasar Kecamatan Adipala, Tahun 1996

| No. Nama pasar | Luas Areal | Jumlah kios | Jumlah los | Jumlah Pedagang | Pendapatan pasaran |
|------------------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------------|
| 1. Adipala* | 7848 | 61 | 13 | 254-311 | 85000 |
| 2. Adipala | 215 | 4 | 4 | 39- 63 | 6500 |
| 3. Adiraja | 1100 | 7 | 6 | 64-115 | 9000 |
| 4. Glemgangpasir | 225 | - | 3 | 60-70 | 7500 |
| 5. Welahan wetan | 975 | - | 5 | 95-140 | 5250 |

Keterangan : * : pasar kecamatan

Besarnya aktifitas pasar Adipala dikarenakan hubungan yang saling mempengaruhi antara jumlah penduduk, tersedianya fasilitas pendukung lainnya sehingga efektifitas pasar lebih tinggi dari pasar desa lainnya. Sebaliknya aktifitas pasar yang besar juga akan menyebabkan terkonsentrasinya aktifitas ekonomi lainnya pada ruang di sekitar pasar tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya pertokoan disekitar pasar, lembaga informasi dan lembaga keuangan di sekitar pasar.

Sebagai pasar kecamatan, pasar Adipala mempunyai wilayah layanan yang meliputi seluruh wilayah Kecamatan Adipala, sehingga memiliki peranan yang sangat penting sebagai tempat masyarakat memperoleh barang keperluannya dan petani menjual produksinya. Lebih jelasnya dapat ditelaah pada tabel 23. berikut

Tabel 23. Banyaknya Toko dan Fasilitas Pendukung di Sekitar Pasar Adipala, Tahun 1996

| No | Nama pasar | Jumlah toko di Sekitar pasar | Jenis Fasilitas pendukung | Jarak ke kecamatan |
|----|----------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1. | Adipala * | 15 | Terminal, pegadaian, bank | 0.2 km |
| 2. | Adipala | 3 | | 1 km |
| 3. | Adiraja | 3 | | 2 km |
| 4. | Glempang pasir | 2 | | 7 km |
| 5. | Welahan Wetan | 1 | | 11 km |

Keterangan : * : pasar kecamatan

9.3. Sistem Pasar Kecamatan Sampang

Kecamatan Sampang merupakan kecamatan yang relatif muda. Secara definitif Kecamatan Sampang berdiri pada tahun 1993. Sebelum itu wilayah Kecamatan Sampang masuk kedalam wilayah Kecamatan Maos. Semenjak secara definitif menjadi kecamatan sendiri, belum ada lokasi pasar baru yang berdiri. Jumlah pasar yang berada di wilayah Kecamatan Sampang terdiri dari dua buah pasar yaitu pasar. Sampang di desa Sampang dan pasar Karangjati di desa Karangjati. Pasar Sampang merupakan pasar Kecamatan, sedangkan pasar Karangjati merupakan pasar desa. Aktifitas pasar Sampang terjadi pada setiap hari, dengan aktifitas tertinggi pada hari Manis. Lokasi yang strategis yang berada pada jalur utama antar kecamatan dan antar Kabupaten merupakan salah satu sebab tingginya aktifitas pasar di pasar Sampang ini.

Aktifitas pasar Karangjati berlangsung pada setiap hari Paing dan Wage. Pada Kecamatan Sampang ini tidak terlihat sistem pergerakan pasar periodik.

Satu-satunya pasar periodik adalah pasar Karangjati. Pergerakan pasar pada pasar Karangjati ini berhubungan dengan pasar Gentasari pada Kecamatan Kroya. Pedagang berdagang pada hari Paing dan Wage pada pasar Karangjati, sedangkan pada hari Pon dan Kliwon di pasar Gentasari di Kecamatan Kroya.

Sebagai pasar kecamatan pasar Sampang merupakan tempat konsentrasi kegiatan ekonomi terutama perdagangan dan jasa. Di sekitar pasar terdapat 56 buah toko dan dilengkapi dengan fasilitas pemberhentian angkutan pedesaan, bank, wartel dan pagadaian. Pendapatan pasar Sampang pada hari pasaran cukup besar yaitu berkisar antara 95.000 sampai 125.000 rupiah tiap hari. Hal ini tentunya didukung oleh jumlah pedagang yang mencapai 400 orang dengan luas areal pasar 6.069 meter persegi. Dalam areal pasar didirikan sebanyak 57 buah kios dan tujuh unit los yang menampung 288 orang pedagang.

Pasar desa pada Kecamatan Sampang merupakan pasar yang relatif kecil dengan luas areal hanya 185 m². Jumlah kios yang ada hanya dua dengan jumlah pedagang antara 14 - 20 orang pada hari pasaran yang terjadi tiga kali dalam satu pasaran (lima hari) yaitu pada hari Paing, Manis dan Wage.

9.4. Aktifitas Pasar dan Fungsi Ekonomi Kota Kecamatan

Penelaahan aktifitas pasar pada ketiga kecamatan contoh, terutama yang menyangkut pasar kecamatan dilaksanakan dengan membandingkan variabel yang mencerminkan kegiatan pasar baik variabel langsung maupun variabel tidak langsung. Variabel langsung meliputi luas areal pasar, jumlah kios dan jumlah los, jumlah pedagang dan nilai transaksi rata-rata pedagang per hari. Sedangkan



variabel tidak langsung misalnya jumlah redistribusi dan pendapatan pasar dalam setiap hari pasaran. Analisis perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 24 berikut ini.

Tabel 24. Perbandingan Aktifitas Pasar Kecamatan pada Kecamatan Contoh, Tahun 1996

| No. | Nama pasar | Luas (m ²) | Jumlah kios | Jumlah los | Jumlah pedagang | | Transaksi rata-rata | Pendapatan | |
|-----|------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------|------------------------|------------|---------|
| | | | | | Pasaran | Harian | | Pasaran | Harian |
| 1. | Kroya | 13.675 | 169 | 37 | 542 | 452 | 111.000-425.000 | 155.150 | 134.200 |
| 2. | Adipala | 7.848 | 61 | 13 | 311 | 146 | 94.500-238.500 | 85.000 | 43.500 |
| 3. | Sampang | 6.069 | 57 | 7 | 400 | 274 | 193.000-336.500 | 95.000 | 125.000 |

Dari tabel diatas terlihat bahwa aktifitas pada pasar terbesar terjadi pada pasar Kroya, kemudian disusul oleh pasar Sampang dan baru Adipala. Jumlah kios dan los di pasar Kroya mencapai 169 buah dan 37 buah, di pasar Adipala 61 dan 13 buah sedangkan di pasar Sampang 57 buah kios dan 7 buah los. Jumlah pedagang di ketiga pasar juga bervariasi. Pada pasar Kroya jumlah pedagang harian mencapai 452 orang dan pasaran mencapai 542 orang pedagang. Sedangkan untuk pasar Adipala pada hari pasaran mencapai 311 orang pedagang dan 146 pedagang pada hari biasa. Jumlah pedagang yang beroperasi pada pasar Sampang lebih banyak dari pada pedagang yang berdagang pada pasar Adipala, yaitu 274 orang pedagang pada hari biasa dan 400 orang pada hari pasaran.

Nilai transaksi rata-rata pada ketiga pasar tersebut adalah 111.000 sampai 425.000 pada pasar Kroya, 94.500 sampai 238.500 pada pasar Adipala dan pada pasar Sampang antara 193.000 sampai 336.500. Jika dilihat dari jumlah

pendapatan redistribusi, pasar Kroya menempati urutan pertama kemudian pasar Sampang dan baru pasar Adipala.

Aktifitas pasar di pasar Sampang yang tinggi disebabkan karena kekuatan lokasi yang strategis, karena terletak pada jalur transportasi utama antar Kabupaten, yaitu Cilacap dengan Kabupaten Banyumas dan Kebumen, disamping jalur transportasi antar kecamatan, yaitu kecamatan Adipala, Maos, Cilacap yang menghubungkan dengan kecamatan dan kabupaten sekitarnya.

Besarnya aktifitas pasar di Kecamatan Kroya menunjukkan kondisi dinamis perekonomian di desa ini, seperti yang telah dianalisis pada bab sebelumnya. Potensi kegiatan perdagangan dan jasa pada Kecamatan Sampang ditunjukkan dengan besarnya nilai transaksi pasar dan aktifitasnya. Sektor ini dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai pusat aglomerasi perekonomian wilayah yang akan menciptakan struktur perekonomian baru dan membuka peluang berusaha dan peluang kerja bagi masyarakat setempat. Kondisi perekonomian di Kecamatan Sampang ini yang lebih rendah dari Kecamatan Adipala meskipun aktifitas pasarnya dan kegiatan perdagangan serta jasa pada kecamatan ini cukup berkembang menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan pusat kota belum mengimbas pada daerah belakang dengan baik. Hal ini salah satunya disebabkan karena fasilitas transportasi yang kurang baik pada Kecamatan Sampang yang ditunjukkan oleh analisis skalogram pada bidang aksesibilitas, Kecamatan Sampang menduduki peringkat 13 dari 19 kecamatan yang dianalisis disamping waktu perembesan pertumbuhan yang belum lama karena baru tiga tahun kecamatan ini berdiri dan dilaksanakan penyusunan tata ruang kecamatan.

Meskipun demikian aksesibilitas kota Kecamatan Sampang sangat tinggi karena lokasinya yang sangat strategis. Hal ini juga yang menyebabkan Kecamatan Sampang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan pada SWP II. Kota Sampang dengan aksesibilitasnya yang tinggi memiliki potensi sebagai pusat pemasaran hasil pertanian dan menyediakan sarana produksi dan kebutuhan bagi masyarakat sekitarnya dan kecamatan hinterlandnya. Potensi pengembangan pada sektor jasa dan perdagangan akan mendorong produksi kecamatan hinterlandnya yang memiliki potensi sebagian besar pada sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.

9.5. Arus Barang dan Karakteristik Perdagangan

Dari hasil analisis dapat ditelaah bahwa arus barang dan jasa di kecamatan contoh didominasi oleh produk-produk dari luar kecamatan tersebut. Pada Kecamatan Kroya 66,67 persen barang yang diperdagangkan berasal dari luar kecamatan, di Kecamatan Adipala sebesar 70,588 persen dan di Kecamatan Sampang sebesar 86,665 persen. Kondisi demikian menunjukkan bahwa wilayah tersebut masih menjadi tempat pemasaran produk dari wilayah lain dan kemampuan produksi lokal perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya dan lebih lanjut untuk meningkatkan perdagangan dengan daerah lain. Kondisi demikian juga mengindikasikan bahwa arus uang pada wilayah tersebut lebih banyak yang keluar dari pada yang masuk, sehingga surplus perdagangan wilayah tersebut negatif.



Bila dihubungkan dengan perkembangan kota kecamatan, pangsa pasar produk lokal terbesar pada Kecamatan Kroya yaitu sebesar 33,33 persen, Adipala 29,412 persen dan Sampang 13,33 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kota kecamatan berkorelasi positif dengan produktifitas wilayah. Semakin maju kinerja perekonomian pada kota kecamatan akan memberikan pengaruh yang semakin besar pada wilayah belakangnya dan akan memberikan - dorongan pada kegiatan ekonomi wilayah belakang dalam bentuk peningkatan produksi.

Dari hasil pengamatan, arus barang dari luar berupa barang-barang kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder. Barang kebutuhan pokok meliputi bumbu dapur, sayur dan buah serta pakaian. Sedangkan kebutuhan sekunder berupa barang elektronika, jasa perbankan dan sarana produksi. Sedangkan arus barang lokal meliputi hasil pertanian dan olahannya, dalam skala rumah tangga dan kerajinan rumah tangga. Sektor jasa terbatas pada pelayanan transportasi lokal dan antar kecamatan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sampai saat ini besarnya pengaruh *spread effects* masih lebih kecil dari *backwash effects*. Berarti wilayah tersebut masih dirugikan. Tetapi menunjukkan kecenderungan yang semakin berkurang dengan meningkatnya kinerja perekonomian wilayah tersebut. Dengan demikian peningkatan fungsi kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan pedesaan sangat penting untuk mengurangi pengaruh *back wash effects* tersebut.



BAB X PEMBAHASAN

Perencanaan pembangunan pedesaan didasarkan pada hubungan fungsional antar wilayah perencanaan. Perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan pembangunan dari bawah dan dari atas (*bottom up and top down planning*). Pendekatan ini memadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan wilayah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pendekatan pembangunan wilayah pada Kabupaten DT II Cilacap dilaksanakan dengan menyusun perencanaan pembangunan yang didasarkan pada hubungan fungsional antar wilayah. Karena itu disusun satuan-satuan perencanaan yang dikenal dengan Sub Wilayah Pembangunan (SWP). Wilayah Kabupaten DT II Cilacap terbagi dalam tujuh Sub Wilayah Pembangunan.

Perencanaan pembangunan wilayah disusun berdasarkan konsep Kutub Pertumbuhan dan Pusat Pertumbuhan. Berkaitan dengan hal itu, kota kecamatan dijadikan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan kecil pedesaan dengan menyediakan fasilitas kebutuhan dasar dan fasilitas ekonomi untuk menunjang pertumbuhan wilayah.

Tersedianya fasilitas sosial ekonomi di kota kecamatan akan menimbulkan aglomerasi aktifitas ekonomi dan pemukiman penduduk sehingga menciptakan skala usaha yang ekonomis. Timbulnya berbagai aktifitas ekonomi di kota kecamatan akan mengimbas ke wilayah sekitarnya melalui arus barang, modal, tenaga kerja dan jasa. Pengaruh pertumbuhan kota kecamatan pada desa

sekitarnya melalui jalur-jalur tertentu yang besarnya berbeda sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah belakangnya dan posisi geografisnya.

Besarnya pengaruh pertumbuhan kota kecamatan yang diterima oleh wilayah belakangnya dipengaruhi oleh: (1) Aksesibilitas wilayah belakang terhadap kota (pusat pertumbuhan), tersedianya fasilitas sosial ekonomi di kota kecamatan, aktifitas ekonomi pada kota kecamatan dan tersedianya fasilitas pemasaran (pasar).

1. Aksesibilitas wilayah belakang terhadap kota.

Aksesibilitas suatu wilayah (desa) dinyatakan dengan: (1) tersedianya sarana jalan, (2) armada transportasi, (3) jarak terhadap kota kecamatan dan (4) tersedianya sarana komunikasi seperti telepon, TV dan radio. Tersedianya fasilitas transportasi dan komunikasi merupakan syarat agar wilayah tersebut dapat berhubungan dengan wilayah lain. Kemudahan untuk mencapai wilayah tertentu akan memperlancar arus barang dan jasa dari dan ke wilayah tersebut, sehingga meningkatkan aktifitas perekonomian masyarakat dalam bentuk peningkatan jumlah, jenis produksi dan meningkatkan perdagangan. Wilayah-wilayah yang memiliki lokasi geografi yang baik akan memiliki aksesibilitas yang baik pula. Wilayah ini biasanya terletak sepanjang jalur transportasi utama sehingga memiliki keuntungan lokasi.

Pengaruh timbal-balik antara aksesibilitas wilayah dengan aktifitas perekonomian di wilayah tersebut memiliki hubungan yang nyata. Parameter yang dijadikan sebagai indikasi perekonomian di suatu wilayah antara lain: (1) produksi domestik wilayah (desa), (2) pendapatan perkapita, (3) fasilitas perekonomian

seperti bank, pasar dan KUD, (4) unit usaha dalam sektor industri kecil dan jasa, (5) persentase penduduk yang bekerja di luar sektor pertanian dan luas areal pertanian. Analisis pada kecamatan contoh menunjukkan bahwa angka korelasi peringkat Spearman menunjukan angka 0,9998 pada Kecamatan Kroya, 0,822 pada Kecamatan Adipala dan 0,758 pada Kecamatan Sampang. Nilai koefisien korelasi yang tinggi menunjukan keeratan hubungan antara kedua variabel tersebut. Pada wilayah yang memiliki fasilitas transportasi dan komunikasi yang baik akan memiliki kinerja perekonomian yang baik pula dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan peranan aksesibilitas wilayah terhadap perekonomian wilayah. Untuk mengembangkan perekonomian wilayah-wilayah yang terbelakang aspek ini perlu mendapat perhatian yang besar. Kondisi aksesibilitas wilayah yang baik akan memperlancar arus barang dan jasa dan menurunkan biaya transportasi sehingga kegiatan produksi akan lebih efisien.

Pengaruh pengimbasan pusat pertumbuhan (kota kecamatan) terhadap wilayah layanannya (desa-desa) sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas desa terhadap kota tersebut. Jalur perembesan pertumbuhan pada pusat dengan demikian akan searah dengan jalur-jalur transportasi yang diikuti oleh pemukiman penduduk dan tumbuhnya unit usaha serta aktifitas ekonomi baru.

Pertumbuhan pada kota kecamatan juga dipengaruhi oleh aksesibilitas kota kecamatan terhadap kota lainnya yang dinyatakan dengan tersedianya fasilitas transportasi dan komunikasi pada kota tersebut. Kota Kroya dalam analisis fasilitas sosial ekonomi pada sektor transportasi menduduki peringkat pertama, demikian juga pada peringkat perekonomiannya. Kota Adipala pada peringkat ke tiga dalam



peringkat transportasi dan peringkat enam pada perekonomian. Sedangkan Kota Sampang menduduki peringkat 14 pada skor transportasi dan peringkat 19 pada skor perekonomian wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pada pusat (kota kecamatan) juga dipengaruhi oleh aksesibilitas kota tersebut.

Besarnya aktifitas dan pertumbuhan pada kota kecamatan akan mempengaruhi besarnya efek perembesan yang diterima oleh wilayah belakangnya (desa-desa). Dengan demikian secara tidak langsung kondisi perekonomian wilayah layanan (desa) dipengaruhi oleh aksesibilitas kota kecamatan. Pengaruh perembesan kota kecamatan lebih besar pada kota kecamatan yang memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dan memiliki fasilitas transportasi dan komunikasi yang baik.

2. Tersedianya fasilitas sosial ekonomi kota kecamatan.

Suatu unit usaha akan lebih efisien jika berlokasi pada lokasi yang strategis, baik dekat dengan sumber bahan baku maupun dekat dengan daerah pasar. Lokasi yang strategis ini akan memberikan keuntungan yang besar pada investor. Jika investasi ditanam pada suatu daerah tertentu akan lebih efisien dibandingkan menyebar pada wilayah yang luas dengan jumlah investasi kecil. Analog dengan konsep tersebut maka penyediaan fasilitas sosial ekonomi pada lokasi tertentu akan lebih efisien dibandingkan menyebar pada berbagai lokasi. Hal ini karena setiap fasilitas memiliki ambang batas penduduk yang berbeda dan adanya hubungan yang saling mendukung antara fasilitas yang satu dengan lainnya. Kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan pedesaan merupakan



tempat yang sesuai sebagai pusat penyediaan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi.

Tersedianya fasilitas sosial ekonomi pada kota kecamatan akan menarik arus investasi, membentuk pola pemukiman penduduk dan pusat mobilitas penduduk di wilayah kecamatan yang bersangkutan dengan kekuatan aglomerasinya. Konsentrasi investasi, pemukiman dan mobilitas penduduk akan mempercepat pertumbuhan wilayah dan memberikan pengaruh pengimbasan terhadap wilayah belakangnya yang semakin besar dan luas melalui jalur-jalur tertentu.

Korelasi antara tersedianya fasilitas sosial ekonomi dengan ekonomi wilayah menunjukkan nilai yang signifikan. Nilai koefisien korelasi antara ketersediaan fasilitas sosial ekonomi dengan aktifitas perekonomian di suatu wilayah menunjukkan angka yang tinggi yaitu 0,852 pada Kecamatan Kroya, 0,827 pada Kecamatan Adipala dan 0,746 pada Kecamatan Sampang.

Besarnya nilai koefisien korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan timbal balik yang nyata antara tersedianya fasilitas sosial ekonomi dengan aktifitas ekonomi. Ketersediaan fasilitas sosial ekonomi di suatu wilayah akan mempengaruhi perekonomian wilayah tersebut. Pada wilayah yang memiliki fasilitas sosial ekonomi yang baik akan terdapat aktifitas ekonomi yang tinggi dan sebaliknya. Hal ini memberi informasi bahwa selain fasilitas transportasi, untuk mengembangkan wilayah diperlukan pesediaan fasilitas sosial ekonomi yang baik.

Kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan kecil pedesaan merupakan tempat konsentrasi tersedianya fasilitas sosial ekonomi. Hal ini ditunjukkan melalui analisis



skalogram pada ketiga kecamatan contoh. Kota kecamatan menempati peringkat pertama baik di Kecamatan Kroya, Adipala maupun Sampang.

Pada tingkat kabupaten, pada analisis hirarkhi fasilitas sosial ekonomi, Kecamatan Kroya menempati peringkat pertama, Kecamatan Adipala di peringkat ke tujuh dan Kecamatan Sampang di peringkat ke 18. Analisis skor perekonomian menunjukan di Kecamatan Kroya menempati peringkat pertama, Adipala di peringkat ke enam dan Kecamatan Sampang di peringkat ke 19. Hal ini menunjukan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi di kota kecamatan mempengaruhi pertumbuhan kota kecamatan dan mempengaruhi perekonomian wilayah belakangnya (desa-desa) layanannya. Karena itu dalam rangka memberdayakan wilayah yang kurang/tidak berkembang, diperlukan pembangunan fasilitas sosial ekonomi pada wilayah tersebut sebagai motor penggerak pembangunan di wilayah tersebut.

3. Aktifitas ekonomi pada kota kecamatan.

Investasi yang terpusat akan menimbulkan skala usaha yang ekonomis dan lebih efisien dari pada menyebar. Kekuatan aglomerasi kota kecamatan yang disebabkan oleh terkonsentrasinya fasilitas sosial ekonomi akan menarik kegiatan ekonomi dan investasi ke kota kecamatan sehingga kota kecamatan merupakan tempat konsentrasi kegiatan ekonomi masyarakat.

Aktifitas ekonomi yang tinggi pada kota kecamatan akan memerlukan masukan berupa bahan baku dan tenaga kerja yang lebih banyak dari wilayah



sekitarnya. Disamping itu akan menimbulkan beragam usaha di sektor jasa, timbulnya sektor informal serta industri skala rumahtangga.

Pada mulanya sektor yang muncul adalah perdagangan dan industri pengolahan hasil pertanian dalam skala rumahtangga sehingga menciptakan nilai tambah pada komoditi pertanian. Pada tahap selanjutnya muncul industri tersier (jasa) komunikasi dan keuangan yang lebih memacu pertumbuhan industri pengolahan hasil pertanian.

Munculnya aktifitas ekonomi baru akan menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha di luar sektor pertanian sehingga akan menurunkan ketergantungan perekonomian wilayah tersebut dan wilayah layanannya terhadap sektor pertanian. Besarnya peluang berusaha di luar sektor pertanian tercermin dari banyaknya masyarakat yang bekerja di luar sektor pertanian.

Pada ketiga kecamatan contoh Kecamatan Kroya menempati peringkat pertama dalam analisis skor perekonomian, Kecamatan Adipala di peringkat ke enam dan Sampang di peringkat 19. Aktifitas perekonomian yang tinggi pada Kecamatan Kroya akan mengimbas lebih besar ke wilayah layanannya dibandingkan dengan Kecamatan Adipala yang menduduki peringkat ke dua dan Kecamatan Sampang pada peringkat ke tiga dari kecamatan contoh. Besarnya pengaruh pertumbuhan kota ke wilayah belakangnya ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi antara aksesibilitas wilayah dan aktifitas ekonomi dengan tersedianya fasilitas sosial ekonomi pada kota kecamatan. Nilai koefisien korelasi pada Kecamatan Kroya merupakan yang terbesar, disusul Adipala dan Sampang seperti dikemukakan pada sub bab di atas.



4. Tersedianya fasilitas pemasaran

Fasilitas pasar merupakan salah satu fasilitas ekonomi masyarakat yang memiliki arti strategis dalam mendukung pertumbuhan wilayah. Pasar merupakan fasilitas sentral dalam memasarkan produk dan memperoleh kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sarana produksi yang berupa bahan baku dan peralatan. Dengan demikian pasar merupakan urat nadi perekonomian wilayah.

Besarnya aktifitas pasar memiliki hubungan yang erat dengan kondisi ekonomi masyarakat dan tingkat produksinya. Semakin maju aktifitas ekonomi pada suatu lokasi, maka aktifitas pasar pada lokasi itu akan lebih majemuk.

Kecamatan Kroya merupakan kecamatan yang paling maju perekonomiannya. Hubungannya dengan aktifitas pasar ditunjukkan bahwa pasar Kroya merupakan pasar yang terbesar aktifitasnya di lihat dari luas pasar, jumlah pedagang dan aktifitas transaksinya (lampiran 23 sampai 27). Kecamatan Sampang yang merupakan Kecamatan yang terbelakang hanya memiliki dua pasar dan aktifitas pasar yang kecil dibanding dengan Kecamatan Kroya maupun Adipala yang memiliki masing-masing lima pasar dan tujuh pasar. Dapat dimengerti bila aktifitas pasar dan perekonomian pada Kecamatan Sampang terendah dari ketiga kecamatan contoh.

Aktifitas pasar yang besar akan mendorong perekonomian pusat pertumbuhan dan juga wilayah belakangnya dalam bentuk pemasaran hasil produksi pertanian. Penyediaan fasilitas pemasaran ini selayaknya mendapat perhatian yang besar dari pihak yang terkait dengan pembangunan wilayah.



XI. KESIMPULAN DAN SARAN

11.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil telaahan terhadap fungsi ekonomi kota kecamatan dalam pembangunan wilayah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kota kecamatan berfungsi sebagai pusat permukiman penduduk, pusat aktifitas ekonomi dan sebagai pusat penyediaan fasilitas sosial ekonomi yang akan memberikan pengaruh pertumbuhan pada desa-desa sekitarnya.
2. Hubungan pusat dengan hinterland dan jangkauan perembesan pertumbuhan wilayah dipengaruhi oleh aksesibilitas wilayah hinterland terhadap kota kecamatan, tersedianya fasilitas sosial ekonomi di kota kecamatan dan kepadatan penduduk. Variabel yang paling berpengaruh adalah aksesibilitas wilayah terhadap kota.
3. Aksesibilitas pusat pertumbuhan kecil (kota kecamatan) terhadap pusat lain atau kota yang hirarkhinya lebih tinggi berpengaruh positif pada pertumbuhan pusat dan pada pertumbuhan wilayah layanannya serta mempengaruhi jangkauan perembesan.
4. Terdapat hubungan timbal balik antara besarnya aktifitas pasar dengan aktifitas perekonomian masyarakat di suatu wilayah, jumlah penduduk layanan dan luas wilayah layanannya. Aktifitas pasar akan lebih besar pada wilayah yang kondisi sosial ekonominya lebih baik dan sebaliknya.

11.2. Saran

Dari hasil penelaahan, saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Variabel aksesibilitas wilayah merupakan variabel yang paling berpengaruh pada pertumbuhan wilayah belakang, maka untuk memperlancar dan memperluas efek perembesan pertumbuhan pusat terhadap wilayah layanannya, perlu perbaikan fasilitas transportasi dan komunikasi yang menghubungkan desa-desa dengan kota terutama pada Kecamatan Sampang, Patimuan dan Cipari yang merupakan kecamatan yang kurang berkembang.
2. Penyediaan fasilitas sosial ekonomi, terutama fasilitas ekonomi pada wilayah yang tertinggal dapat dijadikan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan dapat berfungsi sebagai pusat aglomerasi permukiman penduduk dan kegiatan ekonomi.
3. Untuk meningkatkan aktifitas pasar dan perekonomian masyarakat perlu pengembangan sektor informal, terutama aktifitas perdagangan dan industri skala rumahtangga, karena jenis usaha ini yang potensial dikembangkan selain sektor pertanian.
4. Untuk penelitian yang akan datang perlu memperhatikan pengaruh kota kecamatan ke wilayah kecamatan lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Maya. 1996. **Peranan Kota Sedang dalam Pembangunan Wilayah**. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten DT II Cilacap. 1992. **Proyek Pengkajian Potensi Sumberdaya Manusia Kabupaten DT II Cilacap 1991/1992**. BAPPEDA. Cilacap.
-
- _____. 1994. **Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan (RUTRK) Kecamatan Kroya 1993/1994 - 2003/2004**. BAPPEDA. Cilacap.
-
- _____. 1995. **Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan (RUTRK) Kecamatan Adipala 1994/1995 - 2004/2005**. BAPPEDA. Cilacap.
-
- _____. 1995. **Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan (RUTRK) Kecamatan Sampang 1995/1996 - 2005/2006**. BAPPEDA. Cilacap.
-
- _____ dan BPS. 1994. **Pendapatan Regional Kabupaten DT II Cilacap 1994**. Kerjasama BAPPEDA Kabupaten DT II Cilacap dan Biro Pusat Statistik. Cilacap.
-
- _____. 1995. **Neraca Sumberdaya Alam Spasial Daerah Kabupaten DT II Cilacap 1994**. BAPPEDA. Cilacap.
-
- _____. 1995. **Pelatihan Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (PSD) tahun 1994/1995: Kumpulan Materi**. BAPPEDA. Cilacap.
- Biro Pusat Statistik. 1995. **Kabupaten Cilacap dalam Angka 1994**. Biro Pusat Statistik. Jakarta.
-
- _____. 1995. **Kecamatan Kroya Dalam Angka 1994**. Biro Pusat Statistik Kabupaten DT II Cilacap. Cilacap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

- Biro Pusat Statistik. 1995. **Kecamatan Adipala Dalam Angka 1994**. Biro Pusat Statistik Kabupaten DT II Cilacap. Cilacap.
- _____. 1995. **Kecamatan Sampang Dalam Angka 1994**. Biro Pusat Statistik Kabupaten DT II Cilacap. Cilacap.
- _____. 1995. **Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten DT II Cilacap 1994**. Biro Pusat Statistik dan BAPPEDA Cilacap. Cilacap.
- Catanese, A.J, James C. S. dan Susongko. 1986. **Pengantar Perencanaan Kota**. Erlangga. Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri. 1993. **Panduan Operasional Unit Daerah Kerja Pembangunan**. Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa. Depdagri. Jakarta.
- Glasson. J. 1990. **Pengantar Perencanaan Regional**. Diterjemahkan: Paul Sitohang. LPFEUI. Jakarta.
- Hanafiah, T. 1982. **Pendekatan Wilayah Terhadap Masalah Pembangunan Pedesaan**. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- _____. 1988. **Aspek Lokasi dalam Analisis Ekonomi Wilayah**. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- _____. 1988. **Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Kecil dalam Rangka Pengembangan Wilayah**. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- _____. 1989. **Strategi Pembangunan Wilayah Pedesaan**. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- _____. 1994. **Kebijaksanaan Pembangunan Wilayah**. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor.

- Kadariah. 1978. **Ekonomi Perencanaan**. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Kamaluddin, Rustian. 1991. **Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah**. LPFEUI. Jakarta.
- Karsyno, Faisal dan Joseph F. (ed). 1985. **Dinamika Pembangunan Pedesaan**. PT Gramedia. Jakarta.
- Karjoredjo. 1989. **Fungsi Kota Kecamatan dalam Pembangunan Wilayah Pedesaan**. Disertasi. Universitas Gajah Mada. Joyakarta.
- Koentjoroningrat. 1974. **Kebudayaan, Metalitet dan Pembangunan**. Gramedia. Jakarta.
- Maskun, Sumitro. 1993. **Pembangunan Masyarakat Desa: Azas, Kebijakan dan Manajemen**. Media Widya Mandala. Jakarta.
- Maulidian, Nuni. 1993. **Analisis Perkembangan Struktur Tata Ruang Wilayah Transmigrasi. Studi Kasus di Proyek Karang Agung Tengah, Kabupaten DT II Musi Banyuasin. Propinsi Sumatera Selatan**. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Mosher, A.T. 1976. **Thinking About Rural Development**. Agricultural Development Council, Inc. New York.
- Mubyarto. 1988. **Pengalaman PPW dan Strategi Pembangunan Pedesaan di Indonesia**. P3PK Universitas Gajah Mada. Jogjakarta.
- _____. (ed). 1983. **Strategi dan Pendekatan Pembangunan Pedesaan Terpadu**. P3PK. Universitas Gajah Mada. Jogjakarta.
- Pemerintah Daerah. 1991. **Potensi Wilayah Kabupaten DT II Cilacap. Draf Laporan Akhir: Kerjasama UNSOED dan Pemerintah Daerah**. Pemda. Cilacap.
- _____. 1992. **Analisis Potensi Wilayah kabupaten DT II Cilacap: Executive Summary**. Kerjasama UNSOED dan Pemda. Cilacap.



Pemerintah Daerah . 1992. **Analisis Potensi Wilayah Kabupaten DT II Cilacap.** Kerjasama UNSOED dan Pemerintah Daerah. Pemda. Cilacap.

_____. 1992. **Keberhasilan Kerangka Pembangunan Strategis (KPS) dalam Pembangunan Daerah Tingkat II: Makalah disampaikan dalam Rangka Diskusi Panel Pembangunan Daerah di Pontianak, Kalimantan Barat.** Pemda. Cilacap.

_____. 1993. **Laporan Bupati Kepala Daerah TK II Cilacap tentang Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun V Daerah Kabupaten DT II Cilacap : Disampaikan dalam Rangka Penilaian Pemberian Penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha.** Pemda. Cilacap.

_____. 1993. **Fakta dan Analisa Untuk Evaluasi Pelita V, Review Poldas dan Poldas VI Kabupaten DT II Cilacap.** Pemda. Cilacap.

_____. 1994. **Evaluasi dan Revisi Rencana Tata Ruang Kota Cilacap tahun 1993/1994 - 2003/2004.** Pemda. Cilacap.

_____. 1994. **Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah (RUPTD) Kabupaten DT II Cilacap tahun 1994/1995.** Pemda. Cilacap.

_____. 1994. **Peraturan Daerah No. 13 tahun 1994 : Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten DT II Cilacap.** Pemda. Cilacap.

Purnama Dewi, Y.L. 1988. **Penyebaran Fasilitas Pelayanan Pembangunan di Tingkat Kecamatan. Studi Kasus Kabupaten Sukabumi.** Propinsi Jawa Barat. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Richardson, H.W. 1977. **Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional.** FEUI. Jakarta.

Sajogyo, (ed). 1982. **Bunga Rampai Perekonomian Desa.** Yayasan Agro Ekonomika. Jakarta.

Setiawan Bayu, B. 1995. **Peranan dan Fungsi Kota Kecamatan dalam Pembangunan Wilayah. Studi Kasus Kabupaten DT II Purworejo, Propinsi DT I Jawa Tengah.** Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Soejatmoko. 1983. **Dimensi Manusia dalam Pembangunan.** LP3ES. Jakarta.

- Sugandhy, A. 1985. **Pendekatan Pembangunan Lintas Sektoral dan Daerah dalam Kerangka Penataan Ruang, Wilayah dan Pembangunan Daerah.** Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sumodiningrat, Gunawan. (*et. al*). 1987. **Prospek Pedesaan 1987.** P3PK. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Todaro, Michael, P. 1977. **Economic Development in Third World : An Introduction to Problems and Polices in Global Perspective.** New York Univercity. New York.
- Van Dusseldorp, D.B.W.M. 1971. **Planning of Service Centre in Rural Areas of Developing Countries.** International Institute for Land Reclamation and Improvement. Wageningen. The Netherlands.
- Wanmali, Sudhir. 1983. **Service Provision and Rural Development in India : A Study of Miryalguda Taluka.** Research Report International Food Policy Research Institute.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 1. Jarak antara kecamatan dalam wilayah Kabupaten DT II Cilacap

| Kecamatan | Cilacap | Kesugihan | Jeruklegi | Kawunganten | Kroya | Maos | Sampang | Adipala | Binangun | Nusawungu | Sidareja | Cipari | Kedungreja | Patimuan | Gand. Mangu | Kar. Pucung | Majenang | Cimanggu | Wanareja | Deyeuhluhur |
|-------------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|------|---------|---------|----------|-----------|----------|--------|------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-------------|
| Cilacap | - | 20 | 26 | 29 | 32 | 26 | 35 | 22 | 38 | 43 | 74 | 86 | 77 | 93 | 73 | 56 | 80 | 67 | 92 | 107 |
| Kesugihan | 20 | - | 10 | 28 | 18 | 4 | 10 | 8 | 24 | 29 | 73 | 85 | 76 | 92 | 72 | 55 | 79 | 76 | 82 | 105 |
| Jeruklegi | 16 | 10 | - | 13 | 42 | 48 | 15 | 32 | 49 | 61 | 50 | 70 | 61 | 77 | 56 | 40 | 63 | 51 | 76 | 90 |
| Kawunganten | 29 | 28 | 13 | - | 29 | 41 | 28 | 36 | 53 | 65 | 45 | 57 | 58 | 72 | 43 | 27 | 50 | 38 | 63 | 77 |
| Kroya | 32 | 18 | 42 | 29 | - | 14 | 23 | 10 | 6 | 11 | 74 | 86 | 87 | 103 | 72 | 54 | 79 | 76 | 92 | 133 |
| Maos | 26 | 4 | 28 | 44 | 14 | - | 9 | 4 | 21 | 23 | 85 | 97 | 88 | 104 | 84 | 51 | 75 | 62 | 88 | 102 |
| Sampang | 35 | 10 | 15 | 28 | 23 | 9 | - | 15 | 33 | 34 | 89 | 121 | 112 | 128 | 108 | 91 | 115 | 102 | 127 | 142 |
| Adipala | 22 | 8 | 31 | 36 | 10 | 4 | 15 | - | 17 | 21 | 81 | 108 | 94 | 110 | 90 | 56 | 80 | 67 | 93 | 106 |
| Binangun | 38 | 24 | 49 | 53 | 6 | 21 | 33 | 17 | - | 12 | 97 | 109 | 110 | 126 | 106 | 60 | 84 | 71 | 97 | 140 |
| Nusawungu | 43 | 29 | 61 | 65 | 11 | 23 | 34 | 21 | 12 | - | 110 | 122 | 115 | 131 | 108 | 65 | 89 | 76 | 110 | 152 |
| Sidareja | 74 | 73 | 58 | 45 | 74 | 85 | 89 | 81 | 97 | 110 | - | 12 | 3 | 19 | 8 | 18 | 38 | 27 | 51 | 55 |
| Cipari | 86 | 85 | 70 | 57 | 86 | 97 | 121 | 93 | 109 | 122 | 12 | - | 15 | 31 | 20 | 30 | 26 | 15 | 39 | 43 |
| Kedungreja | 77 | 76 | 61 | 58 | 87 | 88 | 112 | 94 | 110 | 115 | 3 | 15 | - | 16 | 11 | 21 | 41 | 30 | 56 | 70 |
| Patimuan | 93 | 92 | 77 | 74 | 103 | 104 | 128 | 110 | 126 | 131 | 19 | 31 | 16 | - | 27 | 37 | 57 | 46 | 72 | 86 |
| Gand. Mangu | 73 | 72 | 56 | 43 | 72 | 84 | 108 | 90 | 106 | 108 | 8 | 20 | 11 | 27 | - | 22 | 43 | 32 | 56 | 70 |
| Kar. Pucung | 56 | 55 | 40 | 27 | 54 | 51 | 91 | 56 | 60 | 65 | 18 | 30 | 21 | 37 | 22 | - | 21 | 10 | 34 | 48 |
| Majenang | 80 | 79 | 63 | 50 | 79 | 75 | 115 | 80 | 84 | 89 | 38 | 26 | 41 | 57 | 43 | 21 | - | 13 | 13 | 27 |
| Cimanggu | 67 | 76 | 51 | 38 | 67 | 62 | 102 | 67 | 71 | 76 | 27 | 15 | 30 | 46 | 32 | 10 | 13 | - | 25 | 40 |
| Wanareja | 92 | 82 | 76 | 63 | 92 | 88 | 127 | 93 | 97 | 110 | 51 | 39 | 56 | 72 | 56 | 34 | 13 | 25 | - | 14 |
| Deyeuhluhur | 107 | 105 | 90 | 77 | 133 | 102 | 142 | 106 | 140 | 152 | 55 | 43 | 70 | 86 | 70 | 48 | 27 | 40 | 14 | - |

Sumber : BPS (1994)

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tabel Lampiran 2. Produksi Domestik Daerah Bruto (PDRB) Kabupaten DT II Cilacap Tahun 1993 dan 1994 atas harga berlaku tanpa minyak, dalam juta rupiah

| Sektor | Tahun 1993 | | Tahun 1994 | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Jumlah | (%) | Jumlah | (%) |
| Pertanian | 584.673,84 | 33,02 | 627.108,15 | 33,30 |
| Pertambangan | 29.647,92 | 1,87 | 37.776,47 | 2,01 |
| Industri | 271.929,53 | 17,20 | 386.321,14 | 20,54 |
| Listrik, Gas dan air Minum | 11.419,79 | 0,72 | 12.794,36 | 0,68 |
| Bangunan | 49.393,89 | 3,12 | 58.240,32 | 3,09 |
| Perdagangan, Restoran dan Hotel | 374.431,15 | 23,70 | 448.325,84 | 23,84 |
| Transportasi | 50.339,71 | 3,19 | 60.155,06 | 3,20 |
| Keuangan | 64.349,99 | 4,07 | 88.020,82 | 4,68 |
| Jasa-Jasa | 143.007,74 | 9,05 | 162.079,63 | 8,62 |
| PDRB | 1.579.193,56 | 100,00 | 1.880.821,79 | 100,00 |

Tabel Lampiran 3. Tata Guna Lahan Kabupaten DT II Cilacap 1994

| Lahan Basah | Luas (ha) | Lahan Kering | Luas (ha) |
|-------------------------|------------|----------------------|------------|
| Irigasi Teknis | 30.622,689 | Bangunan/ Pekarangan | 34.343,685 |
| Irigasi setengah Teknis | 4.882,694 | Tegalan/kebun | 43.359,572 |
| Irigasi Sederhana | 7.889,685 | Ladang/Huma | 435,000 |
| Tadah Hujan | 21.276,181 | Padang rumput | 30.000 |
| Rawa | 238,810 | Perkebunan | 12.319,118 |
| Tambak | 88,050 | Hutan | 46.262,983 |
| Kolam/Empang | 432,448 | Lain-lai | 12.679,665 |
| TOTAL | | 214.250,288* | |

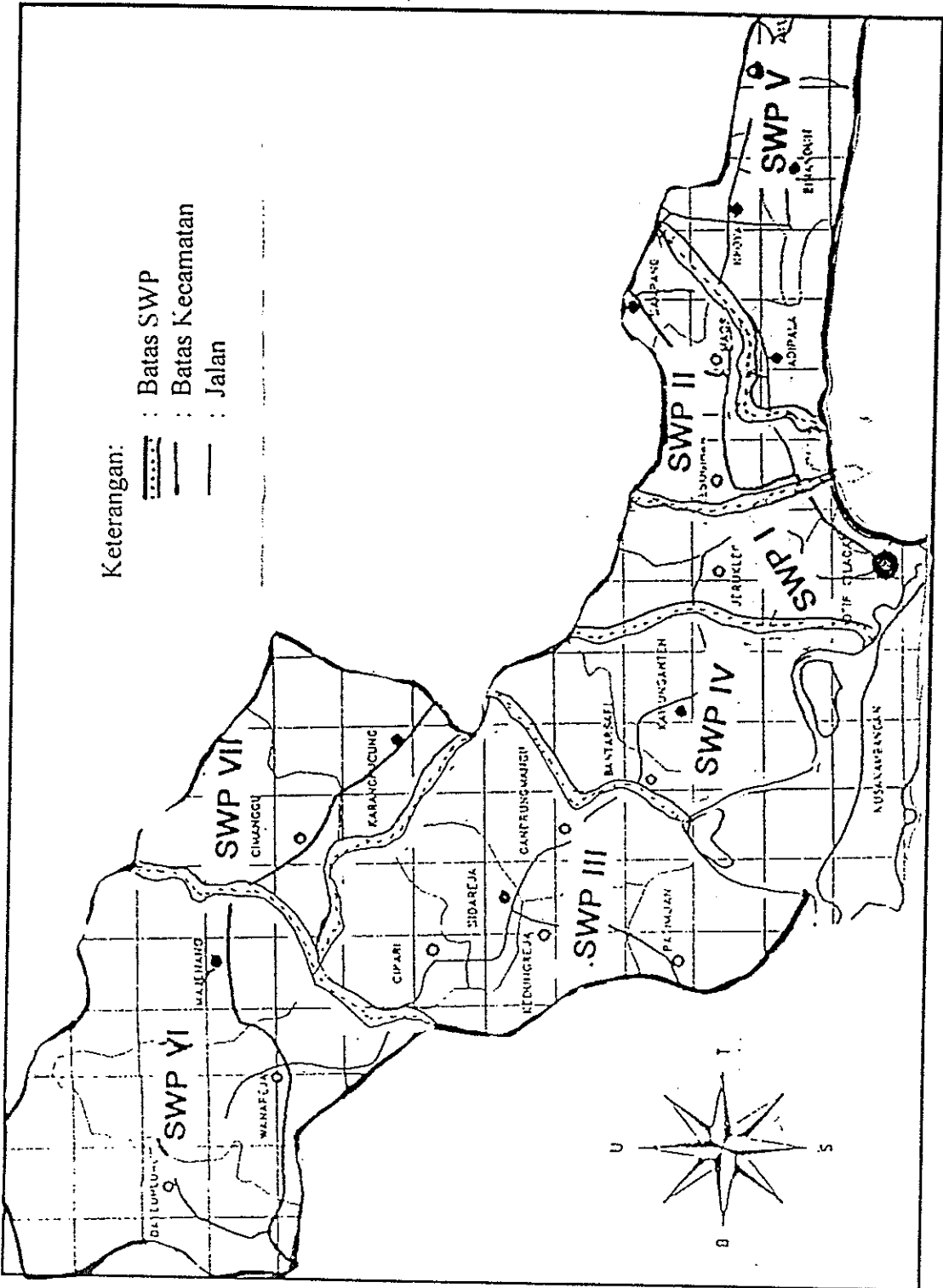
Keterangan : * : Belum termasuk Pulau Nusakambangan

Tabel Lampiran 4. Luas wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Penyebarannya di Kabupaten Cilacap, 1994.

| No | Kecamatan | Luas wilayah (km ²) | Jumlah Penduduk | Kepadatan Penduduk per km ² | Persen Penyebaran |
|---------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--|-------------------|
| 1. | Dayeuhluhur | 185,060 | 43.851 | 237 | 2,85 |
| 2. | Wanareja | 190,602 | 87.393 | 458 | 5,69 |
| 3. | Majenang | 138,560 | 107.026 | 772 | 6,96 |
| 4. | Cimanggu | 167,440 | 85.723 | 512 | 5,58 |
| 5. | Sidareja | 54,040 | 48.943 | 906 | 3,18 |
| 6. | Cipari | 121,470 | 55.424 | 456 | 3,61 |
| 7. | Kedungreja | 75,520 | 72.301 | 957 | 4,70 |
| 8. | Patimuan | 75,320 | 39.371 | 532 | 2,56 |
| 9. | Gandrung-mangu | 143,180 | 85.485 | 597 | 5,56 |
| 10. | Karangpucung | 115,250 | 65.020 | 564 | 4,23 |
| 11. | Kawunganten | 356,610 | 135.170 | 379 | 8,79 |
| 12. | Jeruklegi | 99,300 | 54.827 | 552 | 3,57 |
| 13. | Kesugihan | 82,310 | 91.044 | 985 | 5,92 |
| 14. | Maos | 28,040 | 40.340 | 1.439 | 2,62 |
| 15. | Sampang | 27,300 | 34.564 | 1.266 | 2,25 |
| 16. | Adipala | 61,190 | 70.655 | 1.115 | 4,59 |
| 17. | Kroya | 58,830 | 90.894 | 1.545 | 5,91 |
| 18. | Binangun | 51,420 | 54.621 | 1.062 | 3,55 |
| 19. | Nusawungu | 61,260 | 66.334 | 1.083 | 4,32 |
| 20. | Cilacap Selatan | 9,110 | 73.671 | 8.087 | 4,79 |
| 21. | Cilacap Utara | 18,840 | 53.742 | 2.853 | 3,50 |
| 22. | Cilacap Tengah | 22,150 | 80.761 | 3.646 | 5,25 |
| JUMLAH | | 2.142,57 | 1.537.158 | 717 | 100,00 |
| Tahun 1993 | | 2.142,57 | 1.516.747 | 708 | 100,00 |
| Tahun 1992 | | 2.142,57 | 1.509.334 | 704 | 100,00 |
| Tahun 1991 | | 2.142,57 | 1.499.401 | 700 | 100,00 |
| Tahun 1990 | | 2.142,57 | 1.455.887 | 680 | 100,00 |

Sumber : Cilacap dalam Angka 1994, BPS 1995.

Gambar Lampiran 6. Peta Geografis dan Pembagian SWP Kabupaten DT II Cilacap, Tahun 1996.

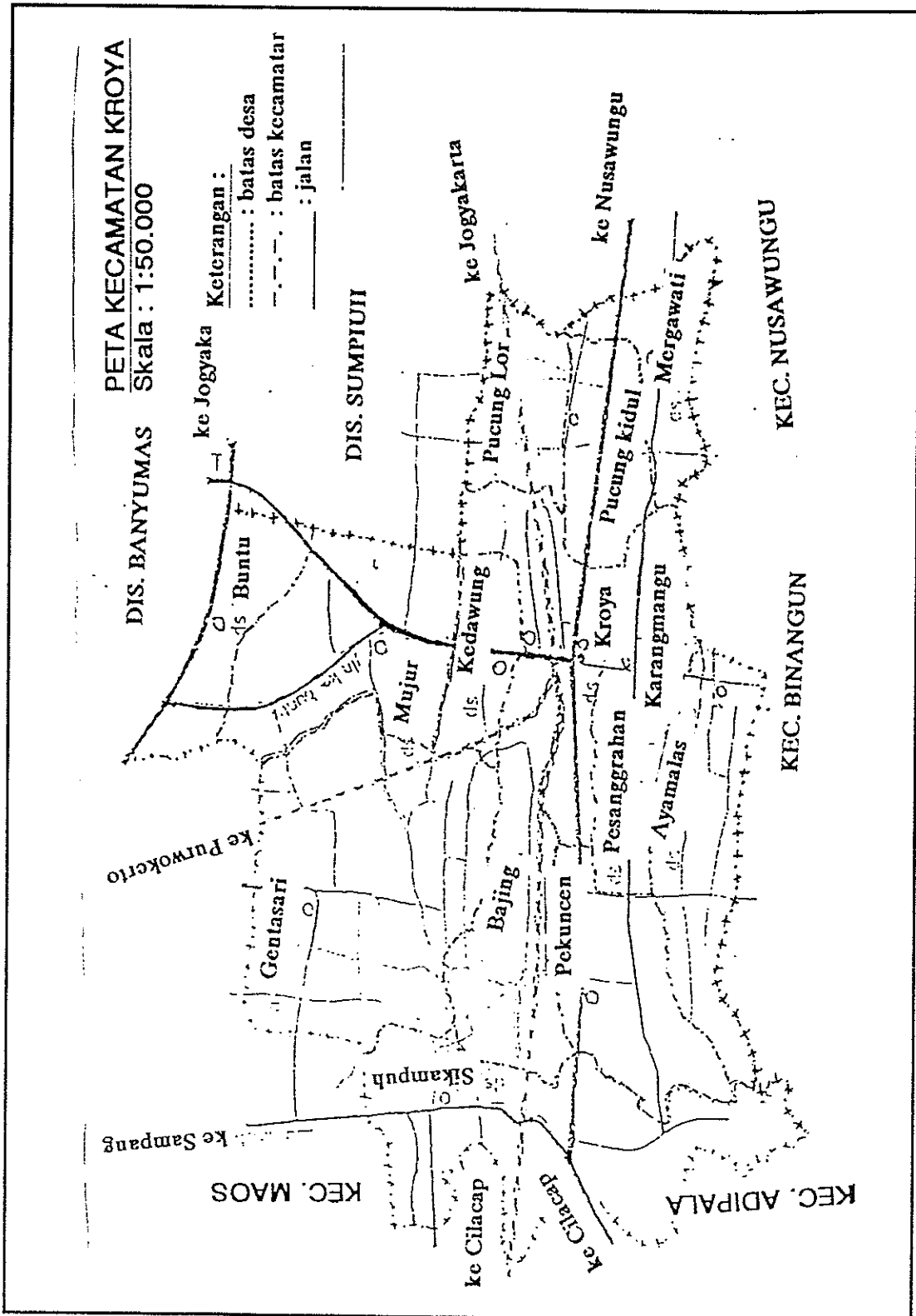


Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Gambar Lampiran 7 Peta geografis Kecamatan Kroya, Tahun 1996.

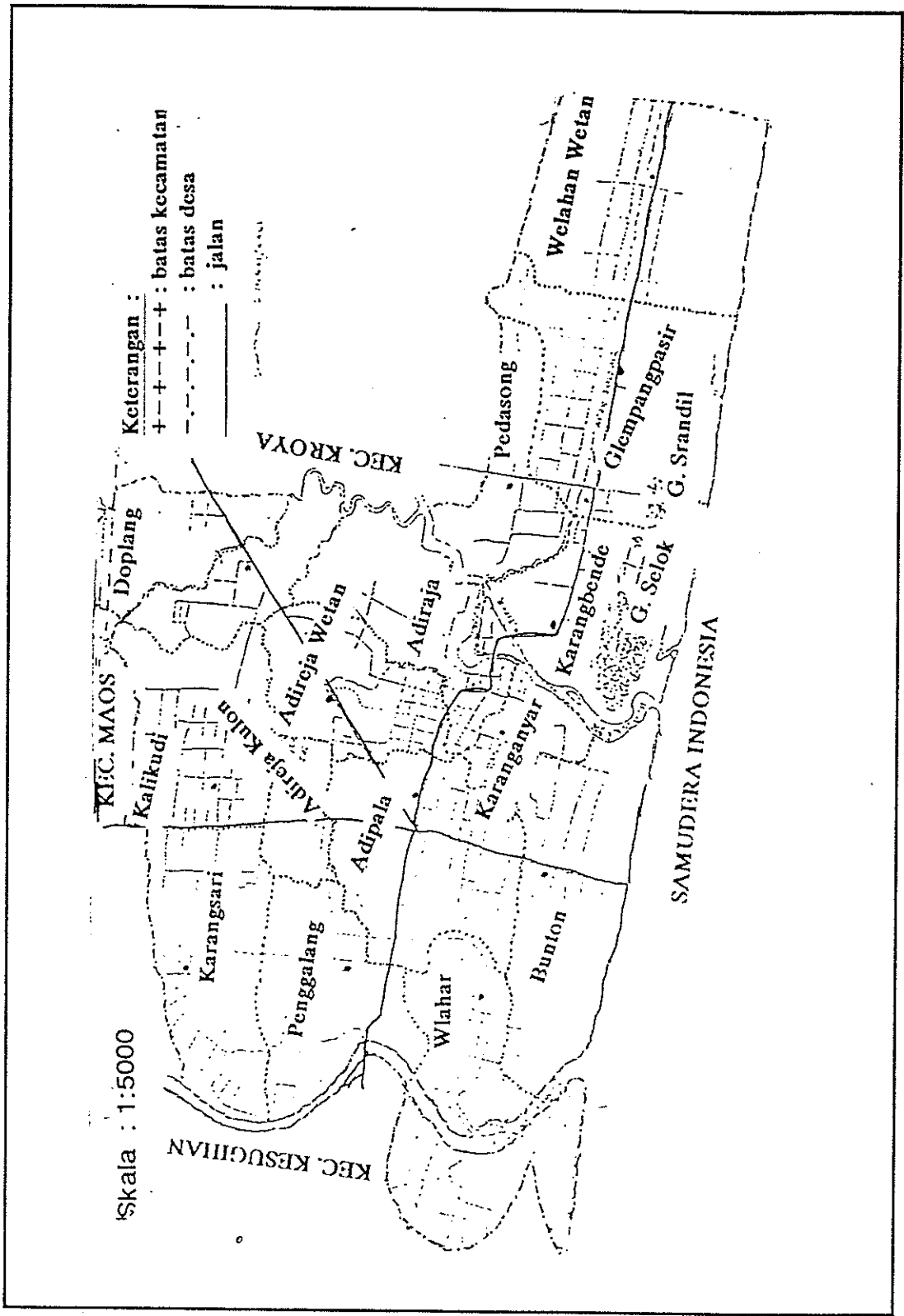


Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



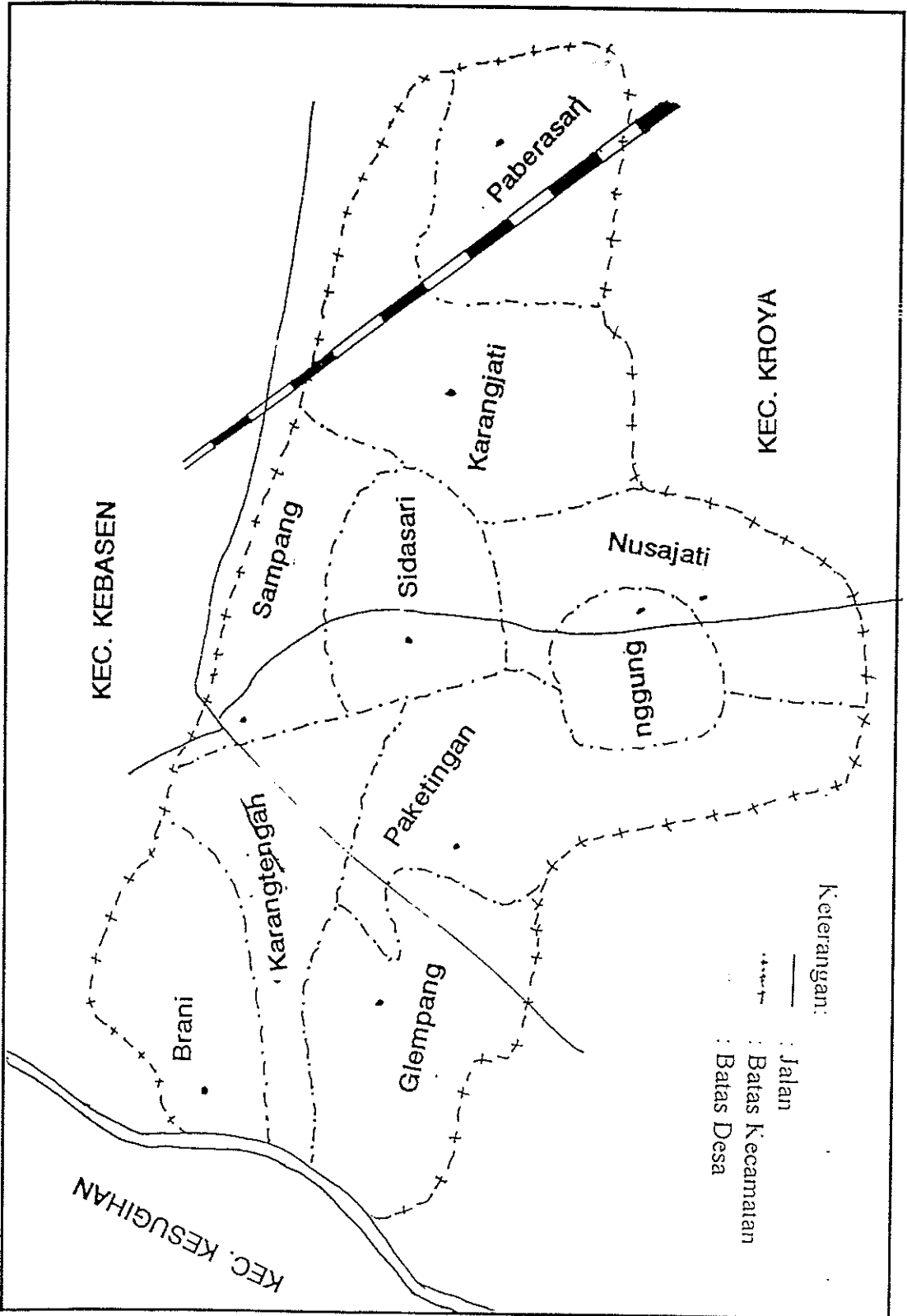
@Hak cipta milik IPB University

Gambar Lampiran 8. Peta Geografis Kecamatan Adipala, Tahun 1996.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Gambar Lampiran 9. Peta Geografis Kecamatan Sampang, Tahun 1996.



@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Lampiran 9. Analisis Limpitan Seजार Kabupaten DT II Cilacap, 1996

| Kecamatan | POTENSI SDA | Jenang | PEMBANG-UNAN | Jenang | TOTAL | Jenang | Deskripsi |
|---------------|-------------|--------|--------------|--------|-------|--------|-----------|
| Kawunganten | 61 | 1 | 416 | 4 | 477 | 4 | Berkmb |
| Majenang | 66 | 2 | 387 | 2 | 453 | 2 | Berkmb |
| Kesugihan | 85 | 5 | 450 | 6 | 535 | 6 | Sedang |
| Kroya | 97 | 7 | 349 | 1 | 446 | 1 | Berkmb |
| Wanareja | 84 | 4 | 390 | 3 | 474 | 3 | Berkmb |
| Cimanggu | 116 | 9 | 503 | 8 | 619 | 9 | Sedang |
| Gandrungmangu | 117 | 10 | 654 | 17 | 771 | 16 | Terblk |
| Kedungreja | 124 | 12 | 573 | 14 | 697 | 13 | Sedang |
| Adipala | 105 | 8 | 475 | 7 | 580 | 7 | Berkmb |
| Nusa Wungu | 95 | 6 | 423 | 5 | 518 | 5 | Berkmb |
| Karangpucung | 120 | 11 | 580 | 15 | 700 | 14 | Sedang |
| Cipari | 158 | 17 | 637 | 16 | 795 | 17 | Terblk |
| Jeruklegi | 74 | 3 | 536 | 11 | 610 | 8 | Sedang |
| Binangun | 134 | 14 | 522 | 10 | 656 | 10 | Sedang |
| Sidareja | 157 | 16 | 546 | 13 | 703 | 15 | Sedang |
| Dayeuhluhur | 129 | 13 | 543 | 12 | 672 | 11 | Sedang |
| Patimuan | 144 | 15 | 720 | 19 | 864 | 19 | Terblk |
| Sampang | 167 | 19 | 673 | 18 | 840 | 18 | Terblk |
| Maos | 164 | 18 | 521 | 9 | 685 | 12 | Sedang |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau dengan cara lain.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel, atau untuk keperluan lain.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

@Hak cipta milik IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerbit
 - a. Pengecualian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penyusunan karya ilmiah
 - b. Pengecualian tidak merugikan kepentingan penerbit
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini

| Pol. Kota | Daerah | Apelik | BKIA | KUD | Pasar | Bank | Kart. pos Pambantu | Masjid | Gereja | Pusat Wisata | Pesantren | Jumlah Unit | Jumlah Jarak | Ranking |
|-----------|----------|----------|----------|-----|-------|------|--------------------|--------|----------|--------------|-----------|-------------|--------------|---------|
| | | 3 | | 1 | 10 | 2 | 1 | 114 | 18 | | 21 | 332 | 15 | 1 |
| | | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109 | 5 | | 8 | 270 | 19 | 2 |
| | | 3 | | 1 | 8 | 2 | 1 | 69 | 2 | 1 | 10 | 203 | 16 | 5 |
| | | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 64 | 7 | 1 | | 205 | 18 | 4 |
| | | 2 | | 1 | 1 | 9 | 1 | 115 | 5 | | 2 | 258 | 16 | 3 |
| | | 2 | | 1 | 1 | 8 | 1 | 85 | | | 2 | 199 | 15 | 7 |
| | | 2 | | 1 | 5 | 2 | | 76 | 3 | | 10 | 203 | 14 | 6 |
| | | 1 | | 1 | 7 | 1 | | 61 | 3 | | 5 | 167 | 15 | 11 |
| | | | | 2 | 9 | 1 | 1 | 38 | 7 | 2 | | 141 | 14 | 14 |
| | | 2 | | 10 | 1 | 13 | 2 | 51 | 6 | | | 188 | 15 | 8 |
| | | 1 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 73 | 3 | | | 179 | 14 | 9 |
| | | 2 | | 1 | 6 | 1 | 1 | 57 | 5 | 1 | 11 | 161 | 18 | 12 |
| | | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | 6 | 1 | | 122 | 15 | 16 |
| | | 1 | | 1 | 9 | 2 | 1 | 37 | 3 | 7 | | 150 | 15 | 13 |
| | | 2 | | 1 | 6 | 1 | 1 | 36 | 9 | | | 134 | 17 | 15 |
| | | 4 | | 2 | 1 | 5 | 2 | 84 | | | 4 | 171 | 16 | 10 |
| | | 1 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 38 | 3 | | 4 | 97 | 15 | 17 |
| | | 1 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | | | 1 | 86 | 14 | 19 |
| | | 3 | | 1 | 5 | 1 | 1 | 24 | 4 | | | 95 | 15 | 18 |
| | | 11 | 0 | 13 | 7 | 45 | 10 | 7 | 377 | 32 | 9 | 15 | | |
| | | 18 | 3 | 8 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 16 | 6 | 11 | | |
| 31579 | 84.73684 | 15.78947 | 42.10526 | 100 | 100 | 100 | 89.473684 | 100 | 84.21053 | 31.57895 | 57.89474 | | | |

@Hak cipta milik IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan kembali dengan cara apapun, termasuk dengan menggunakan teknologi informasi, tanpa izin IPB University.
 2. Dilarang mengumumkannya.

| Id | M75 | Mesjid | Mushola | Gereja | Wihara | Pus-keemas | Puskesmas pembantu | KUD atau Koperasi | Bank | Pasar | Jumlah jenis | Jumlah Sarana | Ranking |
|----------|----------|--------|---------|----------|----------|------------|--------------------|-------------------|----------|----------|--------------|---------------|---------|
| 4 | | 10 | 29 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 11 | 55 | 1 |
| 1 | | 3 | 17 | 2 | | 1 | 1 | 4 | 2 | | 14 | 53 | 2 |
| 2 | | 3 | 7 | | | | | | 1 | | 7 | 20 | 12 |
| 1 | | 6 | 17 | 1 | 1 | | | 1 | | | 10 | 36 | 5.5 |
| 1 | 1 | 7 | 31 | | | | | | | 1 | 8 | 48 | 3 |
| | | 4 | 18 | 3 | 1 | | | 1 | | 1 | 12 | 40 | 4 |
| 1 | | 3 | 21 | | | | | | | | 8 | 34 | 7 |
| 1 | | 5 | 19 | 1 | | | | | 1 | | 10 | 36 | 5.5 |
| | | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 6 | 13 | 14 |
| 3 | | 9 | 10 | | | | | | 1 | 1 | 10 | 33 | 8 |
| 1 | | 4 | 10 | 2 | | | | 1 | 1 | | 9 | 24 | 9 |
| | | 1 | 7 | | | | | | | | 5 | 12 | 15.5 |
| 1 | | 7 | 9 | | | | | | | 1 | 7 | 23 | 10.5 |
| 1 | | 5 | 12 | | | | | | | | 6 | 23 | 10.5 |
| 1 | | 3 | 10 | | | | | | | | 6 | 19 | 13 |
| | | 1 | 1 | | | | | | | | 5 | 7 | 17 |
| 1 | | 4 | 4 | | | | | | | | 6 | 12 | 15.5 |
| 15 | 1 | 68 | 196 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | | | |
| 13 | 1 | 17 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | | | |
| 76.47059 | 5.882353 | 100 | 100 | 35.29412 | 11.76471 | 11.76471 | 11.764706 | 23.52941 | 35.29412 | 29.41176 | | | |

Perpustakaan IPB University

@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari penulis
2. Dilarang mengumunkan atau menyebarkan sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari penulis

| NIK | MTS | Instansi | Mushola | Gereja | Villara | Pos Kasmas | Poskasmas pembantu | KUD atau Koperasi | Bank | Pasar | Jumlah Jenis | Jumlah Varian | Ranking |
|-----|------|----------|---------|--------|---------|---------------|-----------------------|----------------------|------|-------|-----------------|------------------|---------|
| | 1 | | 4 | 15 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 14 | 41 | 1 |
| | | | 4 | 15 | 2 | | | | | 1 | 9 | 32 | 3 |
| | 1 | 1 | 4 | 14 | | | 1 | | | 1 | 9 | 29 | 5 |
| | | | 5 | 16 | 1 | | 1 | | | | 7 | 30 | 4 |
| | 1 | 1 | 3 | 12 | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | 6 |
| | 1 | 1 | 2 | 26 | | | | | | 1 | 8 | 36 | 2 |
| | | | 3 | 4 | | | | | | 1 | 7 | 14 | 9 |
| | | | 1 | 7 | | | | | | | 5 | 13 | 10 |
| | | | 3 | 14 | | | | | | 1 | 6 | 24 | 7 |
| | | | 3 | 9 | | | | | | 1 | 6 | 20 | 8 |
| | | | 1 | 3 | 1 | | | | | 1 | 6 | 8 | 15 |
| | | | 1 | 6 | | | | | | | 5 | 11 | 12 |
| | | | 1 | 4 | | | | | | | 6 | 10 | 13 |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | 5 | 12 | 11 |
| | | | 1 | 4 | | | | | | | 5 | 9 | 14 |
| | | | 1 | 4 | | | | | | | 5 | 8 | 16 |
| 4 | 2 | | 40 | 159 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | | | |
| 4 | 2 | | 16 | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | | | |
| 25 | 12.5 | | 100 | 100 | 25 | 0 | 6.25 | 12.5 | 12.5 | 56.25 | | | |



@Hak cipta milik IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerjemahan, dan penyempurnaan karya ilmiah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di media massa elektronik, digital (elektronik), atau lainnya

| MTS | Masjid | Mushola | Geraja | Vihara | Pus. kesmas | Buskesmas pembantu | KUD atau Koperasi | Bank | Pasar | Jumlah jenis | Jumlah Sarana | Ranking |
|-----|--------|---------|--------|--------|-------------|--------------------|-------------------|------|-------|--------------|---------------|---------|
| 1 | 6 | 10 | | | | | | | 1 | 6 | 24 | 4.5 |
| 2 | 5 | 20 | | | | 1 | | | 1 | 9 | 36 | 1 |
| 3 | 3 | 6 | | | 1 | | 2 | 2 | 1 | 13 | 32 | 2 |
| 4 | 6 | 14 | | | | | | | | 5 | 25 | 3 |
| 5 | 2 | 16 | 1 | | 1 | | | | | 6 | 24 | 4.5 |
| 6 | 5 | 4 | | | | | | | | 5 | 13 | 8 |
| 7 | 2 | 5 | 1 | | | 1 | | | | 7 | 14 | 6 |
| 8 | 1 | 6 | | | | 1 | | | | 6 | 13 | 7 |
| 9 | 2 | 6 | | | | | | | | 5 | 12 | 10 |
| 10 | 1 | 5 | | | | | | | | 6 | 10 | 9 |
| 11 | 33 | 92 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | |
| 12 | 10 | 10 | 2 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | |
| 13 | 100 | 100 | 20 | 0 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | | | |

Lampiran 14. Analisis Korelasi Spearman Kecamatan Kroya, 1996

| Desa | Kepadatan Penduduk | Ekonomi | Aksesb. | Skalogram | Kepadatan & Ekonomi | Kepadatan & Aksesb. | Ekonomi & Aksesb. | Skalogram & kepadatan | Skalogram & ekonomi |
|--------------|--------------------|---------|---------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Gentasari | 12 | 2 | 5 | 1 | 100 | 49 | 9 | 1 | 1 |
| Kroya | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pekuncen | 4 | 13 | 6 | 12 | 81 | 4 | 49 | 1 | 1 |
| Kedawung | 11 | 5 | 3 | 5.5 | 36 | 64 | 4 | 0.25 | 0.25 |
| Sikampung | 17 | 6 | 11 | 3 | 121 | 36 | 25 | 9 | 9 |
| Bajing | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 25 | 9 | 0 | 0 |
| Bajing Kulon | 3 | 8 | 2 | 7 | 25 | 1 | 36 | 1 | 1 |
| Karangmangu | 8 | 6 | 8 | 5.5 | 4 | 0 | 4 | 0.25 | 0.25 |
| Ayamalas | 7 | 11 | 12 | 14 | 16 | 25 | 1 | 9 | 9 |
| Mujur | 6 | 15 | 9 | 8 | 81 | 9 | 36 | 49 | 49 |
| Pucung Kidul | 9 | 3 | 4 | 9 | 36 | 25 | 1 | 36 | 36 |
| Karangturi | 13 | 16 | 16 | 15.5 | 9 | 9 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| Pucung Lor | 14 | 9 | 14 | 10.5 | 25 | 0 | 25 | 2.25 | 2.25 |
| Buntu | 10 | 10 | 17 | 10.5 | 0 | 49 | 49 | 0.25 | 0.25 |
| Mergawati | 16 | 12 | 15 | 13 | 16 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| Pesanggrahan | 5 | 14 | 13 | 17 | 81 | 64 | 1 | 9 | 9 |
| Mujur Lor | 15 | 16 | 10 | 15.5 | 1 | 25 | 36 | 0.25 | 0.25 |
| Jumlah | | | | | 536 | 337 | 285 | 0 | 0 |
| Rs = | | | | | 0.220588 | 0.526961 | 0.999877 | 0.1868873 | 0.852328 |

| | | | | | | |
|---------|--|----------|----------|----------|-----------|----------|
| db = 15 | | 3.478059 | 16.70979 | 60480.12 | 2.9047621 | 46.73927 |
|---------|--|----------|----------|----------|-----------|----------|

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Lampiran 15. Analisis Korelasi Spearman Kecamatan Adipala, 1996

| Desa/Keturahan | Kepadatan Penduduk | Ekonomi | Aksesb. | Skalogram total ekono & Ekonomi | Kepadatan & Aksesb. | Ekonomi & Aksesb. | Skalogram & Kepadatan | Skalogram & Ekonomi | |
|----------------|--------------------|---------|---------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| Adipala | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Penggalang | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Glumpangasir | 13 | 7 | 6 | 5 | 36 | 49 | 64 | 4 | |
| Karangsari | 3 | 5 | 11 | 4 | 4 | 64 | 36 | 1 | |
| Kalikudi | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| Welahan Wetan | 12 | 4 | 5 | 2 | 64 | 49 | 1 | 100 | |
| Adiraja | 8 | 6 | 4 | 9 | 4 | 16 | 4 | 1 | |
| Bunton | 14 | 10 | 12 | 10 | 16 | 4 | 4 | 16 | |
| Doplang | 11 | 8 | 7 | 7 | 9 | 16 | 1 | 16 | |
| Wlahar | 6 | 14.5 | 8 | 8 | 2.25 | 4 | 42.25 | 4 | |
| Gombolharjo | 5 | 16 | 14 | 15.5 | 121 | 81 | 4 | 110.25 | |
| Karanganyar | 7 | 11 | 13 | 12 | 16 | 36 | 4 | 25 | |
| Karangbende | 16 | 12.5 | 15 | 13 | 12.25 | 1 | 6.25 | 9 | |
| Adireja Wetan | 9 | 12.5 | 9 | 11 | 12.25 | 0 | 12.25 | 4 | |
| Pedasong | 15 | 14.5 | 16 | 14 | 0.25 | 1 | 2.25 | 1 | |
| Adireja Kulon | 10 | 9 | 10 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 30.25 | |
| | | | | Jumlah | 369 | 326 | 121 | 114.25 | 42.5 |
| | | | | Rs = | 0.457352 | 0.520588 | 0.822058 | 0.43161765 | 0.82720588 |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

IPB University

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Lampiran 16. Analisis Korelasi Spearman Kecamatan Sampang, 1996.

| Desa | Kepadatan Penduduk | Ekonomi | Aksesb. | Skalogram las. sbses & Ekonomi | Kepadatan & Ekonomi | Kepadatan & Aksesbi. | Ekonomi & Aksesbi. | Skalogram & kepadatan | Skalogram & Ekonomi |
|--------------|-----------------------|---------|---------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Karangtengah | 4 | 4 | 1 | 4.5 | 0 | 9 | 9 | 0.25 | 0.25 |
| Karangjati | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 16 | 1 |
| Sampang | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nusajati | 6 | 7.5 | 4 | 3 | 2.25 | 4 | 12.25 | 9 | 20.25 |
| Karangasem | 9 | 7.5 | 8 | 4.5 | 2.25 | 1 | 0.25 | 20.25 | 9 |
| Sidasari | 2 | 5 | 7 | 7.5 | 9 | 25 | 4 | 30.25 | 6.25 |
| Paketingan | 10 | 3 | 6 | 6 | 49 | 16 | 9 | 16 | 9 |
| Brani | 8 | 6 | 5 | 7.5 | 4 | 9 | 1 | 0.25 | 2.25 |
| Paberasan | 7 | 9 | 9.5 | 10 | 4 | 6.25 | 0.25 | 9 | 1 |
| Ketanggung | 3 | 10 | 9.5 | 9 | 49 | 30.25 | 2.25 | 36 | 1 |
| | | | Jumlah | | 128.5 | 105.5 | 40 | 66.75 | 3.25 |
| | | | $R_s =$ | | 0.221212 | 0.360606 | 0.757575 | 0.16363636 | 0.74545455 |

attik cipr milik IPB University

1. Mengingat pentingnya sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber atau mengutipnya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan jurnalistik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mempergunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk keuntungan pribadi.

| No | Kendaraan | Jumlah Pedagang Terang | | Jumlah Pedagang Pagar | | | | Pedagang | | Jumlah (Rp) | | | |
|------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------|--------|----------|--------|-------------|-------------------------|----|----|
| | | Kendaraan | Kapasitas | Kendaraan | Kapasitas | Pagar | Jumlah | Pagar | Jumlah | | | | |
| 79.8 | 162 | 250 | 40 | 452 | 162 | 320 | 60 | 542 | 155124 | 134200 | Bank, pedagang, wartel | 87 | |
| 320 | | | | | | 35 | 17 | 52 | 4000 | | | | 12 |
| 480 | 3 | | | 3 | 7 | 72 | 72 | 151 | 7500 | | | | 6 |
| 96 | | | | | 4 | 34 | 34 | 72 | 7200 | | | | 3 |
| 844 | 51 | 50 | 35 | 146 | 61 | 125 | 125 | 311 | 85000 | 43500 | Pegadaian, Terminal | 15 | |
| 64 | 4 | 20 | 25 | 49 | 4 | 31 | 28 | 63 | 65000 | | | | 3 |
| 240 | 7 | 36 | 57 | 100 | 7 | 45 | 63 | 115 | 5000 | | | | 3 |
| 90 | | | | | | 18 | 42 | 60 | 7500 | | | | 2 |
| 500 | | | | | | 58 | 82 | 140 | 5250 | | | | 1 |
| 448 | 57 | 144 | 73 | 274 | 57 | 231 | 112 | 400 | 125000 | 95000 | Bank, Wartel, Pegadaian | 56 | |
| 64 | | | | | | 9 | 11 | 20 | 2300 | | | | 1 |

@Hak cipta milik

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pribadi
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan umum
 2. Dilarang mengumumkannya

| No. Urut | No. Brg. | Jumlah | Kemasan Kerja | | | Orisinal per hari (ribu Rp) | | | Sifat Berdagang | | Asal Brg. Dagangan | | Asal Modal | |
|----------|----------|--------|---------------|----------|---------|-----------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|------------|---------|
| | | | lebih 10 | kurang 5 | lebih 3 | kurang 5 | 50 - 100 | lebih 100 | Manerip | Berpindah | Lokal | Eks Lokal | Bank | Sendiri |
| 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | |
| 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 13 | 5 | 9 | 27 | 0 | 16 | 7 | 4 | 16 | 11 | 9 | 18 | 3 | 24 | |
| 15 | 1.25 | 2.25 | 6.75 | 0 | 4 | 1.75 | 1 | 4 | 2.75 | 2.25 | 4.5 | 0.75 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 | |
| 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | |
| 14 | 12 | 8 | 34 | 0 | 29 | 4 | 2 | 23 | 11 | 10 | 24 | 7 | 27 | |
| 8 | 2.4 | 1.6 | 6.8 | 0 | 5.8 | 0.8 | 0.4 | 4.6 | 2.2 | 2 | 4.8 | 1.4 | 5.4 | |
| 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 3 | 7 | 5 | 14 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 13 | 8 | 7 | |
| 5 | 3.5 | 2.5 | 7 | 0.5 | 5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 4 | 1 | 6.5 | 4 | 3.5 | |

| No. Urut | No. Brg. | Jumlah | Kemasan Kerja | | | Orisinal per hari (ribu Rp) | | | Sifat Berdagang | | Asal Brg. Dagangan | | Asal Modal | |
|----------|----------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|----------|------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|------------|---------|
| | | | lebih 10 | kurang 5 | lebih 3 | kurang 5 | 50 - 100 | lebih 100 | Manerip | Berpindah | Lokal | Eks Lokal | Bank | Sendiri |
| 10 | 10 | 80 | 100 | 0 | 10 | 50 | 40 | 70 | 30 | 10 | 90 | 20 | 80 | |
| 157 | 14.28571 | 14.28571 | 100 | 0 | 71.42857 | 28.57143 | 0 | 42.8571428571429 | 57.1428571 | 42.8571429 | 57.14286 | 0 | 100 | |
| 60 | 40 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 80 | 40 | 60 | 0 | 100 | |
| 80 | 20 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60 | 40 | 20 | 80 | |
| 115 | 18.51852 | 33.33333 | 100 | 0 | 59.25926 | 25.92593 | 14.81481 | 59.2592592592593 | 40.7407407 | 33.3333333 | 66.66667 | 11.11111 | 88.88889 | |
| 115 | 18.51852 | 33.33333 | 100 | 0 | 59.25926 | 25.92593 | 14.81481 | 59.2592592592593 | 40.7407407 | 33.3333333 | 66.66667 | 11.11111 | 88.88889 | |
| 40 | 40 | 20 | 100 | 0 | 40 | 40 | 20 | 80 | 20 | 20 | 80 | 30 | 70 | |
| 367 | 83.33333 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 16.6666667 | 83.33333 | 16.66667 | 83.33333 | |
| 367 | 16.66667 | 16.66667 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 33.3333333 | 66.66667 | 0 | 100 | |
| 40 | 0 | 60 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 80 | 40 | 60 | 20 | 80 | |
| 714 | 28.57143 | 28.57143 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 28.5714285714286 | 71.4285714 | 42.8571429 | 57.14286 | 28.57143 | 71.42857 | |
| 647 | 35.29412 | 23.52941 | 100 | 0 | 82.85714 | 11.42857 | 5.714286 | 67.6470588235294 | 32.3529412 | 29.4117647 | 70.58824 | 20.58824 | 79.41176 | |
| 647 | 35.29412 | 23.52941 | 100 | 0 | 82.85714 | 11.42857 | 5.714286 | 67.6470588235294 | 32.3529412 | 29.4117647 | 70.58824 | 20.58824 | 79.41176 | |
| 20 | 50 | 30 | 90 | 10 | 50 | 20 | 30 | 70 | 30 | 0 | 100 | 80 | 20 | |
| 20 | 40 | 40 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 60 | 0 | 100 | |
| 20 | 46.66667 | 33.33333 | 93.33333 | 6.6666667 | 66.66667 | 13.33333 | 20 | 46.6666666666667 | 53.3333333 | 13.3333333 | 86.66667 | 53.33333 | 46.66667 | |
| 20 | 46.66667 | 33.33333 | 93.33333 | 6.6666667 | 66.66667 | 13.33333 | 20 | 46.6666666666667 | 53.3333333 | 13.3333333 | 86.66667 | 53.33333 | 46.66667 | |